



MODUL PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

2019

Kegiatan Pembelajaran

Modul

Penguatan Wawasan Kebangsaan Pola Dukung 52 JP

Penulis:

Dra. Dyah Sriwilujeng, M.Pd.

Dr. Ari Pujiastuti, M.Pd.

Dra. Retno Kinteki, M.Sos.

Susvi Tantoro, S. Sos., M.A.

Nugroho Susanto, SE., M.Pd.

Erning Wijayati, S.AB., M.M.

Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum., M.Pd.

Gatot Malady, S.IP., M.Si.

Prayogo Kusumaryoko, S.Pd., M.Hum.

Pengkaji:

1. Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd.

2. Dr. H. A. Rosyid Al Atok, M.Pd.

3. Dr. Joko Sayono, M.Pd., M.Hum.

4. Drs. Rohmad Widodo, M.Si.

5. Rose Fitria Lutfiana, M.Pd.

6. Andik Suwastono, M.Pd.

7. Indrijati Soerjasih, S.Sos., M.Si.

8. Didik Budi Handoko, S.Pd.

9. Dr. Sispurwo Julianto, S.Pd., M.Pd.

10. Aldi, S.Pd., M.Pd.

Desainer Grafis dan Ilustrator:

TIM Desain Grafis

Copyright © 2019

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Sebagai seorang pendidik yang profesional guru memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik baik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) huruf d bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

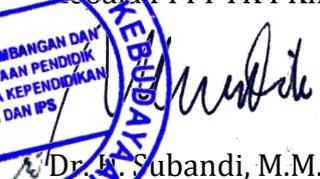
Peran guru dalam proses pendidikan menjadi sangat penting terutama pada era digital, *internet of things* dan Revolusi Industri 4.0 dimana batas ruang dan waktu menjadi hilang. Peserta didik dengan mudah memperoleh informasi baik yang bersifat positif maupun negatif. Kondisi seperti ini jika dibiarkan akan merusak jati diri peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Disinilah pentingnya penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Nilai-nilai wawasan kebangsaan diharapkan mampu menjadi penangkal bagi peserta didik dari pengaruh negatif yang merusak keutuhan negara.

Selain peran guru juga diperlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah dalam hal ini adalah tenaga kependidikan seperti Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Pustakawan dan Laboran. Tenaga kependidikan berperan menciptakan lingkungan sekolah yang mampu menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan kepada peserta didik dalam setiap aktivitas di sekolah.

Mengingat perlu ada penyadaran pentingnya peran guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan tersebut, PPPPTK PKn dan IPS sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas pengembangan dan pemberdayaan melalui pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan menginisiasi sebuah Pelatihan Wawasan Kebangsaan. Melalui Pelatihan ini diharapkan guru dan tenaga kependidikan mampu melakukan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran dengan lebih baik dan menyenangkan, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya dikuasai sebagai teori tetapi juga bisa memperkuat rasa cinta tanah air.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelatihan tersebut maka PPPPTK PKn dan IPS melakukan penyusunan Modul Pelatihan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi tentang penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan. Modul ini merupakan salah satu perangkat pelatihan yang disusun berdasarkan struktur program dan silabus yang telah dikuatkan oleh beberapa pakar dan calon pengguna.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga Modul Pelatihan Wawasan Kebangsaan ini mampu mendorong ketercapaian tujuan Pelatihan Wawasan Kebangsaan dan mampu meningkatkan kompetensi guru secara umum.

Batu, 21 Maret 2019
Kepala PPPPTK PKn dan IPS,

Dr. H. Subandi, M.M.
NIP. 196303251990031001



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR _____	3
DAFTAR ISI _____	5
DAFTAR GAMBAR _____	8
DAFTAR TABEL _____	9
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 _____	10
MASYARAKAT MUTIKULTURAL _____	10
A. Kompetensi _____	10
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _____	10
C. Materi _____	10
1. Konsep Masyarakat Multikultural	10
2. Karakteristik Masyarakat Multikultural	11
3. Faktor-faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia	12
4. Wujud Keragaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia.....	13
5. Konsekuensi Masyarakat Multikultural.....	14
6. Pengembangan Relasi Etnik dalam Komunikasi Lintas Budaya	17
7. Praktik Komunikasi Lintas Budaya	18
8. Manfaat Multikultural dalam Membangun Keutuhan Bangsa	21
D. Lembar Kegiatan _____	23
E. Refleksi _____	25
F. Daftar Pustaka _____	28
KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 _____	30
JEJAK PERJUANGAN BANGSA INDONESIA _____	30
A. Kompetensi _____	30
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _____	30
C. Materi _____	30
1. Pahlawan Nasional.....	30
2. Tonggak-tonggak Peristiwa Sejarah Perjuangan Bangsa.....	35

D. Lembar Kegiatan	45
E. Refleksi	45
F. Daftar Pustaka	48
KEGIATAN PEMBELAJARAN 3	49
PANCASILA IDEOLOGIKU	49
A. Kompetensi	49
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	49
C. Materi	49
1. Makna lambang Garuda Pancasila dan Sila-sila Pancasila	49
2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	62
3. Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Ideologi Bangsa	64
D. Lembar Kegiatan	70
E. Refleksi	72
F. Daftar Pustaka	75
KEGIATAN PEMBELAJARAN 4	76
POSISI STRATEGIS INDONESIA	76
A. Kompetensi	76
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	76
C. Materi	76
1. Letak (astronomis, geografis, dan geologis), Luas, Batas dan Bentuk Wilayah Indonesia	76
2. Indonesia Sebagai Poros Maritim	80
3. Potensi Geologis, SDA, dan SDM Indonesia	83
4. Karakteristik Bencana di Indonesia	85
5. Mitigasi dan Adaptasi Bencana	88
D. Lembar Kegiatan	90
E. Refleksi	93
F. Daftar Pustaka	96
KEGIATAN PEMBELAJARAN 5	97

HARMONI SOSIAL	97
A. Kompetensi	97
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	97
C. Materi	97
1. Harmoni Sosial	97
2. Anti Kekerasan	99
3. Antikorupsi	104
4. Etika Sosial	113
D. Lembar Kegiatan	117
E. Refleksi	120
F. Daftar Pustaka	122
KEGIATAN PEMBELAJARAN 6	125
BELA NEGARA	125
A. Kompetensi	125
B. Indikator Pencapaian Kompetensi	125
C. Materi	125
1. Hakikat Bela Negara	125
D. Lembar Kegiatan	135
F. Daftar Pustaka	140
SUPLEMEN PERATURAN BARIS-BERBARIS	142
1. Peraturan Baris-Berbaris	142
2. Gerakan di Tempat	150
3. Gerakan Berjalan	158

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Perisai Rancangan Sultan Hamid II.....	52
Gambar 2. Garuda Dengan Bahu dan Tangan Manusia.....	53
Gambar 3. Perubahan bentuk Garuda menjadi Garuda Pancasila.....	53
Gambar 4. Perubahan lambang negara Garuda Pancasila.....	55
Gambar 5. Perisai Garuda Pancasila.....	55
Gambar 6. Garuda Pancasila.....	58
Gambar 7. Letak Geografis Indonesia.....	77
Gambar 8. Batas Laut Indonesia.....	78
Gambar 9. Bentuk Batas Laut Indonesia.....	79
Gambar 10. Peta Geologis Indonesia.....	83
Gambar 11. Peta Sumber Daya Alam Indonesia.....	84
Gambar 12. Peta Sumber Daya Manusia Indonesia.....	85
Gambar 13. Siklus dan Konsep Solusi Bencana.....	90

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Makna Simbol Sila-sila Pancasila.	60
Tabel 2. Prosentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Pulau di Indonesia.....	85
Tabel 3. Perbedaan PBB Lama dan Baru	143

Kegiatan Pembelajaran 1

MASYARAKAT MUTIKULTURAL

A. Kompetensi

1. Memahami Masyarakat Multikultural
2. Memberikan alasan pentingnya praktik komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konsep masyarakat multikultural.
2. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat multikultural di Indonesia.
3. Mengidentifikasi faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia
4. Mengidentifikasi wujud keragaman dalam masyarakat multikultural di Indonesia.
5. Menganalisis konsekuensi masyarakat multikultural
6. Menganalisis komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural.
7. Menemukan contoh praktik komunikasi lintas budaya dalam masyarakat multikultural.
8. Memberikan kesimpulan manfaat multikultural dalam membangun keutuhan bangsa.

C. Materi

1. Konsep Masyarakat Multikultural

Istilah masyarakat multikultural disusun atas tiga kata, yakni “masyarakat”, “multi”, dan “kultural”. “Masyarakat” artinya yaitu sebagai satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus menerus dan terikat oleh perasaan bersama, “Multi” berarti banyak atau beranekaragam, dan “kultural” berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa yang lainnya.

Dalam konteks yang lebih luas, beberapa ahli mendefinisikan masyarakat multikultural secara beragam. Berikut ini pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian masyarakat multikultural.

- a. Nasikun (2004) mengungkapkan bahwa suatu masyarakat multikultural yang sifatnya majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural mempunyai subkebudayaan yang bersifat “diverse” yang ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat dan juga sistem nilai dari kesatuan sosial, serta sering munculnya konflik sosial.
- b. Liliweri (2005:57-62) mengistilahkan masyarakat multikultural sebagai suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beragam etnik, dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik.
- c. Parekh (1997:167) menyebutkan bahwa masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, bahasa, dan budaya. Di dalamnya mencakup beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan dan perilaku.
- d. Kymlicka (2002:13-49) menjelaskan konsep multikultural sebagai seperangkat gagasan yang relatif mempunyai koherensi dengan gagasan yang membentuk sebuah mosaik kebudayaan yang terbentuk oleh kompleksitas akibat interseksi dari ras, etnik, kelas sosial, gender, bahasa, agama, orientasi seksual, hingga kemampuan personal.

Dari beberapa konsep di atas pada hakikatnya konsep masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang mempunyai banyak suku bangsa dan budaya dengan beragam adat istiadat dalam kerangka hidup bersama berdampingan satu sama lain yang sederajat dan saling berinterseksi dalam suatu tatanan kesatuan sosial dan politik.

2. Karakteristik Masyarakat Multikultural

Menurut Pierre L. Van den Berghe (Nasikun, 2004), ada beberapa karakteristik masyarakat multikultural, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial
- b. Keberagaman yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat masyarakat membentuk kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama sehingga menghasilkan sub kebudayaan berbeda satu dengan kelompok lain.
- c. Memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
- d. Masyarakat yang beragam membuat struktur masyarakat pun mengalami perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain. Perbedaan struktur masyarakat itu dapat dilihat melalui lembaga-lembaga sosial yang bersifat tidak saling melengkapi.

- e. Kurang mengembangkan konsensus (kesepakatan bersama).
- f. Masyarakat yang beragam memiliki standar nilai dan norma berbeda yang diwujudkan melalui perilaku masyarakat. Hal itu disebabkan karena karakteristik masyarakat yang berbeda kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial.
- g. Relatif sering terjadi konflik.
- h. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik. Konflik yang terjadi bisa sangat beragam, mulai dari konflik antar individu sampai konflik antar kelompok.
- i. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Jika masyarakat multikultural bisa terkoordinasi dengan baik, maka integrasi sosial sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, integrasi sosial di masyarakat timbul bukan karena kesadaran, melainkan paksaan dari luar diri atau luar kelompok.
- j. Adanya dominasi politik
- k. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat multikultural dapat memiliki kekuatan politik yang mengatur kelompok lain. Hal ini menjadi bentuk penguasaan (dominasi) dari suatu kelompok kepada kelompok lain yang tidak memiliki kekuatan politik.

3. Faktor-faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia

- a. **Faktor Sejarah Indonesia;** Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah terutama dalam hal rempah-rempah. Sehingga banyak negara-negara asing ingin menjajah seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dengan demikian mereka tinggal dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang menikah dengan bangsa Indonesia. Kondisi inilah yang menambah kekayaan budaya dan ras yang di Indonesia.
- b. **Pengaruh Kebudayaan Asing;** Masyarakat mudah menerima budaya yang datang dari luar meski sering terjadi benturan budaya asing dengan budaya lokal. Masuknya budaya asing inilah salah satu faktor memperkaya budaya dan membuat masyarakat menjadi masyarakat multikultural.
- c. **Faktor Geografis;** Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis yaitu diantara dua benua dan dua samudera sehingga Indonesia dijadikan sebagai jalur perdagangan internasional. Karena sebagai jalur perdagangan, banyak negara-negara asing datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang seperti Cina, India, Arab, dan negara-negara Eropa. Kondisi inilah menambah budaya yang masuk ke Indonesia dan terciptanya masyarakat multikultural.

- d. **Faktor Fisik dan Geologi;** Kalau dilihat dari struktur geologi, Indonesia terletak di antara tiga lempeng yang berbeda yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan dan mempunyai beberapa tipe geologi seperti: tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Dengan kondisi yang berpulau-pulau tersebut, maka kehidupan masyarakat setiap pulau berbeda-beda sesuai dengan kondisi pulaunya.
- e. **Faktor Iklim;** Iklim juga sangat mempengaruhi kebudayaan di Indonesia, sebagai contoh orang yang berada di daerah pegunungan dengan iklim sejuk membentuk kebudayaan masyarakat yang ramah.

4. Wujud Keragaman dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia

Menurut Koentjaraningrat (1996) suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Definisi mengenai suku bangsa seperti tersebut di atas dalam kenyataannya sangat kompleks. Misalnya penduduk Papua terdiri atas etnik Sentani, Marindanim, Serui, Kapauku dan sebagainya yang masing-masing memiliki kebudayaan dan bahasa khas yang mereka gunakan dalam kelompoknya masing-masing. Namun apabila mereka hidup di luar Papua, maka akan menampilkan identitas sebagai orang Papua saja. Demikian halnya yang dialami oleh orang Jawa yang tinggal di luar Jawa, semuanya mengaku sebagai orang Jawa, tetapi ketika tinggal di Jawa tidak mau disamakan, karena memang berbeda suku.

Van Vollenhoven (Koentjaraningrat, 1996:193) mengklasifikasikan berbagai suku bangsa Indonesia didasarkan pada sistem lingkaran hukum adat yang dibuat oleh yang terbagi dalam 19 daerah sebagai berikut: Aceh, Gayo-Alas dan Batak (termasuk Nias dan Batu), Minangkabau (termasuk Mentawai), Sumatera Selatan (termasuk Enggano), Melayu, Bangka dan Biliton, Kalimantan, Minahasa (termasuk Sangir-Talaud), Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon Maluku (termasuk Kepulauan Barat Daya), Papua, Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, serta Jawa Barat.

Hidayat (1996), menyebutkan bahwa setidaknya 400 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda. Beberapa suku bangsa yang tergolong paling besar, di antaranya: Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis, Bali, Batak, Sumbawa, Betawi, Melayu,

Banjar, Aceh, Palembang, Sasak, dayak, Toraja, dan Makassar. Data tersebut belum mencakup Maluku, NTT, dan Papua.

5. Konsekuensi Masyarakat Multikultural

Indonesia memiliki lebih dari 400 etnik (Hidayah, 1996). Oleh sebab itu Indonesia merupakan salah satu bangsa paling plural di dunia. Hebatnya lagi, masing-masing etnik benar-benar memiliki akar tradisi dan keterikatan yang kuat dengan tanah Indonesia. Kecuali etnik Cina, Arab, dan India, etnik-etnik lain memiliki tanah leluhur di Indonesia, dengan kata lain 'asli Indonesia'. Berbeda misalnya dengan pluralisme di Amerika dan Australia yang dibangun oleh etnik-etnik pendatang.

Akibat dari kuatnya akar tradisi pada etnik-etnik di Indonesia, maka budaya Indonesia yang tunggal tidak pernah terwujud. Masing-masing etnik tetap memiliki budayanya sendiri yang satu sama lain berbeda. Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa Indonesia bukanlah sebuah bangsa tetapi negara yang terdiri dari bangsa-bangsa (Budiono, 2004:23). Indonesia sebagai sebagai bangsa tidak akan pernah selesai. Pernyataan itu mungkin menimbulkan perdebatan, tapi jika melihat fakta di lapangan di mana terjadi kontras perbedaan yang tajam antar etnik, maka pendapat tersebut layak mendapatkan pembenaran.

a. Masalah Etnisitas

Menurut Barth (1988) istilah etnik menunjuk pada suatu kelompok tertentu yang karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Kelompok etnik adalah kelompok orang-orang sebagai suatu populasi yang: 1) Dalam populasi kelompok mereka mampu melestarikan kelangsungan kelompok dengan berkembang biak; 2) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama, dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam suatu bentuk budaya. 3) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri. 4) Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Sebuah kelompok etnik pertama kali diidentifikasi melalui hubungan darah. Meskipun seseorang mengadopsi semua nilai-nilai dan tradisi suatu etnik tertentu tetapi jika ia tidak memiliki hubungan darah dengan anggota kelompok etnik itu, maka ia tidak bisa digolongkan anggota kelompok etnik tersebut. Pada saat anggota kelompok etnik melakukan migrasi, sering terjadi keadaan dimana mereka keluar dari

akar budaya etniknya karena mengadopsi nilai-nilai baru. Demikian juga dengan bahasa, banyak anak-anak dari anggota kelompok etnik tertentu yang merantau tidak bisa lagi berbahasa etniknya. Akan tetapi mereka tetap menganggap diri sebagai anggota etnik yang sama dengan orangtuanya dan juga tetap diakui oleh kelompok etniknya.

Etnik tetap ada karena berkaitan dengan kebutuhan akan identitas-identitas (Parekh, 2008:13). Identitas mengacu kepada bagaimana manusia membedakan dirinya dengan orang lain, baik sebagai individu maupun anggota kelompok sosial, dan orang lain pun mengakuinya, berdasarkan ciri-ciri tertentu yang melekat padanya. Pertanyaan yang selalu muncul ketika bertemu orang-orang baru adalah pertanyaan “Anda orang darimana?” yang berarti juga menanyakan tentang “Etnik Anda apa?”

b. Primordialisme

Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Di satu sisi, sikap primordial memiliki fungsi untuk melestarikan budaya kelompoknya.

c. Etnosentrisme

Matsumoto (1996) mendefinisikan etnosentrisme sebagai kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. Etnosentrisme tidak selalu negatif sebagaimana umumnya dipahami. Etnosentrisme dalam hal tertentu juga merupakan sesuatu yang positif. Etnosentrisme juga merupakan sesuatu yang fungsional karena mendorong kelompok dalam perjuangan mencari kekuasaan dan kekayaan. Pada saat konflik dengan bangsa dari luar, etnosentrisme dapat menjadi kekuatan untuk saling dukung satu sama lain.

d. Prasangka dan Stereotip

Prasangka adalah cara pandang atau perilaku seseorang terhadap orang lain secara negatif (Purwasito, 2003: 178). Prasangka sangat potensial menimbulkan sebuah kesalahpahaman. Prasangka berangkat dari adanya pandangan negatif dengan adanya pemisahan yang tegas antara perasaan kelompokku (*in-group*) dan perasaan kelompok lain (*out-group*). Prasangka erat kaitannya dengan stereotip.

Menurut Ahmadi (1990: 223), stereotip merupakan gambaran atau angan-angan terhadap individu atau kelompok yang terkena prasangka tadi. Stereotip berkaitan dengan konstruksi imej yang telah ada dan terbentuk secara turun-temurun menurut sugesti. Stereotip tidak hanya mengacu pada *image* negatif tetapi juga positif.

e. Kelompok Minoritas dan Kelompok Mayoritas

Suatu kelompok dikatakan sebagai minoritas apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok lain di dalam komunitas. Dari sudut pandang ilmu sosial pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota. Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi, bisa saja suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit.

f. Konflik SARA

Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebut adanya kenyataan masyarakat Indonesia yang masih menggunakan latar belakang etnik, rasial, dan agama untuk mencapai tujuan (Purwasito, 2003: 307). SARA adalah format untuk mendefinisikan konflik horisontal di Indonesia. Agama, terutama jika dikaitkan dengan kesukubangsaan dan ras memang sering menjadi sumber penyebab terjadinya konflik-konflik sosial di Indonesia. Apa yang telah terjadi di Ambon, Sambas, Sampit, Poso dan daerah-daerah lain adalah contoh betapa faktor keyakinan keagamaan dalam kesukubangsaan telah ikut andil dalam konflik-konflik berdarah yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ribuan lainnya untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

g. Disintegrasi Bangsa

Bangsa Indonesia kini menghadapi tantangan besar terkait dengan masalah etnisitas. Jika bangsa ini tidak berhasil menghadapi dan menaklukkan tantangan tersebut, maka akibat yang paling fatal adalah terjadinya disintegrasi bangsa. Akan tetapi kalau warganya memiliki kesepakatan dan komitmen bahwa negara kesatuan ini adalah final, maka proses menjadi negara kesatuan akan semakin eksis dengan mengedepankan ke-Bhinneka Tunggal Ika-nya.

Untuk dapat membangun bangsa agar terhindar dari disintegrasi bangsa, maka multikulturalisme merupakan alternatif yang paling tepat, meski belum ditemukan model multikulturalisme seperti apa yang paling tepat untuk Indonesia. Setidaknya ada tiga masalah besar berkaitan dengan isu hak-hak minoritas dalam kaitannya dengan multikulturalisme dan dilema negara bangsa. (Semendawai, 2005):

- 1) Fakta keanekaragaman suku bangsa, ras, agama, dan golongan sosial-ekonomi, semakin diperumit oleh faktor geografi Indonesia yang kepulauan, penduduk yang tinggal terpisah-pisah satu sama lain, mendorong potensi disintegrasi meningkat.
- 2) Nasionalisme dan negara seyogyanya dibicarakan mulai dari akarnya, yakni mulai dari konsep-konsep “suku bangsa”, “kelompok etnik”, dan “etnisitas” jelas menunjukkan bahwa apabila semangat nasionalisme luntur karena berbagai sebab, maka yang tertinggal adalah semangat kesukubangsaan yang menguat.
- 3) Hak-hak minoritas senantiasa melekat pada fakta pengaturan keanekaragaman yang ada. Apabila pengaturan nasional berorientasi pada kebijakan kebudayaan seragam dan sentralistis maka fakta pluralisme, diferensiasi, dan hierarki masyarakat dan kebudayaan akan meningkat.

Sehubungan dengan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia menunjukkan kekayaan bangsa Indonesia, oleh karena itu dalam rangka mempertahankan kekayaan budaya dan menggalang persatuan budaya, maka perlu upaya melestarikan masing-masing budaya dan saling menghormati keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.

6. Pengembangan Relasi Etnik dalam Komunikasi Lintas Budaya

Model pendekatan dalam relasi etnik juga digambarkan melalui berbagai metafora (untuk menggambarkan bercampurnya beragam kebudayaan). Menurut Liliweri, 2003:16), ada beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep metafora yang menggambarkan sebuah proses terbentuknya relasi antaretnik, yaitu:

a. Metafora *Melting Pot*

Metafora ini mengibaratkan suatu bangsa sebagai wadah besar atau kontainer tempat peleburan logam yang memiliki temperatur yang sangat tinggi, yang di dalamnya dapat dijadikan tempat untuk meleburkan logam. Konsep ini menggambarkan situasi awal di negara AS tatkala para imigran yang berasal dari banyak kebudayaan datang untuk

mencari pekerjaan. Para imigran itu akhirnya berbaur bersama-sama dengan orang-orang dari kebudayaan lain yang telah tiba lebih dahulu dalam satu kebudayaan besar sehingga terbentuklah sebuah kebudayaan yang kuat.

b. *Metafora Tributaries*

Metafora ini menggambarkan aliran sungai yang airnya merupakan campuran dari aliran sungai-sungai kecil lain. Aliran sungai itu menuju ke arah yang sama, ke sebuah muara. Konsep ini menggambarkan budaya nasional ibarat sebuah muara sungai yang merupakan lintasan dari sejumlah budaya daerah yang terus mengalir. Ibarat aliran sungai, aliran itu terus bergerak ke muara, namun sumber-sumber air dari anak sungai itu tidak akan hilang, bahkan tetap dipelihara ekosistemnya,

c. *Metafora Tapestry*

Metafora ini merujuk pada dekorasi pakaian yang terbentuk dari helai-helai benang. Konsep ini kemudian diambil untuk menggambarkan kebudayaan dalam suatu negara sebagai kebudayaan dekoratif, ibarat selembar kain yang dijahit dari helai-helai benang yang beraneka ragam warna.

d. *Metafora Garden Salad*

Konsep metafora Garden Salad ini menggambarkan bahwa kebudayaan ibarat mangkuk yang berisi campuran salad, sering juga melukiskan kekuatan budaya yang dibentuk oleh campuran pasukan tempur, yang berasal dari pelbagai pasukan yang berbeda-beda, dan kemudian dicampur ke dalam sebuah pasukan khusus.

7. Praktik Komunikasi Lintas Budaya

Komunikasi lintas budaya adalah terjadinya pengiriman pesan dari seseorang yang berasal dari satu budaya yang berbeda dengan pihak penerima pesan. Bila disederhanakan, komunikasi lintas budaya ini memberi penekanan pada aspek perbedayaan kebudayaan sebagai faktor yang menentukan bagi keberlangsungan proses komunikasi. Konsep terpenting dalam studi ini adalah menyangkut adanya “kontak” dan “komunikasi” antar pelaku-pelaku komunikasi.

Banyak pembahasan komunikasi lintas budaya yang berkisar pada perbandingan perilaku komunikasi antarbudaya dengan menunjukkan perbedaan dan persamaan sebagai berikut:

- a. Persepsi, yaitu sifat dasar persepsi dan pengalaman persepsi, peranan lingkungan sosial dan fisik terhadap pembentukan persepsi
- b. Kognisi, yang terdiri dari unsur-unsur khusus kebudayaan, proses berpikir, bahasa dan cara berpikir.
- c. Sosialisasi, berhubungan dengan masalah sosialisasi universal dan relativitas, tujuan-tujuan institusionalisasi.
- d. Kepribadian, misalnya tipe-tipe budaya pribadi yang mempengaruhi etos, dan tipologi karakter atau watak bangsa.

Urgensi untuk mempelajari komunikasi lintas budaya ini semakin terasa karena semakin terbukanya pergaulan kita dengan orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda, di samping kondisi bangsa Indonesia yang sangat majemuk dengan berbagai ras, suku bangsa, agama, latar belakang daerah, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Untuk memerinci alasan dan tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya, Litvin (1977) menyebutkan beberapa alasan di antaranya sebagai berikut:

- a. Dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan.
- b. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda.
- c. Nilai-nilai setiap masyarakat se"baik" nilai-nilai masyarakat lainnya.
- d. Setiap individu dan/atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri.
- e. Perbedaan-perbedaan individu itu penting, namun ada asumsi-asumsi dan pola-pola budaya mendasar yang berlaku.
- f. Pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain.
- g. Dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan dan masalah manusia.
- h. Pemahaman atas orang lain secara lintas budaya dan antar pribadi adalah suatu usaha yang memerlukan keberanian dan kepekaan.
- i. Pengalaman-pengalaman antar budaya dapat menyenangkan dan menumbuhkan kepribadian.
- j. Keterampilan-keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural terhadap interaksi manusia ke pandangan multikultural.
- k. Perbedaan-perbedaan budaya menandakan kebutuhan akan penerimaan dalam komunikasi, namun perbedaan-perbedaan tersebut secara arbitrer tidaklah menyusahkan atau memudahkan.

- l. Situasi-situasi komunikasi antar budaya tidaklah statik dan bukan pula stereotip. Karena itu seorang komunikator tidak dapat dilatih untuk mengatasi situasi. Dalam konteks ini kepekaan, pengetahuan dan keterampilannya bisa membuatnya siap untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan komunikasi yang efektif dan saling memuaskan.

Sedangkan mengenai tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya, Litvin (1977) menguraikan bahwa tujuan itu bersifat kognitif dan afektif, yaitu untuk:

- a. Menyadari bias budaya sendiri
- b. Lebih peka secara budaya
- c. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut.
- d. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri
- e. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang
- f. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri.
- g. Membantu memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya
- h. Membantu memahami kontak antar budaya sebagai suatu cara memperoleh pandangan ke dalam budaya sendiri: asumsi-asumsi, nilai-nilai, kebebasan-kebebasan dan keterbatasan-keterbatasannya.
- i. Membantu memahami model-model, konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi bidang komunikasi antar budaya.
- j. Membantu menyadari bahwa sistem-sistem nilai yang berbeda dapat dipelajari secara sistematis, dibandingkan, dan dipahami.

Disadari sepenuhnya bahwa komunikasi yang dilakukan oleh manusia selalu mengandung potensi perbedaan. Sekecil apapun perbedaan itu, sangat membutuhkan upaya-upaya untuk memberhasilkan proses komunikasi secara efektif; yakni dengan menggunakan informasi budaya mengenai pelaku-pelaku komunikasi yang bersangkutan. Komunikasi lintas budaya menjadi kebutuhan bagi semua kalangan untuk dapat menjalin hubungan yang lebih baik dan memuaskan, terutama bagi mereka yang berbeda budaya.

Porter dan Jain (1981:202) dalam Susanto (2009), mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, antara lain:

- a. Pahami diri sendiri (*know yourself*). Memahami diri sendiri penting, ketika melakukan komunikasi dan interaksi dengan kelompok lain. Implikasinya, seseorang dapat memposisikan diri dan tidak canggung dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok etnik yang berbeda;
- b. Sediakan waktu (*take time*) ketika terjadi ketidaksepahaman dengan kelompok budaya lain. Seiring dengan berjalannya waktu, diharapkan muncul pemahaman, dan tingkat emosi yang mereda;
- c. Penggunaan bahasa yang sama. Jika ingin hubungan antar kelompok budaya berjalan lancar, harus menggunakan bahasa yang sama dengan kelompok lain.
- d. Perhitungan *setting*. Hakikatnya, berkomunikasi dengan budaya etnik lain, harus memperhitungkan situasi dan kondisi yang berlaku dan dipercaya oleh kelompok lain;
- e. Tingkatkan kemampuan berkomunikasi (*communication style*). Usahakan terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi, dengan mempelajari bahasa dan budaya kelompok lain.
- f. Tumbuhkan umpan balik (*feedback*). Membuka kesempatan kepada kelompok lain, agar memberi umpan balik. Jadi tidak mendominasi pembicaraan, terlebih jika yang diajak berkomunikasi merasa sebagai kelompok minoritas ataupun terperangkap dalam simbol-simbol marginalisasi, maka sulit untuk mengharapakan tercapainya tujuan berkomunikasi.
- g. Kembangkan empati. Mengembangkan empati dengan memposisikan diri sendiri sebagai orang dari kelompok lain penting untuk meningkatkan hubungan.
- h. Perhatikan kesamaan dari budaya yang berbeda;
- i. Tanggung jawab etis dalam komunikasi. Etika dalam berkomunikasi dengan kelompok lain perlu dijaga, mengingat pelanggaran terhadap etika berbicara akan berakibat buruk.

Kesembilan saran untuk mengefektifkan komunikasi antar budaya tersebut, tidak selalu tidak dapat dilakukan bersama-sama dalam satu kesempatan komunikasi, tetapi paling tidak dalam situasi komunikasi tertentu di wilayah yang rawan konflik karena perbedaan nilai dan kepercayaan, dapat dipakai sebagai pedoman untuk meminimalisir berbagai perbedaan.

8. Manfaat Multikultural dalam Membangun Keutuhan Bangsa

Multikultural dapat bermanfaat untuk membangun integrasi bangsa. Instrumen utama untuk memanfaatkan kondisi yang multikultural ini dapat ditempuh dengan memaksimalkan pendidikan multikultural, yang

bertujuan untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.

Pendidikan multikultural bertujuan mewujudkan sebuah bangsa yang kuat, maju, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Dengan semangat membangun kekuatan di seluruh sektor sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai bangsa lain (Mashadi, 2009). Tujuan pendidikan multikultural mencakup 8 aspek, yaitu (Sutarno, 2008:1-24):

- a. Pengembangan literasi etnis dan budaya. Memfasilitasi siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai budaya semua kelompok etnis.
- b. Perkembangan pribadi. Memfasilitasi siswa bahwa semua budaya setiap etnis sama nilai antar satu dengan yang lain. Sehingga memiliki kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain (kelompok etnis) walaupun berbeda budaya masyarakatnya.
- c. Klarifikasi nilai dan sikap. Pendidikan mengangkat nilai-nilai inti yang berasal dari prinsip martabat manusia, keadilan, persamaan, dan, dan demokratis. Sehingga pendidikan multikultural membantu siswa memahami bahwa berbagai konflik nilai tidak dapat dihindari dalam masyarakat pluralistik.
- d. Untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya.
- e. Untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.
- f. Persamaan dan keunggulan pendidikan. Tujuan ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman guru terhadap bagaimana keragaman budaya membentuk gaya belajar, perilaku mengajar, dan keputusan penyelenggaraan pendidikan. Keragaman budaya berpengaruh pada pola sikap dan perilaku setiap individu. Sehingga guru harus mampu memahami siswa sebagai individu yg memiliki ciri unik dan memperhitungkan lingkungan fisik dan sosial yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran.
- g. Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Pendidikan multikultural memfasilitasi peserta didik memiliki dan mengembangkan sikap, nilai, kebiasaan, dan keterampilan sehingga mampu menjadi agen perubahan

sosial yang memiliki komitmen tinggi dalam reformasi masyarakat untuk memberantas perbedaan (*disparaties*) etnis dan rasial.

h. Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh.

Menurut Tilaar (2009), terdapat tiga prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendidikan multikultural didasar pada pedagogik kesetaraan manusia (*equity pedagogy*).
- b. Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya.
- c. Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya.
- d. Ketiga prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan Tilaar tersebut diatas sudah dapat menggambarkan bahwa arah dari wawasan multikulturalisme adalah menciptakan manusia yang terbuka terhadap segala macam perkembangan zaman dan keragaman berbagai aspek dalam kehidupan modern.

D. Lembar Kegiatan

Lembar Kegiatan 1.1 Masyarakat Multikultural (35 menit)

Petunjuk Pengerjaan :

- a) Identifikasi keanekaragaman budaya di masing-masing wilayah sebagai perwujudan masyarakat multikultural di Indonesia! (Kegiatan bisa dilakukan dengan memasang kartu keanekaragaman budaya yang sudah disiapkan fasilitator)
- b) Identifikasi faktor penyebab keanekaragaman budaya di Indonesia berdasarkan contoh-contoh pada kegiatan a)
- c) Setelah mengetahui keanekaragaman budaya dan faktor-faktor penyebabnya, analisislah konsekuensi/ dampak masyarakat multikultural!
- d) Bagaimana upaya solusi atas beragam konsekuensi/dampak masyarakat multikultural di Indonesia?
- e) Kerjakanlah secara berkelompok dengan semangat gotong royong dan integritas yang tinggi!
- f) Berkomunikasilah secara santun dan saling menghargai pendapat dalam kelompok. sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik!
- g) Presentasikan hasil diskusi sesuai kesepakatan dalam kelompok Saudara!

1. Identifikasi Wujud Keanekaragaman Budaya di Indonesia

NO	Suku Bangsa	LAGU DAERAH	TARIAN ADAT	RUMAH ADAT	SENJATA TRADISIONAL	MAKANAN TRADISIONAL
1	Aceh					
2	Melayu					
3	Batak					
4	Minang					
5	Betawi					
6	Sunda					
7	Jawa					
8	Madura					
9	Bali					
10	Sasak					
11	Dayak					
12	Bugis					
13	Minahasa					
14	Maluku					
15	Papua					

2. Identifikasi faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia

3. Analisis konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari adanya keragaman budaya di Indonesia

4. Solusi atas konsekuensi / dampak terjadinya masyarakat multikultural di Indonesia

E. Refleksi

Refleksi Kegiatan Pembelajaran bersifat refleksi diri yang dilakukan oleh peserta secara individu, meliputi menjawab beberapa pertanyaan terbuka dan mengisi dua instrumen ketrampilan dan sikap. Jawablah pertanyaan dan isilah pernyataan di bawah ini dengan obyektif, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat Mengerjakan.

1. Pengalaman dan ide baru apa yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini?
2. Bagaimana Saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas?
3. Materi dan hal-hal apa yang belum Saudara pahami dalam kegiatan pembelajaran ini?
4. Bagaimana usaha Saudara dalam mengatasinya?

5. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Keterampilan pada KP 1

Berikut ini rubrik refleksi yang dapat Saudara gunakan ketika melakukan refleksi. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi kemampuan Saudara.

Kriteria	Tindak Lanjut	Kondisi
Sangat Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan ke bagian penutup.	
Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK akan tetapi masih memerlukan bantuan orang lain, maka Saudara perlu berlatih kembali secara mandiri untuk mengerjakan LK-LK tersebut.	
Cukup Terampil	Apabila Saudara belum terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu berlatih kembali mengembangkan materi dengan berdiskusi dengan sesama peserta.	
Kurang Terampil	Apabila Saudara tidak terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu bantuan fasilitator/NS agar lebih terampil dan membaca kembali materi yang telah tersedia	

6. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Sikap pada KP 1

Setelah Saudara melakukan refleksi diri pada aspek keterampilan, selanjutnya lakukanlah penilaian diri untuk aspek sikap dengan mengisi instrumen refleksi berikut ini. Sikap yang perlu Saudara refleksi meliputi sikap religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong royong. Berilah tanda centang (✓) pada setiap nomor sesuai dengan kondisi Saudara.

Modul Pelatihan Penguatan Wawasan Kebangsaan

No	Pernyataan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Saya memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa			
2.	Saya selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran			
3.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya			
4.	Saya mendukung peraturan yang telah disepakati bersama			
5.	Saya selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tuntas			
6.	Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu			
7.	Saya selalu berusaha mengembangkan ilmu yang telah diberikan			
8.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus diawasi dan sesuai dengan petunjuk			
9.	Saya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar			
10.	Saya siap bekerjasama dengan rekan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran			
Jumlah skor				

Pedoman Penskoran Hasil Refleksi Aspek Sikap

Bila Saudara menjawab:

- ✓ “Ya”, maka skor = 3
- ✓ “Kadang-kadang”, maka skor = 2
- ✓ “Tidak Pernah”, maka skor = 1

Konversi jumlah skor menjadi nilai:

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor perolehan}}{30} \times 100$$

Nilai	Kriteria
>90 - 100	Amat Baik
>80 - 90	Baik
>70 - 80	Cukup
>60 - 70	Sedang
≤60	Kurang

F. Daftar Pustaka

- Al-Hakim, Suparlan dan Sri Untari. 2018. *Pendidikan Multikultural: Strategi Inovatif Pembelajaran dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani Media.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Identitas dan Krisis Budaya: Membangun Multikulturalisme Indonesia* dalam <http://www.kompas.online.com>. Diakses 25 November 2007.
- Barth, Frederich. 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.
- Hidayah, Zulyani. 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewargaan Multikultural*. Terj. Jakarta: LP3ES.
- Liliweri, Alo. 2018. *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*. Jakarta: Kencana
- Litvin, Deborah R., 1997. "The Discourse of Diversity: from Biology to Management" *Organization*, Vol. 4, No. 2, pp. 187-209.
- Matsumoto, David. 1996. *Culture and Psychology*. Pacific Grove : Brooks Cole Pub. Co
- Nasikun. 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurcolish, Ahmad. 2017. *Merajut Damai dalam Kebinekaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Parekh, Bikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Kanisius
- Purwasito, Andrik. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rustanto, Bambang. 2015. *Masyarakat Multikultur Indonesia*. Bandung: Rosdakarya.
- Semendawai, Abdul Haris. 2005. "Otonomi Daerah dalam Kehidupan Multikulturalitas di Indonesia" dalam *Suara Pembaharuan*. 8 Desember 2005
- Suparlan, Parsudi. 2006. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm-www.duniaesai.com Diakses 25 November 2007.
- Susanto, Eko Harry. 2009. "Etnosentrisme, Pemekaran Wilayah, dan Komunikasi Antarbudaya" dalam *Dinamika*. Vol. 2 No. 4, Desember 2009.
- Tilaar, H.A.R. 2004. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo
- Ujan, Andre Ata, dkk. 2011. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Indeks
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media

Kegiatan Pembelajaran 2

JEJAK PERJUANGAN BANGSA INDONESIA

A. Kompetensi

1. Mendeskripsikan peran tokoh pahlawan nasional
2. Memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konsep pahlawan
2. Menjelaskan makna pahlawan
3. Mengidentifikasi pahlawan nasional
4. Mendeskripsikan peran pahlawan nasional
5. Meneladani nilai-nilai kepahlawanan
6. Mengidentifikasi tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia
7. Mendeskripsikan makna sejarah perjuangan bangsa Indonesia

C. Materi

1. Pahlawan Nasional

a. Konsep Pahlawan

"Pahlawan" adalah sebuah kata benda. Secara etimologi kata "*pahlawan*" berasal dari bahasa Sansekerta "*phala*", yang bermakna hasil atau buah. Dalam bahasa Jawa Kuna, perkataan "*Pahlawan*" asalnya dari kata *Phala* berarti buah atau hasil, upah. Dengan demikian arti kata pahlawan ialah orang yang telah mencapai hasil atau buah dari hasil kerjanya atau usahanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pahlawan dimaknai sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani.

Pahlawan adalah seseorang yang berpahala yang perbuatannya berhasil bagi kepentingan orang banyak. Perbuatannya memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain, karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat bangsa atau umat manusia.

Pahlawan dalam Bahasa Inggris disebut "*hero*" mempunyai dua arti bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yakni: 1) pahlawan, dan 2) tokoh. Pahlawan merujuk pada manusia yang memang pernah hidup, sedangkan tokoh merupakan representasi dari ceritera rakyat, buku komik, atau karya sastra, maupun TV dan film. Meskipun pahlawan dan tokoh

berbeda sumbernya, akan tetapi terdapat persamaan yakni pahlawan maupun tokoh adalah orang yang dianggap patut dicontoh dan ditiru.

Pahlawan sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam prestasi gemilang dalam bidang kemiliteran. Pada umumnya pahlawan adalah seseorang yang berbakti kepada masyarakat, negara, bangsa dan atau umat manusia tanpa menyerah dalam mencapai cita-citanya yang mulia, sehingga rela berkorban demi tercapainya tujuan, dengan dilandasi oleh sikap tanpa pamrih pribadi.

Seorang pahlawan bangsa yang dengan sepenuh hati mencintai negara bangsanya sehingga rela berkorban demi kelestarian dan kejayaan bangsa negaranya disebut juga sebagai patriot.

b. Makna Pahlawan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Pernyataan tersebut merupakan refleksi bahwa situasi yang ada saat ini dibangun berdasarkan perjuangan para pahlawan. Perjuangan fisik dan diplomasi yang dilakukan oleh para pejuang hingga generasi saat ini dapat menikmati kemerdekaan.

Pahlawan bagi bangsa Indonesia mempunyai arti tersendiri selain menjadi ikon sifat keteladanan juga merupakan prestise bagi daerah dimana pahlawan itu berasal. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia yang disebut pahlawan atau para pahlawan adalah figur yang mewariskan serangkaian nilai-nilai luhur yang disebut nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial yang bercirikan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta bangsa dan tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, ulet, tangguh dan pantang menyerah, serta percaya pada kemampuan sendiri, patut kita lestarikan, hayati, teladani dan amalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kriteria kepahlawanan tersebut merupakan prasyarat yang harus dipenuhi bagi setiap komponen.

Figur pahlawan nasional Indonesia sampai masa kini masih bertumpu pada sosok pejuang yang anti kolonialisme dan imperialisme dan belum menyentuh peran seorang tokoh untuk bidang lain seperti pejuang masalah lingkungan, kemanusiaan, IPTEK, atau bidang lain di luar masalah tersebut.

Seiring waktu berganti, makna pahlawan pun mulai bergeser. Pahlawan tak lagi hanya para pejuang yang berjuang dalam peperangan, namun juga yang dianggap mampu membawa harum nama bangsa. Kategori pahlawan pun ada banyak, tergantung dengan prestasi yang disumbangkannya dan bidangnya masing-masing.

Bentuk penjajahan pun tidak lagi dalam bentuk fisik tapi lebih ke mental. Penjajahan ke arah mental inilah yang lebih berbahaya, karena kita tidak merasakan secara langsung, namun bersifat bertahap dan terus menerus.

Mental bangsa yang diwarnai dengan mental korupsi, kolusi, nepotisme, kemerosotan pola pikir dan pergaulan generasi muda yang tidak lagi memperhatikan nilai dan moral baik yang ada dalam agama dan masyarakat. Oleh karena itulah bangsa ini sangat membutuhkan orang-orang berani untuk memberantasnya. Indonesia sangat membutuhkan anak-anak muda yang berjiwa pahlawan. Berani bersuara dan bertindak untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.

Karakteristik seorang pahlawan adalah jujur, pemberani, dan rela melakukan apapun demi kebaikan dan kesejahteraan orang banyak. Untuk itu, setiap orang harus berjuang untuk menjadi pahlawan.

c. Pahlawan Nasional

Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang dimaksud dengan Pahlawan Nasional dalam pasal (1) adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Pahlawan Nasional” adalah gelar yang diberikan oleh negara yang mencakup semua jenis gelar yang pernah diberikan sebelumnya, yaitu Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Kemerdekaan Nasional, Pahlawan Proklamator, Pahlawan Kebangkitan Nasional, Pahlawan Revolusi, dan Pahlawan Ampera.

Kerangka undang-undang untuk gelar tersebut awalnya menggunakan nama Pahlawan Kemerdekaan Nasional yang dibuat pada saat dikeluarkannya Dekrit Presiden No. 241 Tahun 1958. Gelar pertama dianugerahkan pada 30 Agustus 1959 kepada politisi yang menjadi penulis bernama Abdul Muis, yang wafat pada bulan sebelumnya. Gelar ini digunakan saat pemerintahan Soekarno. Ketika Suharto berkuasa pada pertengahan 1960-an, gelar terbut berganti nama menjadi Pahlawan Nasional. Gelar khusus pada tingkat Pahlawan Nasional juga dianugerahkan. Pahlawan Revolusi diberikan pada tahun 1965 kepada sepuluh korban peristiwa Gerakan 30 September, sementara Soekarno dan

mantan wakil presiden Mohammad Hatta diberikan gelar Pahlawan Proklamator pada 1988 karena peran mereka dalam membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Penganugerahan gelar pahlawan diberikan langsung oleh Presiden RI yang biasanya dilakukan menjelang peringatan hari Pahlawan pada 10 November setiap tahun. Pengangkatan sebagai pahlawan dalam rangka penghormatan, penghargaan yang diberikan negara atas jasa seseorang.

Gelar pahlawan tidak diberikan begitu saja kepada seseorang, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk memperolehnya. Syarat umum untuk memperoleh gelar pahlawan di antaranya Warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; memiliki integritas moral dan keteladanan; berjasa terhadap bangsa dan negara; berkelakuan baik; setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara serta tidak pernah dipidana penjara.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Pasal 25 dan Pasal 26 juga menjelaskan seseorang yang dianggap sebagai pahlawan memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya :
 - Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik/ perjuangan dalam bidang lain mencapai/ merebut /memper tahankan/mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara.
 - Telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.
- 2) Pengabdian dan Perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya (tidak sesaat) dan melebihi tugas yang diembannya.
- 3) Perjuangan yang dilakukan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.
- 4) Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan/nasionalisme yang tinggi.
- 5) Memiliki akhlak dan moral yang tinggi.
- 6) Tidak menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangannya.
- 7) Data riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya.

Meskipun syarat atau kriteria pahlawan nasional sudah ada dan merupakan surat keputusan pemerintah, namun usaha memberikan pengarahan kepada pengertian pahlawan nasional tidaklah mengurangi melainkan dapat menambah pengertian itu sendiri. Kalimat “pahlawan nasional” jelas mengandung pengertian yang luas jika ditinjau dari berbagai aspeknya.

Pahlawan yang diartikan sebagai orang yang telah mencapai hasil atau buah dari hasil kerjanya atau usahanya. Sesuai dengan tambahan sebutan atau gelar “nasional” maka pahlawan nasional berarti seseorang yang telah mencapai hasil usahanya dalam usaha untuk kepentingan nasional atau bangsanya (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983: 19). Dalam hubungan ini pengertian usaha tidaklah diartikan sempit melainkan usaha atau perjuangan dalam arti luas untuk kepentingan bangsa.

Munculnya pahlawan-pahlawan tersebut sesuai dengan situasi, tempat dan kondisi yang masing-masing berbeda dan dengan pola perjuangan yang berbeda pula.

Pengertian pahlawan nasional juga dijelaskan hubungannya dengan munculnya pahlawan dan masyarakatnya. Oleh karena itu, meskipun kita akan memberikan pengertian pahlawan nasional bukan dari peranan pahlawan itu sendiri, melainkan peranan masyarakat atau lingkungan sekitarnya yang membuatnya dapat menjadi seorang pahlawan.

d. Nilai-nilai kepahlawanan

Melihat pengertian pahlawan dari beberapa perspektif, ada beberapa nilai-nilai yang dapat dirumuskan sebagai sikap dari seorang pahlawan, yaitu rela berkorban, mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, ikhlas, dan cinta tanah air.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 72/HUK/2003 tentang pedoman forum komunikasi keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan pejuang menjelaskan mengenai nilai-nilai kepahlawanan sebagai nilai luhur yang harus dilestarikan, dihayati dan diamalkan oleh generasi penerus dengan memiliki unsur sifat-sifat antara lain:

- 1) Iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan
- 3) Nasionalisme dan patriotisme
- 4) Teguh dalam pendirian dan cita-cita

- 5) Berani dan rela berkorban
- 6) Anti segala bentuk penjajahan
- 7) Persatuan dan kesatuan
- 8) Kesetiakawanan dan kebersamaan
- 9) Loyalitas kepada bangsa dan negara
- 10) Berbudi luhur dan dapat dipercaya
- 11) Kebebasan berpikir, berpendapat dan berkreasi
- 12) Ulet dan tabah menghadapi tantangan
- 13) Disiplin yang tinggi
- 14) Idealisme dan profesionalisme
- 15) Anti diskriminasi

Nilai-nilai kepahlawanan tersebut menjadi hal yang dapat kita pelajari dan implementasikan dalam kehidupan saat ini. Akan tetapi, hal yang lebih penting adalah nilai-nilai kepahlawanan yang bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, nilai-nilai tersebut meliputi nilai-nilai rela berkorban, tanpa pamrih, percaya pada kemampuan sendiri, dan pantang mundur, dimana nilai-nilai tersebut harus direvitalisasi dan diaktualisasikan serta dijadikan sebagai nilai-nilai *spirit* dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa". Dalam hal ini kemampuan untuk percaya pada diri sendiri, kerelaan untuk berkorban dan tanpa pamrih, pantang menyerah, dan perbuatan yang didasari oleh ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam diri seorang pahlawan. Nilai-nilai ini harus didayagunakan, ditanamkan, dan dilestarikan mengingat besarnya negeri dengan penduduk yang beragam.

Nilai-nilai yang terkandung dalam diri pahlawan sangat penting untuk diimplementasikan dalam karakter bangsa Indonesia saat ini. Nilai-nilai kepahlawanan yang dapat menjadi karakter bangsa meliputi nilai keikhlasan, kejujuran, kecintaan terhadap tanah air, nasionalisme, kegigihan, keberanian, dan keuletan. Keberhasilan dalam membangun kembali nilai-nilai kepahlawanan ke dalam karakter masyarakat Indonesia saat ini akan memberi harapan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

2. Tonggak-tonggak Peristiwa Sejarah Perjuangan Bangsa

a. Kebangkitan Nasional

Periode kebangkitan nasional tahun 1908 ditandai dengan munculnya organisasi pertama di Indonesia yakni Budi Utomo. Dalam sejarah pergerakan bangsa Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai

"orang Indonesia". Periode kebangkitan nasional muncul sebagai salah satu dampak politik etis. Politik etis yaitu mendirikan pendidikan rakyat sampai ke desa yang memberikan hak-hak pendidikan pada pribumi dengan tujuan untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yang kerja untuk belajar juga untuk menghambat pendidikan tradisional. Politik etis ini mencakup edukasi, emigrasi dan irigasi. Salah satu trilogi dari politik etis adalah edukasi atau pendidikan yang tujuan awalnya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai rendah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dengan gaji murah.

Dampak yang ditimbulkan oleh politik etis tentunya ada yang negatif dan positif namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tak terlaksana dan mendapat hambatan. Namun satu program yang berdampak positif dengan sifat jangka panjang bagi bangsa Indonesia adalah bidang pendidikan yang akan mendatangkan golongan terpelajar dan terdidik.

Salah satu dampak politik etis bidang edukasi adalah banyak munculnya golongan terpelajar yang pada kesempatan selanjutnya sama-sama membentuk organisasi atau perkumpulan. Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij dan lain-lain. Selain golongan terpelajar muncul juga golongan sosial yang bekerja sesuai dengan bidangnya yang disebut sebagai golongan profesional. Mereka memiliki ruang gerak sosial yang luas sehingga mendapat kesempatan pergaulan yang luas dengan masyarakat dari berbagai suku dan budaya yang berlainan. Hubungan ini pada akhirnya tidak terbatas pada hubungan kerja, keluarga, namun juga menciptakan hubungan sosial yang harmonis, sehingga lambat laun muncul integritas nasional.

Budi Utomo berdiri pada 20 Mei 1908, diketuai oleh Sutomo. Mulai pemerintahan kabinet Hatta (1948-1949) menetapkan Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional. Organisasi Budi Utomo bergerak dalam bidang kebudayaan non politik. Corak baru yang diperkenalkan Budi Utomo adalah kesadaran lokal yang diformulasikan dalam wadah organisasi modern, dalam arti bahwa organisasi itu mempunyai pimpinan, ideologi yang jelas dan anggota. Lahirnya Budi Utomo, telah merangsang berdirinya organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang menyebabkan terjadinya perubahan sosio-politik Indonesia. Budi Utomo bersifat kooperatif dengan pemerintah kolonial, karena BU menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu sehingga wajar jika Budi Utomo berorientasi kultural. Dalam perjalanannya, Budi Utomo dengan fleksibilitasnya itu mulai menggeser orientasinya dari kultur ke politik.

Edukasi barat dianggap penting dan dipakai sebagai jalan untuk menempuh jenjang sosial yang lebih tinggi. Budi Utomo bukan hanya dikenal sebagai salah satu organisasi nasional yang pertama di Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu organisasi terpanjang usianya sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Budi Utomo memang mempunyai arti yang penting meskipun anggotanya sangat sedikit dibanding dengan Sarikat Islam. Akan tetapi kehadiran Budi Utomo-lah yang menyebabkan berlangsungnya perubahan-perubahan politik hingga terjadinya integrasi nasional.

Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh H. Samanhudi muncul pada 1911 di Solo pada awalnya bernama Syarekat Dagang Islam (SDI). Organisasi ini awalnya berdiri untuk menandingi dominasi pedagang Cina. Tahun 1912, organisasi itu segera berkembang pesat menjadi organisasi massa. Para anggotanya meliputi seluruh lapisan masyarakat. Tahun 1916 untuk pertama kalinya Sarekat Islam menyelenggarakan kongres nasionalnya yang pertama di Bandung, dan untuk pertama kalinya pula konsep “nasional” dipakai oleh orang Indonesia untuk suatu wilayah yang meliputi seluruh Indonesia dimana ada anggota Sarekat Islam berasal.

Organisasi selanjutnya adalah *Indische Partij* (IP). Keistimewaan IP adalah usianya yang sangat pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker di Bandung pada 25 Desember 1912. *Indische Partij* (IP) adalah organisasi campuran yang menginginkan kerjasama orang Indo dan Bumiputera. Gerakan *Indische Partij* (IP) sangatlah mengkhawatirkan pemerintah Kolonial Belanda, karena *Indische Partij* (IP) bersifat radikal dalam menuntut kemerdekaan Indonesia. Keadaan itu yang menyebabkan pemerintah bersikap keras terhadap IP. Permohonan IP untuk mendapatkan badan hukum sia-sia belaka dan organisasi ini dinyatakan sebagai partai terlarang sejak 4 Maret 1913. Para pemimpin IP pun ditangkap dan dibuang ke tempat-tempat yang jauh. Usia IP sangat pendek. IP kemudian bubar dan organisasi itu berganti nama menjadi Insulinde.

b. Sumpah Pemuda

Peristiwa penting lain yang menjadi salah satu tonggak kebangkitan nasional adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan wadah perjuangan pemuda Indonesia untuk melahirkan semangat nasionalisme.

Sumpah pemuda, tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama PPPI (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia) yang didirikan pada tahun 1926. PPPI mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan seperti *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong*

Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamienten Bond dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya yaitu persatuan Indonesia. Para pemuda ini menginginkan suatu upaya penyatuan peletakkan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan.

Untuk menindaklanjuti dalam mewujudkan cita-cita perjuangannya, maka diadakan kongres pemuda, yaitu:

1) Kongres Pemuda I

Organisasi-organisasi pemuda dan pelajar yang sudah berazas persatuan bangsa berusaha untuk mempersatukan organisasi-organisasinya dalam suatu gabungan atau fusi. Pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926 di Jakarta dilaksanakan Rapat Besar Pemuda-Pemuda Indonesia (Eerste Indische Jeugd-Congres). Pertemuan ini dalam Sejarah Indonesia dikenal dengan Kongres Pemuda I.

Kongres Pemuda I dihadiri oleh delegasi dari berbagai organisasi atau perkumpulan pemuda di Indonesia seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatra Bond, Jong Batak Bond dan lain-lain. Kongres ini dipimpin oleh Muhammad Tabrani berusaha membentuk perkumpulan pemuda secara tunggal, sebagai badan pusat dengan tujuan:

- a) Memajukan paham persatuan dan kebangsaan; dan
- b) Mempererat hubungan antara organisasi pemuda yang ada.

Meski dalam Kongres Pemuda belum terwujud wadah organisasi yang tunggal namun telah memberi perhatian bagi kebangkitan perasaan nasionalisme dan kebangsaan di antara organisasi pemuda serta sebagai langkah menuju kongres pemuda selanjutnya.

2) Kongres Pemuda II

Sebagai tindak lanjut dari Kongres Pemuda I, pada tanggal 23 April 1927 dilaksanakan pertemuan di antara organisasi kepemudaan yang telah ada, dengan hasil merumuskan beberapa keputusan penting seperti:

- a) Indonesia Merdeka menjadi cita-cita perjuangan seluruh pemuda Indonesia; dan
- b) Organisasi kepemudaan berdaya upaya menuju persatuan dalam satu organisasi.

Pada bulan Juni 1928 terbentuk Panitia Konggres Pemuda II dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua : Sugondo Joyopuspito dari PPPI (Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia)

Wakil Ketua : Joko Marsaid, dari Jong Java

Sekretaris : Muhammad Yamin dari Jong Sumatra Bond

Bendahara : Amir Syarifudin dari Jong Batak Bond

Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober dihadiri oleh perwakilan dari organisasi kepemudaan, unsur partai politik, perwakilan anggota Voklsraad bahkan utusan dari pemerintah Hindia Belanda yaitu Dr. Pijper dan Van der Plas. Suasana cukup tegang karena terdapat dua kepentingan yang saling berlawanan antara para pemuda dengan pihak pemerintah.

Dalam acara itu, W.R. Supratman memperdengarkan lagu *Indonesia Raya*. Berikut adalah lirik asli lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kali ada saat Konggres Pemuda II (diambil dari Wikipedia dalam Panitia Penyusun Naskah Brosur Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 1972, hal 28-34)

INDONESIA RAJA (Lirik asli (1928))	III
I	
<p><i>Indonesia, tanah airkoe,</i> <i>Tanah toempah darahkoe,</i> <i>Disanalah akoe berdiri,</i> <i>Mendjaga Pandoe Iboekoe.</i></p> <p><i>Indonesia kebangsaankoe,</i> <i>Kebangsaan tanah airkoe,</i> <i>Marilah kita berseroe:</i> <i>"Indonesia Bersatoe".</i></p> <p><i>Hidoeplah tanahkoe,</i> <i>Hidoeplah neg'rikoe,</i> <i>Bangsakoe, djiwakoe, semoea,</i> <i>Bangoenlah rajatnja,</i> <i>Bangoenlah badannja,</i> <i>Oentoek Indonesia Raja.</i></p>	<p><i>Indonesia, tanah jang soetji,</i> <i>Bagi kita disini,</i> <i>Disanalah kita berdiri,</i> <i>Mendjaga Iboe sedjati.</i></p> <p><i>Indonesia, tanah berseri,</i> <i>Tanah jang terkoetjintai,</i> <i>Marilah kita berdjandji:</i> <i>"Indonesia Bersatoe"</i></p> <p><i>S'lamatlah rajatnja,</i> <i>S'lamatlah poet'ranja,</i> <i>Poelaoenja, laoetnja, semoea,</i> <i>Madjoelah neg'rinja,</i> <i>Madjoelah Pandoenja,</i> <i>Oentoek Indonesia Raja.</i></p> <p style="text-align: center;">Refrain</p> <p><i>Indones', Indones',</i> <i>Moelia, Moelia,</i> <i>Tanahkoe, neg'rikoe jang</i> <i>koetjinta.</i></p> <p><i>Indones', Indones',</i> <i>Moelia, Moelia,</i> <i>Hidoeplah Indonesia Raja.</i></p>

II	
<i>Indonesia, tanah jang moelia, Tanah kita jang kaja, Disanalah akoe hidoep, Oentoek s'lama-lamanja.</i>	
<i>Indonesia, tanah poesaka, Poesaka kita semoea, Marilah kita mendoa: "Indonesia Bahagia".</i>	
<i>Soeboerlah tanahnja, Soeboerlah djiwanja, Bangsanja, rajatnja, semoeanja, Sedarlah hatinja, Sedarlah boedinja, Oentoek Indonesia Raja.</i>	

Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, Wage Rudolf Soepratman dengan jelas menuliskan "lagu kebangsaan" di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh surat kabar *Sin Po*, sedangkan rekaman pertamanya dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Yo Kim Tjan.

Setelah dikumandangkan tahun 1928 dihadapan para peserta Kongres Pemuda II dengan biola, pemerintah kolonial Hindia Belanda segera melarang penyebutan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Tetapi pada rapat-rapat politik, lagu tersebut tetap dikumandangkan. Bahkan sampai saat ini Indonesia Raya baik dalam 3 stanza maupun 1 stanza dengan lirik yang sudah beberapa kali dilakukan perbaikan menjadi lagu resmi negara Indonesia Raya yang dinyanyikan setiap memperingati hari-hari penting bangsa Indonesia dan hari-hari biasa. Berikut lirik lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh bangsa Indonesia.

“Indonesia Raya 3 Stanza “	
I	
<p><i>Indonesia tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negriku Bangsaku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, Merdeka Tanahku, Negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya</i></p>	
II	
<p><i>Indonesia, tanah yang mulia Tanah kita yang kaya Disanalah aku berdiri Untuk slama-lamanya Indonesia, tanah pusaka P'saka kita semuanya Marilah kita mendoa Indonesia bahagia Suburlah tanahnya Suburlah jiwanya Bangsanya, Rakyatnya, Semuanya Sadarlah hatinya Sadarlah budinya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka, Merdeka Tanahku, Negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya</i></p>	
	III
	<p><i>Indonesia, tanah yang suci Tanah kita yang sakti Di sanalah aku berdiri M'njaga ibu sejati Indonesia, tanah berseri Tanah yang aku sayangi Marilah kita berjanji Indonesia abadi S'lamatlah rakyatnya S'lamatlah putranya Pulaunya, Lautnya, Semuanya Majulah negrinya Majulah pandunya Untuk Indonesia Raya (Ulangan) Indonesia Raya Merdeka, Merdeka Tanahku, Negriku yang kucinta Indonesia Raya Merdeka, merdeka Hiduplah Indonesia Raya</i></p>

Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan "Sumpah Pemuda" adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua (diambil dari wikipedia dalam Naskah Sumpah Pemuda Dimanipulasi? Blog Strategi-Militer tanggal 27 Oktober 2012) yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada "tanah air Indonesia", "bangsa Indonesia", dan "bahasa Indonesia". Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap "perkumpulan kebangsaan Indonesia" dan agar "disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan".

Istilah "Sumpah Pemuda" sendiri tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi tiga keputusan kongres tersebut yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu:

Pertama:

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea:

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga:

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda disahkan di Jakarta pada Kongres Pemuda II di Jakarta, organisasi-organisasi kepemudaan belum mempunyai badan fusi untuk menjadi satu di antara organisasi pemuda yang ada. Namun momen tersebut menjadi suatu terobosan bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam wadah Pergerakan nasional Indonesia.

c. Proklamasi Kemerdekaan

Peristiwa-peristiwa sejarah semenjak berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia memberi semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan. Angkatan Muda Indonesia (AMI) menyelenggarakan kongres pemuda yang dihadiri utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa dari seluruh Jawa. Mereka sependapat untuk bersatu menyiapkan proklamasi. Di dalam kongres tersebut diajukan resolusi persatuan di bawah pimpinan nasional dan mempercepat pelaksanaan kemerdekaan. Sebagian kelompok pemuda tidak puas, antara lain Sukarni, Anwar Cokroaminoto dan Chaerul Saleh karena mereka menganggap kongres itu dibawah pengaruh

Jepang. Di dalam menciptakan proklamasi kemerdekaan kelompok Sukarni menjadi penggabung gerakan pelajar-mahasiswa.

Dalam peristiwa Rengasdengklok perbedaan pendapat terjadi antara golongan tua dan golongan muda terjadi sebelum dan menjelang proklamasi. Golongan muda, menginginkan proklamasi dilaksanakan secara revolusioner. Oleh karenanya, mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok untuk menandatangani Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Memang kelompok Sukarni berhasil mengkoordinasikan kelompok Syahrir dan kelompok pelajar mahasiswa, tetapi Syahrir bersikap apatis terhadap proklamasi karena menganggap gerakan Sukarni menuju ke arah anarkis.

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum yang akhirnya dipilih untuk melaksanakan pembacaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Konsep naskah Proklamasi disusun oleh Achmad Soebardjo, Soekarno dan Moh. Hatta sehari sebelum pelaksanaan. Atas usul Sukarni, naskah tersebut ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia dan diketik oleh Sayuti Melik. Isi naskah Proklamasi setelah mengalami beberapa perubahan tersebut sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang se-singkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen '05

Atas nama bangsa Indonesia,

Soekarno/Hatta

(tanda tangan Soekarno)

(tanda tangan Moh. Hatta)

Sesudah acara pembacaan teks Proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih. Saka Merah Putih yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati Soekarno dengan kain yang seadanya. Dengan dibantu oleh Cudanco Latief Hendraningrat, Suhud menaikkan Sang Saka Merah Putih dengan khitmad mengiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang

dinyanyikan secara spontan oleh para hadirin yang menyaksikan tanpa seorang dirigen yang memimpin. Peristiwa yang terjadi kurang dari satu jam ini berlangsung dengan khitmad namun memberikan suatu perubahan yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa Indonesia.

Berita kemerdekaan bangsa Indonesia segera disebar ke seluruh negeri dan dunia luar. Meskipun masih ada sisa-sisa tentara Jepang yang masih menguasai beberapa wilayah Indonesia, tetapi semangat kemerdekaan tetap disampaikan oleh rakyat Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Beberapa tokoh pemuda yang berjuang melalui media pers antara lain B.M. Diah, Sayuti Melik, dan Sumanang. Proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan kepada rakyat Indonesia melalui pemasangan plakat, poster, maupun coretan pada dinding tembok dan gerbong kereta api. Melalui berbagai cara dan media tersebut, akhirnya berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas di wilayah Indonesia dan di luar negeri.

Kelengkapan-kelengkapan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka tanpa ada kekuasaan asing segera dirapatkan dan diputuskan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pengesahan UUD 1945 dan alat kelembagaan negara yang lainnya disusun. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengambil keputusan, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dikenal sebagai UUD 45. Dengan demikian terbentuklah Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik (NKRI) dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akan dibentuk kemudian.

Setelah itu Soekarno dan Moh. Hatta terpilih atas usul dari Oto Iskandardinata dan persetujuan dari PPKI sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional.

D. Lembar Kegiatan

1. Lembar Kegiatan 2.1.

Buatlah *mind mapping* (peta pikiran) yang menggambarkan makna perjuangan bangsa Indonesia pada masa kebangkitan nasional, sumpah pemuda dan proklamasi kemerdekaan Indonesia!

2. Lembar Kegiatan 2.2.

Berdasarkan gambar pahlawan yang Saudara peroleh (dari aktivitas *make a match*), deskripsikan perjuangan tokoh tersebut dan keteladanan yang dapat anda tiru!

No.	Nama Tokoh	Deskripsi Perjuangan	Keteladanan

E. Refleksi

Refleksi Kegiatan Pembelajaran (KP) bersifat refleksi diri yang dilakukan oleh peserta secara individu, meliputi menjawab beberapa pertanyaan terbuka dan mengisi dua instrumen ketrampilan dan sikap. Jawablah pertanyaan dan isilah pernyataan di bawah ini dengan obyektif, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat Mengerjakan.

1. Pengalaman dan ide baru apa yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini?
2. Bagaimana Saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas?
3. Materi dan hal-hal apa yang belum Saudara pahami dalam kegiatan pembelajaran ini?
4. Bagaimana usaha Saudara dalam mengatasinya?
5. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Keterampilan pada KP 3

Pada kegiatan pembelajaran ini, Saudara telah mempelajari tentang Pahlawan Nasional dengan mengerjakan LK 3.1 dan Tonggak-tonggak Peristiwa Sejarah Perjuangan Bangsa dengan mengerjakan LK 3.2. Setelah mengerjakan LK-LK tersebut, Saudara dapat melakukan penilaian diri untuk mengetahui kemampuan Saudara berada dalam posisi sangat terampil, terampil, cukup terampil atau kurang terampil. Berikut ini rubrik refleksi yang dapat Saudara gunakan. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi kemampuan Saudara.

Kriteria	Tindak Lanjut	Kondisi
Sangat Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan ke bagian penutup.	
Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK akan tetapi masih memerlukan bantuan orang lain, maka Saudara perlu berlatih kembali secara mandiri untuk mengerjakan LK-LK tersebut.	
Cukup Terampil	Apabila Saudara belum terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu berlatih kembali mengembangkan materi dengan berdiskusi dengan sesama peserta.	
Kurang Terampil	Apabila Saudara tidak terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu bantuan fasilitator/NS agar lebih terampil dan membaca kembali materi yang telah tersedia	

6. Mengisi Instrumen refleksi dalam aspek sikap pada KP 3

Setelah Saudara melakukan refleksi diri pada aspek ketrampilan, selanjutnya lakukanlah penilaian diri untuk aspek sikap dengan mengisi instrumen refleksi berikut ini. Sikap yang perlu Saudara refleksi meliputi sikap religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong royong. Berilah tanda centang (✓) pada setiap nomor sesuai dengan kondisi Saudara.

Modul Pelatihan Penguatan Wawasan Kebangsaan

No	Pernyataan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Saya memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa			
2.	Saya selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran			
3.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya			
4.	Saya mendukung peraturan yang telah disepakati bersama			
5.	Saya selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tuntas			
6.	Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu			
7.	Saya selalu berusaha mengembangkan ilmu yang telah diberikan			
8.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus diawasi dan sesuai dengan petunjuk			
9.	Saya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar			
10.	Saya siap bekerjasama dengan rekan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran			
Jumlah skor				

Pedoman Penskoran Hasil Refleksi Aspek Sikap

Bila Saudara menjawab:

- ✓ “Ya”, maka skor = 3
- ✓ “Kadang-kadang”, maka skor = 2
- ✓ “Tidak Pernah”, maka skor = 1

Konversi jumlah skor menjadi nilai:

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor perolehan}}{30} \times 100$$

Nilai	Kriteria
>90 - 100	Amat Baik
>80 - 90	Baik
>70 - 80	Cukup
>60 - 70	Sedang
≤60	Kurang

F. Daftar Pustaka

- Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. 1983. *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud.
- Soedarmanta, J.B. 2007. *Jejak-jejak Pahlawan; Perikat Kesatuan Bangsa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tim Puspa Swara. 2013. *Pahlawan Indonesia; Album Biografi Terlengkap & Terkini*. Jakarta: Puspa Swara.
- Keppres RI No. 115/TK/Tahun 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 72/HUK/2003 tentang pedoman forum komunikasi keluarga pahlawan perintis kemerdekaan dan pejuang
- UU RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
- <http://web.archive.org/web/20111228151821/http://database.depsos.go.id/modules.php?name=Pahlawan>, online. Diakses pada 12 Maret 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Raya#cite_ref-pp28-30_2-0, online. Diakses pada 12 Maret 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda#cite_note-1, online. Diakses pada 12 Maret 2019.

Kegiatan Pembelajaran 3

PANCASILA IDEOLOGIKU

A. Kompetensi

1. Memahami makna simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila
2. Menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
3. Menganalisis Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi bangsa.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Memahami makna simbol-simbol dalam Lambang Garuda Pancasila
2. Memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam Lambang Garuda Pancasila
3. Menemukan contoh penerapan sila Ketuhanan yang Maha Esa
4. Menemukan contoh penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab
5. Menemukan contoh penerapan sila persatuan Indonesia
6. Menemukan contoh penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
7. Menemukan contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
8. Menganalisis Pancasila sebagai dasar negara
9. Menganalisis Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
10. Mennganalisis Pancasila sebagai ideologi bangsa

C. Materi

1. Makna lambang Garuda Pancasila dan Sila-sila Pancasila

Sebelum kita belajar memahami makna simbol garuda pancasila, tidak ada salahnya, kita mengingat kembali tentang sejarah perumus Pancasila, serta sejarah pembuatan simbol Garuda Pancasila.

a. Sejarah Perumusan Pancasila

Secara historis, Pancasila lahir dari hasil sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan /BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945). Pada saat itu, Ketua BPUPKI, Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat

mengusulkan pembahasan rumusan dasar negara Indonesia. Gagasan tersebut mendapatkan sambutan yang luar biasa dari para anggota BPUPKI. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Mr. Muhammad Yamin, Prof. Soepomo dan Ir. Soekarno. Mereka mengemukakan idenya tentang dasar negara yang bisa dijadikan sebagai panduan Indonesia merdeka yang nilai-nilainya berdasarkan budaya bangsa.

Selanjutnya, pada 22 Juni 1945, BPUPK memberikan mandat kepada Panitia Sembilan untuk merumuskan berbagai usulan dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para tokoh pergerakan nasional, dan pada akhirnya Panitia Sembilan berhasil menyusun Piagam Jakarta yang di dalamnya termuat rumusan Pancasila, sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sidang kedua BPUPK (10-17 Juli 1945), rumusan dan sistematika Pancasila yang telah tercantum dalam Piagam Jakarta diterima. Pada saat yang bersamaan, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia yang diakibatkan oleh kekalahan Jepang terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Situasi ini dimanfaatkan untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta membacakan teks Proklamasi di Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta.

Sehari setelah Proklamasi terjadi peristiwa penting. Berdasar musyawarah dan kebesaran hati tokoh-tokoh nasional. Demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk. Mereka mufakat menghilangkan "7 kata" dalam sila pertama Pancasila "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Sehingga berubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Masih di tanggal yang sama, 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang dengan agenda pengesahaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana dalam pembukaannya tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Sejarah Perancangan Lambang Negara Garuda Pancasila

Pada tanggal 13 Juli 1945, dalam rapat Panitia Perancang Undang-undang Dasar 1945, salah satu anggota Panitia bernama Parada Harahap mengusulkan tentang lambang negara. Usul tersebut disetujui oleh semua anggota, dan disepakati akan dibahas tersendiri kemudian, dalam bentuk Undang-undang istimewa yang mengatur secara khusus tentang lambang negara (Turiman, 2014: 123). Setelah proklamasi, dibentuklah Panitia Indonesia Raya (diketuai Ki Hajar Dewantoro dan sekretaris umum Mohammad Yamin). Panitia tersebut bertugas untuk menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kajian tentang perancangan lambang negara.

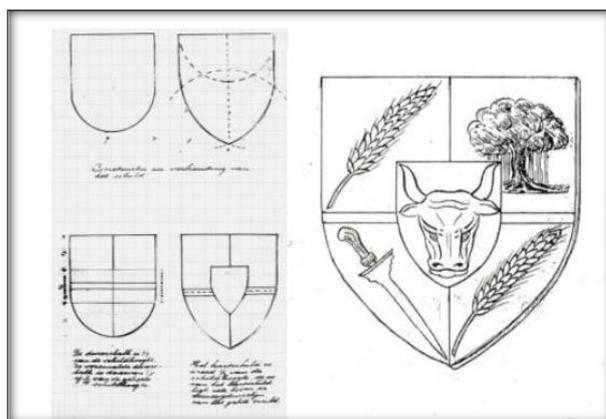
Sultan Hamid Alkadrie II, selaku Menteri Negara Zonder Portofolio, ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Berdasarkan sidang kabinet RIS, 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Sultan Hamid II. Dibantu panitia teknis Mohammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Pellaupessy, Mohammad Natsir, dan R.M. Ngabehi Poerbatjaraka yang terkenal sebagai seorang ahli sejarah Jawa Kuno. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Hamid dianggap mampu untuk merancang lambang negara oleh Soekarno karena pernah kuliah di Teknik Sipil *Techniek Hogeschool* (Sekolah Tinggi Teknik) Bandung, yang saat ini dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung.

Selain itu, dalam sidang kabinet disetujui adanya sayembara lambang negara yang dilaksanakan oleh menteri Priyono (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1950-1966). Dari berbagai rancangan yang masuk, terdapat dua (2) gambar rancangan lambang negara yang terbaik yaitu dari Sultan Hamid II dan Mohammad Yamin. Melalui beberapa pertimbangan, akhirnya hasil rancangan Sultan Hamid II lah yang diterima oleh pemerintah karena rancangan dari Muhammad Yamin ada sinar-sinar matahari dan menampakan sedikit banyak terdapat pengaruh Jepang (Turiman, 2014:126).

c. Rancangan Garuda Pancasila

Secara pribadi, Sultan Hamid II mempersiapkan rancangan lambang negara dengan bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai

Pancasila. Ide “Perisai Pancasila” itu muncul saat Sultan Hamid II teringat ucapan Presiden Soekarno, hendaknya lambang negara tersebut melambangkan pandangan hidup bangsa, dasar negara Indonesia/ ide Pancasila.



Gambar 1. Perisai Rancangan Sultan Hamid II

Sumber: Puput Virdianti, e-Journal Pendidikan Sejarah

Berdasarkan masukan dari Ki Hajar Dewantara yang terinspirasi dari figur garuda yang ada dalam candi-candi di Pulau Jawa yang dibandingkan dengan Lambang Kerajaan Sintang, Kalimantan Barat, Sultan Hamid II mempersiapkan rancangan lambang negara dalam bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila. Kemudian, Sultan Hamid II mendiskusikannya dengan Ir. Soekarno dan Moh. Hatta untuk menyempurnakan rancangan itu. Perubahan yang dilakukan antara lain mengganti pita merah putih menjadi pita berwarna putih dengan tambahan seloka “Bhinneka Tunggal Ika”.

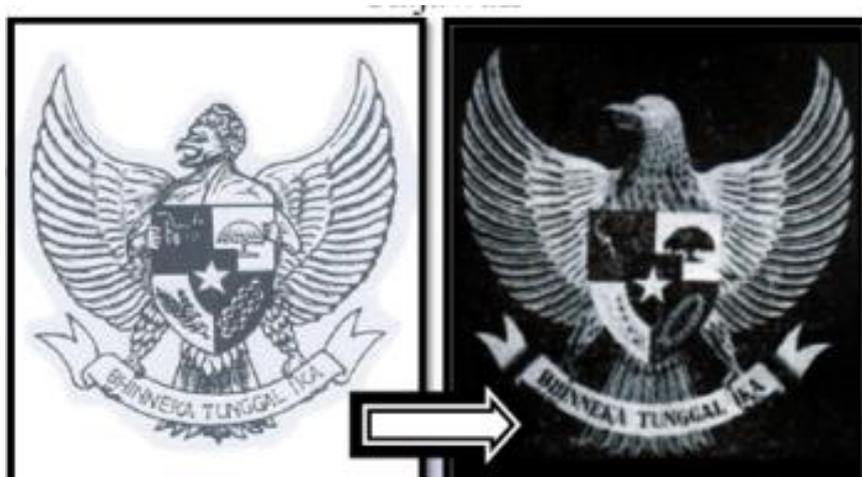
Pada tanggal 8 Februari 1950, rancangan final lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan akhir lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi yang diwakili oleh Mohammad Natsir untuk dipertimbangkan, karena adanya keberatan terhadap gambar burung garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap bersifat mitologi dan feodal. Poerbatjaraka pun keberatan pada bulu ekor yang berjumlah tujuh helai, yang akhirnya berdasarkan usulan Palupessi, bulu ekor dijadikan delapan, sebagai tanda bulan kemerdekaan Indonesia (Turiman, 2014: 129).



Gambar 2. Garuda Dengan Bahu dan Tangan Manusia

Sumber: Puput Virdianti, e-Journal Pendidikan Sejarah

Setelah mendapat masukan dari Mohammad Natsir, kemudian Sultan Hamid II melakukan perbandingan dengan negara-negara lain di dunia yang menggunakan figur burung elang Rajawali. Akhirnya Sultan Hamid II melakukan penyempurnaan yaitu dari figur pertama adalah figur burung Garuda dalam mitologi bangsa Indonesia, menjadi figur burung elang Rajawali yang berukuran jauh lebih besar dari kebanyakan lambang negara lain dengan tujuan agar bangsa Indonesia menjadi negara yang besar dan setara dengan negara-negara di dunia. Sultan Hamid II kemudian menamakan Lambang Negara Indonesia tersebut dengan Burung Elang Rajawali Garuda Pancasila.



Gambar 3. Perubahan bentuk Garuda menjadi Garuda Pancasila

Sumber: Puput Virdianti, e-Journal Pendidikan Sejarah

Pada tanggal 10 Februari 1950, Sultan Hamid II mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan berbagai masukan dari anggota Panitia Lencana Negara. Perbaikan dilakukan kembali, antara lain bentuk kepala dan digantungkannya perisai Pancasila di leher Elang Rajawali Garuda Pancasila.

Rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II diresmikan dalam sidang kabinet RIS yang dipimpin PM RIS Mohammad Hatta pada 11 Februari 1950 di gedung Penjabon atau gedung parlemen RIS. Empat hari berselang, tepatnya 15 Februari 1950, Presiden Sukarno memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara karya Sultan Hamid II kepada khalayak umum di Hotel Des Indes (sekarang Duta Merlin) Jakarta.

Tanggal 17 Februari 1950 lambang negara disahkan oleh Dewan Menteri RIS dalam berita Parlemen RIS Nomor 2 dan pada tanggal 20 Februari 1950, lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II sudah terpasang didalam ruang sidang Parlemen RIS (sekarang Gedung Pancasila) Jakarta yang dibuka oleh Presiden Soekarno (Turiman, 2014: 138).

d. Penyempurnaan Lambang Negara

Pada akhir Februari 1950 Sultan Hamid mendapat saran dari Soekarno untuk menyempurnakan kembali pada bagian bentuk kepala burung Rajawali Garuda Pancasila yang terkesan “gundul” karena dirasa mirip elang bondol pada lambang negara Amerika Serikat. Selanjutnya pada awal Maret 1950 Sultan Hamid II mengajukan lukisan lambang negara yang sudah diperbaiki khususnya pada bagian kepala Rajawali Garuda Pancasila menjadi “berjambul”.

Gambar tersebut ternyata masih mendapat masukan dari Presiden Soekarno, yaitu pada bagian bentuk cakar kaki yang mencengkram pita yang terlihat menghadap ke belakang terkesan terbalik. Hamid juga berkonsultasi lagi dengan Dirk Ruhl, seorang Warga Negara Jerman yang sejak usia 16 tahun sudah tinggal di Indonesia. Ruhl menggambar ulang sketsa garuda dan menyempurnakan merubah bentuk cakar kaki sehingga menghadap ke depan, dan bagian lain sudah sama seperti gambar lambang negara sekarang ini atas permintaan Hamid.

Pada 20 Maret 1950, bentuk final lambang negara rancangan Menteri Negara RIS Zonder Forto Polio, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno dan mendapat disposisi persetujuan presiden. Dullah sang pelukis Istana kepercayaan Soekarno melukis empat kali hasil rancangan Lambang Negara dari Sultan Hamid II, dan terakhir melukis

kembali rancangan yang sesuai dengan bentuk akhir rancangan Sultan Hamid II.

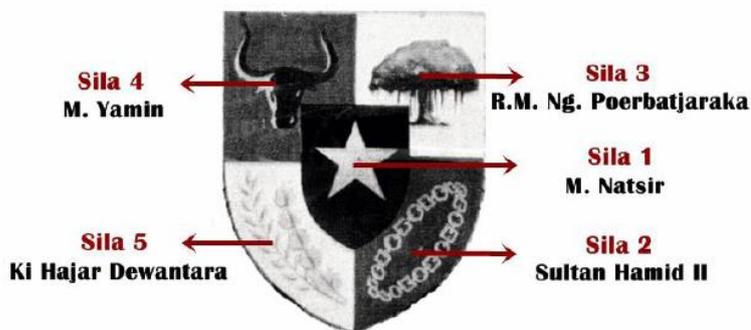


Gambar 4. Perubahan lambang negara Garuda Pancasila

Sumber: <https://news.okezone.com>

e. Usulan simbol-simbol dalam setiap sila Pancasila

Penyusunan simbol dari setiap sila Pancasila yang akan dipresentasikan dalam perisai Pancasila, setiap anggota Panitia Lambang Negara mencoba mengajukan berbagai usulan. Visualisasi ini mampu dipresentasikan dalam bentuk Perisai Pancasila yang dikenal seperti sekarang ini. Adapun visualisasi simbol sila-sila Pancasila yang dikemukakan oleh beberapa anggota Panitia Lambang Negara dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 5. Perisai Garuda Pancasila

Sumber: Puput Viridianti, e-Journal Pendidikan Sejarah

f. Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara yuridis formal, lambang negara Garuda Pancasila telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 36A yang menyebutkan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Secara lebih rinci, tercatat pula dalam sejarah bahwa Presiden Soekarno memerintahkan Sultan Hamid II selaku koordinator Panitia Lambang Negara untuk membuat skala ukuran dan tata warna pada lambang negara tersebut, agar ada kebakuan skala ukuran dan ketentuan warna sehingga ada keseragaman yang bersifat resmi. Skala ukuran ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 yang secara resmi ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1951 oleh Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjoyo. Sejak saat itu, lambang negara diresmikan pemakaiannya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui menteri penerangan, gambar lambang negara ini disebar-luaskan ke seluruh pelosok tanah air.

Tanggal 28 November 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang negara akhirnya diundangkan oleh Menteri Kehakiman M. Nasroen. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 sebagai dasar peraturan dan tata perundang-undangan dapat dilihat pada Lembaran Negara Nomor 111 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 176 Tahun 1951. Sejak saat itu secara yuridis formal gambar lambang negara rancangan Sultan Hamid II seperti terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 secara resmi menjadi lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tanggal 26 Juni 1958 Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Perdana Menteri Juanda menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang penggunaan lambang negara diundangkan oleh menteri Kehakiman G.A. Maengkom pada Lembaran Negara No 71 Tahun 1958 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No 1636 Tahun 1958.

Selanjutnya, diterbitkanlah Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan

bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan-ketentuan pidananya.

Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini diantaranya adalah untuk: (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Berikut ini beberapa pasal dalam UU No 24 Tahun 2009 yang khusus membahas tentang lambang negara:

- 1) Pasal 46: Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.
- 2) Pasal 47: (1) Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan tenaga pembangunan. (2) Garuda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19 dan leher berbulu 45.
- 3) Pasal 48: (1) Di tengah-tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa. (2) Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar pancasila sebagai berikut:
 - a) Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya dibagian tengah berbentuk bintang yang bersudut lima;
 - b) Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dibagian kiri bawah perisai;
 - c) Dasar persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin dibagian kiri atas perisai
 - d) Dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai;
 - e) Dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi dibagian kanan bawah perisai.
- 4) Pasal 49: Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri atas: Warna merah dibagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Warna putih dibagian kiri atas dan kanan bawah perisai. Warna emas untuk

keseluruhan warna burung Garuda. Warna hitam ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung. Dan warna alam untuk seluruh gambar lambang.

g. Makna Lambang Garuda Pancasila



Gambar 6. Garuda Pancasila

Lambang Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Burung Garuda, Perisai, dan Pita Putih. Burung Garuda, menengok dengan kepalanya lurus ke kanan menggambarkan kebaikan (tujuan baik) sebagai cita-cita sekaligus kondisi yang hendak diciptakan oleh negara Indonesia. Dalam konsep budaya Indonesia, kanan berarti baik.

Seluruh burung Garuda berwarna emas melambangkan warna kemegahan emas yang dimaksudkan adalah kebesaran bangsa Indonesia atau keluhuran Negara. Makna burung Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar adalah lambang tenaga pembangunan seperti yang dikenal pada peradaban Indonesia.

Kaki mencengkeram seloka (pita putih) "Bhinneka Tunggal Ika", melambangkan betapa teguhnya negara kita dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, yang hidup menggambarkan kesatuan dalam perbedaan (yang berbeda-beda itu pada dasarnya adalah satu);

Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri dikutip dari buku Sutasoma yang dikarang oleh seorang pujangga di abad ke-14 dari Kerajaan Majapahit, Mpu antular. Kata tersebut memiliki makna sebagai persatuan dan kesatuan Nusa dan Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, ras, suku, bangsa, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Perisai Pancasila yang dikalungkan pada leher lambang negara, melambangkan bahwa hidup dan matinya Garuda Pancasila (Negara Kesatuan

Republik Indonesia) tergantung pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia;

Makna sayap Garuda berbulu 17, ekornya berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45 menunjukkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17, bulan 8 (Agustus) dan tahun 1945.

Perisai atau tameng berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda, dikenal oleh kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai senjata dalam perjuangan mencapai tujuan dengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang sedemikian dijadikan lambang, wujud, dan artinya tetap tidak berubah-ubah, yaitu lambang perjuangan dan perlindungan. Dengan mengambil bentuk perisai itu, maka Republik Indonesia berhubungan langsung dengan peradaban Indonesia asli.

Garis tebal warna hitam di tengah perisai melukiskan katulistiwa. Ini melambangkan bahwa NKRI satu-satunya Negara asli yang merdeka, berdaulat, dipermukaan bumi berhawa panas; garis katulistiwa yang melewati Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian ini melambangkan bahwa Republik Indonesia satu-satunya Negara asli yang merdeka, berdaulat, terletak di katulistiwa di permukaan bumi.

Di perisai yang terdapat pada Burung Garuda, mengandung lima buah simbol yang masing-masing melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila. Perisai yang dikalungkan tersebut melambangkan pertahanan Indonesia. Pada bagian tengah dari perisai tersebut terdapat simbol bintang yang memiliki lima sudut. Bintang tersebut melambangkan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut dianggap sebagai sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia.

Makna lima simbol yang berada di dalam ruangan perisai yaitu bintang bersudut lima, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas adalah:

- 1) Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa terlukis dengan Nur Cahaya di ruangan tengah berbentuk bintang bersudut lima.
- 2) Dasar peri Kemanusiaan dilukiskan dengan tali rantai bermata bulatan dan pesagi melambangkan laki-laki dan perempuan
- 3) Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon beringin, tempat berlindung
- 4) Dasar Kerakyatan dilukiskan dengan kepala banteng sebagai lambing tenaga rakyat
- 5) Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan kapas dan padi sebagai tanda tujuan kemakmuran.

Makna Lambang Negara Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang terdiri dari pelbagai macam suku, ras, budaya, adat, bahasa dan agama. Apabila seluruh masyarakat Indonesia bisa memahami filosofi lambang negara tersebut dengan baik, maka keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga. Dengan Dasar Negara yang kuat, Indonesia akan menjadi negara besar, maju, dan rakyatnya sejahtera.

Tabel 1. Makna Simbol Sila-sila Pancasila.

Simbol	Makna
	<p>Bintang Bersudut Lima</p> <ul style="list-style-type: none">• Bintang merupakan simbol dari sila pertama.• Bintang emas dengan perisai hitam ini melambangkan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.• Bintang emas ini diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia.• Sedangkan latar belakang berwarna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada.
	<p>Rantai Emas</p> <ul style="list-style-type: none">• Rantai merupakan simbol dari sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.• Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu.• Rantai yang terdapat pada sila kedua ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait membentuk lingkaran.• Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan lingkaran melambangkan perempuan.• Kandungan Nilai moral : sesama manusia harus saling membantu satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai.

Simbol	Makna
	<p>Pohon beringin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. • pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut dikorelasikan sebagai Negara Indonesia, dimana semua rakyat Indonesia dapat “berteduh” di bawah naungan Negara Indonesia • Pohon beringin ini memiliki memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. • Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia.
	<p>Kepala Banteng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Banteng merupakan simbol dari sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. • Kepala Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya orang-orang musyawarah, berdiskusi, berkumpul untuk melahirkan suatu keputusan.
	<p>Padi dan kapas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Padi kapas ini merupakan simbol sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. • Kapas dan padi dianggap dapat mewakili sila kelima, karena padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran. Hal itu sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima ini.

Sumber: www.bin.go.id

2. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam mengatur, menjalankan dan menyelenggarakan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan panduan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah sepatutnya menjadi pijakan dalam membangun masyarakat adil dan makmur. Eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara sangat tergantung pada komitmen dan kecerdasan para pendukungnya. Upaya menjabarkan dan merealisasikan nilai-nilai yang ada pada setiap sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sudah seyogyanya dilakukan (Haryono, 2014: 202).

Pancasila memiliki karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain, karena diambil dari adat istiadat dan tradisi mulia yang telah melekat dalam kehidupan bangsa. Setiap sila-sila dalam Pancasila yang merupakan *local genius*, yang telah disepakati merupakan pengejawantahan sikap-perilaku masyarakat di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 1 sampai dengan sila 5 dari Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda tetapi tidak saling bertolak belakang, akan tetapi saling melengkapi. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh dan bulat, tidak dapat dipisahkan. Kaelan (2012: 31-36) menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila sebagai berikut :

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki nilai yang meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan rasa toleransi sesama umat beragama
- Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain
- Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai sila ketiga dan sila-sila berikutnya. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama.

Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

- Mengembangkan sikap tenggang rasa
- Tidak melakukan perbuatan yang semena-mena terhadap orang lain
- Bersedia membantu orang lain yang mendapat masalah

3) Persatuan Indonesia

Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu wadah bersama semua suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Perbedaan merupakan ciri khas elemen-elemen pembentuk negara. Konsekuensinya negara yang beraneka ragam tetap satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang disemboyankan dengan *Bhinneka Tunggal Ika*. Perbedaan bukannya untuk diperuncing menjadi sebuah konflik, tetapi untuk mewujudkan persatuan dalam kehidupan bersama, guna mewujudkan tujuan sebagai bangsa.

Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

- Cinta tanah air dan bangsa
- Bangga sebagai bangsa Indonesia
- Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikatnya negara merupakan sebuah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai tersebut bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah:

- Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
- Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
- Menjalankan hasil musyawarah dengan penuh rasa tanggungjawab

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai kelima ini terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

- Menghormati hak-hak orang lain
- Suka bekerja keras
- Bersikap adil

3. Pancasila sebagai Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, dan Ideologi Bangsa

a. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Dasar negara merupakan serangkaian nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang memuat gagasan, cita

negara dan cita hukum yang menjadikannya sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal konstitusi.

Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada tinjauan historis yang melatarbelakangi kelahirannya. Nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh para tokoh BPUPKI merupakan jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan oleh ketua BPUPKI, yaitu Dr. Radjiman Wedyodiningrat. *“Negara yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?”* (Mohammad Anas.dkk. 2017: 135).

Walaupun pada awalnya terdapat dua golongan yang berbeda pendapat tentang dasar negara Indonesia (golongan Islam menghendaki dasar negara diambil digali dari nilai-nilai ajaran agama Islam, sedangkan golongan kebangsaan menghendaki dasar negara digali dari nilai-nilai budaya bangsa), akan tetapi akhirnya diputuskan bersama bahwa Pancasila lah yang paling sesuai sebagai dasar negara.

Dalam tinjauan teoritis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berasal dari realitas Pancasila yang telah menjadi “jiwa bangsa” dan diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi cita hukum nasional. Sebagai dasar negara, pancasila merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis (Oetojo Oesman & Alfian, 1992: 7). Dalam UU Nomor 12 tahun 2011 Pasal 2 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum (Pusat MPK UB, 2017: 142).

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung konsekuensi bahwa segala hukum yang berlaku bersumber dari Pancasila. Setiap hukum yang berlaku harus berdasar pada Pancasila, yang memuat nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang mempersatukan Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan nilai-nilai keadilan sosial. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara memiliki sifat memaksa bagi seluruh warga Indonesia (Haryono, 2014: 154).

Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia termuat dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pengertian kata "...dengan berdasar kepada...", memiliki makna yuridis bahwa Pancasila adalah dasar negara., walaupun tidak mencantumkan kata "Pancasila" (Kaelan, 2015: 52).

Pancasila merupakan dasar negara yang paling tepat karena :

- 1) Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi *common denominator* atau *de grootste gemene deeler* dan *de kleinste genee veelvoud* dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai Pancasila telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa disadarinya
- 2) Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Masyarakat di Indonesia sangat majemuk dan Pancasila mampu mengikat unsur kemajemukan bangsa menjadi negara kesatuan
- 3) Pancasila menjamin kebebasan warganegara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya
- 4) Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5) Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 6) Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa
- 7) Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera

b. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Pandangan hidup merupakan suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.

Pancasila digali dari warisan budaya nenek moyang yang telah diperkaya dengan warisan budaya dunia. *Causa materialis* dari Pancasila

adalah nilai-nilai budaya dan kehidupan masyarakat Nusantara (Notonegoro dalam Hariyono, 2014: 150).

Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pandangan hidup ialah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan, yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur merupakan tolak ukur kebaikan yang berkaitan dengan sifat yang mendasar dan abadi dalam kehidupan manusia.

Pandangan hidup adalah konsep atau cara pandang manusia yang bersifat mendasar tentang diri dan dirinya. Pandangan hidup dapat juga berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah berdasarkan waktu dan lingkungan hidupnya.

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh, kuat dan sentausa perlu mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalannya.

Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan berbagai macam permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam masa yang semakin maju dan berkembang. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya.

Dalam pandangan hidup ini terkandung :

- 1) konsep mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.
- 2) pemikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.
- 3) suatu kristalisasi dari suatu nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Manfaat pancasila sebagai pandangan hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Menjadikan bangsa Indonesia berdiri kokoh sebagai bangsa merdeka dan berdaulat.
- 2) Menjadi pedoman pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Sebagai pedoman membangun dirinya sendiri dan hubungan dengan bangsa lain.

- 4) Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya
- 5) Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika harus diejawantahkan sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan demikian keberagaman yang ada dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tidak mati.

Pada hakikatnya Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai kepribadian bangsa serta sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia yang diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi dan mendasar dari norma bangsa. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang cukup panjang. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah dari bangsa Indonesia sendiri.

Pandangan hidup yang tertuang pada nilai Pancasila yang menjadi keyakinan bangsa Indonesia terutama adalah:

- 1) Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta Semesta, pengayom alam semesta. Kepada-Nya manusia menaruh kepercayaan dan harapan bagi hidup di dunia dan sesudah mati. Inilah asas kehidupan ketuhanan dan keagamaan
- 2) Asas kekeluargaan, cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, ayah, ibu, anak-anak. Cinta dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat, kesatuan dan kerukunan.
- 3) Asas musyawarah mufakat: kebersamaan adalah kumpulan banyak pribadi, keluarga, dan warga. Keinginan dan kemampuan warga masyarakat berbeda-beda. Supaya mereka tetap rukun bersatu, keputusan ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat.
- 4) Asas gotong royong: kebersamaan memikul beban tanggung jawab demi kepentingan bersama. Keputusan yang ditetapkan atas asas musyawarah mufakat untuk kebersamaan adalah tanggung jawab bersama. Jadi dilaksanakan bersama, secara gotong royong oleh dan untuk kedudukan bersama.
- 5) Asas tenggang rasa atau *tepo seliro* : saling menghayati keadaan dan perasaan antar warga, antar pribadi, asas saling menghargai dan menghormati dalam keragaman dan perbedaan. Saling menghormati

hak, pendapat, keyakinan dan agama masing-masing demi terpeliharanya kesatuan dan keharmonisan hidup bersama.

Asas mendasar ini merupakan sifat utama masyarakat kita sepanjang sejarah. Tata kehidupan berdasarkan asas-asas demikian membudaya dan merupakan watak masyarakat Indonesia, karena itu pula nilai-nilai ini dianggap sebagai kepribadian bangsa.

c. Pancasila sebagai ideologi bangsa

Ideologi Pancasila menunjukkan keseluruhan gagasan yang bersumber pada prinsip pemikiran pancasila sebagai pedoman yuridis konstitusional untuk mewujudkan cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pentingnya ideologi ini bagi rakyat Indonesia, yaitu:

- 1) menjadi sumber inspirasi yang memotivasi perjuangan untuk memberdayakan potensi nasional.
- 2) menjadi landasan kesadaran harga diri dan martabat nasional,
- 3) sebagai pedoman hidup kenegaraan dan kemasyarakatan yaitu membimbing gerak dinamika bangsa dan negara dalam melaksanakan fungsi kenegaraan dan kemasyarakatan,
- 4) menjadi kriteria normatif tentang kesetiaan warga negara atas cita-cita nasional bangsanya sehingga dapat menjadi ukuran kepemimpinan nasional dan kehidupan warga negara pada umumnya.

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi negara bersifat mengikat (*imperatif*), semua rakyat Indonesia tanpa kecuali harus taat kepada Pancasila. Para pemegang kekuasaan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, (mengikat ke dalam). Demikian pula, lembaga-lembaga sosial, politik mulai dari tingkat pusat sampai daerah dalam menyusun anggaran dasarnya juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, (mengikat ke luar). Tuntutan ini merupakan konsekuensi, karena Pancasila sebagai akumulasi nilai-nilai sosio-budaya bangsa Indonesia yang bersifat majemuk (*pluralistik*), setiap individu memiliki kepentingan sendiri-sendiri untuk diwujudkan sesuai dengan cita-citanya. Secara umum masyarakat- bangsa Indonesia mengharapkan adanya suatu kehidupan yang adil dan sejahtera dalam suasana tertib, aman, tenteram, dan damai.

Secara hakiki nilai Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini diinginkan dan dipilih untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, akan tetapi sifatnya obyektif (mengikat) dan subyektif tergantung nurani manusianya.

Sebagai bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa eksistensi kita bukanlah secara kebetulan karena bagi Dzat Yang Maha Tinggi – Tuhan Yang Maha Kuasa tidak ada konsep kebetulan. Untuk itu, bila kita tidak menjunjung tinggi tumpah darah kita termasuk dasar negaranya, maka dapat diartikan bahwa kita telah mengingkari kesepakatan kita sebagai bangsa Indonesia.

D. Lembar Kegiatan

1. Lakukan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh sehingga membuat Saudara mencapai kompetensi yang diharapkan dengan penuh tanggung jawab dan menyenangkan.
2. Kerjakan LK yang sudah disediakan bersama kelompok dengan penuh semangat gotong-royong dan integritas yang tinggi.
3. Sebelum mengerjakan LK bersama kelompok, bacalah dengan seksama terlebih dahulu kompetensi dan indikator yang harus dicapai.
4. Berkomunikasilah secara santun dan saling menghargai pendapat dalam kelompok sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik
5. Selanjutnya bacalah uraian materi yang telah tersedia dan silahkan diperkaya dengan membaca referensi lain yang relevan.

LK 3.1. Bermain Puzzle Garuda Pancasila

Petunjuk Pengerjaan.

- a. Fasilitator memberikan pengantar materi.
- b. Peserta dibagi ke dalam lima kelompok.
- c. Kelompok memasang puzzle Garuda Pancasila yang telah disediakan fasilitator.
- d. Kelompok menunjukkan puzzle yang sudah terpasang
- e. Kelompok berdiskusi tentang makna simbol Garuda Pancasila, dengan menjawab pertanyaan yang disediakan.
- f. Kelompok menuliskan hasil diskusi ke dalam kertas plano
- g. Kelompok mempresentasikan hasil diskusi, kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan
- h. Fasilitator memberikan penguatan

Pertanyaan.

1. Apa makna burung Garuda menoleh ke kanan?
2. Apa makna warna emas pada seluruh burung garuda?
3. Apa makna kaki burung garuda mencengkeram seloka Bhinneka Tunggal Ika?
4. Apa makna jumlah bulu pada sayap, ekor, pangkal ekor, dan leher?
5. Apa makna garis tebal hitam di tengah perisai?
6. Apa makna bintang?
7. Apa makna rantai emas?
8. Apa makna pohon beringin?
9. Apa makna kepala banteng?
10. Apa makna padi dan kapas?

LK 3.2. Penerapan Nilai-nilai Pancasila

Petunjuk Pengerjaan.

- a. Fasilitator memberikan pengantar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- b. Fasilitator menunjukkan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kearifan lokal masyarakat
- c. Kelompok berdiskusi dalam menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (dari koran/ media online)
- d. Kelompok berdiskusi dalam menemukan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kearifan lokal masyarakat
- e. Kelompok menyajikan hasil pekerjaan ke dalam kertas plano
- f. Dengan arahan fasilitator, kelompok memajang hasil pekerjaannya ke dinding.
- g. Window shopping (1 orang tinggal untuk menjelaskan potongan berita-berita, sementara anggota yang lain berkunjung ke kelompok-kelompok)
- h. Masing-masing peserta (kecuali yang tinggal) memberikan tanda bintangnya kepada kelompok yang dianggap baik dalam menampilkan dan menjelaskan hasil pekerjaannya.
- i. Kelompok yang usai berkunjung, maka mempresentasikan hasil kunjungan dengan memberi tanggapan ke kelompok lain yang dikunjungi
- j. Fasilitator memberikan penguatan.

LK 3.3. Membuat Karya bertema Pancasila

Petunjuk Pengerjaan.

- Bersama kelompok, peserta membuat karya (puisi, lagu, drama, poster, kartun, dan lain sebagainya) tentang komitmen Pancasila sebagai ideologiku.
- Kelompok mendemonstrasikan hasil pekerjaan, kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan
- Fasilitator memberikan penguatan

E. Refleksi

Refleksi Kegiatan Pembelajaran (KP) bersifat refleksi diri yang dilakukan oleh peserta secara individu, meliputi menjawab beberapa pertanyaan terbuka dan mengisi dua instrumen ketrampilan dan sikap. Jawablah pertanyaan dan isilah pernyataan di bawah ini dengan obyektif, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat Mengerjakan.

- Pengalaman dan ide baru apa yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini?
- Bagaimana Saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas?
- Materi dan hal-hal apa yang belum Saudara pahami dalam kegiatan pembelajaran ini?
- Bagaimana usaha Saudara dalam mengatasinya?
- Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Keterampilan pada KP 2

Berikut ini rubrik refleksi yang dapat Saudara gunakan ketika melakukan refleksi. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi kemampuan Saudara.

Kriteria	Tindak Lanjut	Kondisi
Sangat Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan ke bagian penutup.	
Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK akan tetapi masih memerlukan bantuan orang lain, maka Saudara perlu berlatih kembali	

	secara mandiri untuk mengerjakan LK-LK tersebut.	
Cukup Terampil	Apabila Saudara belum terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu berlatih kembali mengembangkan materi dengan berdiskusi dengan sesama peserta.	
Kurang Terampil	Apabila Saudara tidak terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu bantuan fasilitator/NS agar lebih terampil dan membaca kembali materi yang telah tersedia	

6. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Sikap pada KP 3

Setelah Saudara melakukan refleksi diri pada aspek keterampilan, selanjutnya lakukanlah penilaian diri untuk aspek sikap dengan mengisi instrumen refleksi berikut ini. Sikap yang perlu Saudara refleksi meliputi sikap religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong royong. Berilah tanda centang (✓) pada setiap nomor sesuai dengan kondisi Saudara.

No	Pernyataan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Saya memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa			
2.	Saya selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran			
3.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya			
4.	Saya mendukung peraturan yang telah disepakati bersama			
5.	Saya selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tuntas			
6.	Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu			
7.	Saya selalu berusaha mengembangkan ilmu yang telah diberikan			

8.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus diawasi dan sesuai dengan petunjuk			
9.	Saya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar			
10.	Saya siap bekerjasama dengan rekan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran			
Jumlah skor				

Pedoman Penyekoran Hasil Refleksi Aspek Sikap

Bila Saudara menjawab:

- ✓ “Ya”, maka skor = 3
- ✓ “Kadang-kadang”, maka skor = 2
- ✓ “Tidak Pernah”, maka skor = 1

Konversi jumlah skor menjadi nilai:

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor perolehan}}{30} \times 100$$

Nilai	Kriteria
>90 - 100	Amat Baik
>80 - 90	Baik
>70 - 80	Cukup
>60 - 70	Sedang
≤60	Kurang

F. Daftar Pustaka

- Al-Atok, Rosyid, dkk. 2018. *Pancasila secara Kontekstual Positif*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Al-Hakim, Suparlan, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Anas, Mohammad. dkk. 2017. *Pancasila Dalam Diskursus Sejarah, Jalan Tenah, dan Filosofi Bangsa*. Yogyakarta: Ifada Publishing.
- Badan Intelejen Negara. 2012. *Filosofi Garuda Pancasila*. Diakses dari <http://www.bin.go.id/wawasan/detil/167/3/26/11/2012/filosofi-garuda-pancasila> (28 Februari 2019)
- Hariyono. 2014. *Ideologi Pancasila*. Malang: Intrans Publishing.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Latif, Yudi. 2018. *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Bandung: PT. Mizan.
- Kaelan, H. 2018. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Oetojo Oesman & Alfian. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Turiman. 2014. *Menelusuri "Jejak" Lambang Negara Republik Indonesia Berdasarkan Analisis Sejarah Hukum*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 No.1 Januari-Maret, 121-169,
- Viridianti, Puput. 2014. *Proses Penetapan Garuda Pancasila Sebagai Lambang Negara Indonesia Tahun 1949-1951*. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* Volume 2, No. 2, Juni, 59-72.

Kegiatan Pembelajaran 4

POSISI STRATEGIS INDONESIA

A. Kompetensi

1. Memahami posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia.
2. Memahami mitigasi dan adaptasi bencana.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mendeskripsikan letak, luas, batas, dan bentuk wilayah Indonesia.
2. Mengidentifikasi dampak ekonomis, sosial budaya, politik dan hankam posisi strategis Indonesia.
3. Mendeskripsikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
4. Mengidentifikasi potensi geologis, SDA, dan SDM Indonesia.
5. Mengidentifikasi karakteristik dan jenis-jenis bencana di Indonesia.
6. Mendeskripsikan mitigasi bencana dan adaptasi bencana di Indonesia.

C. Materi

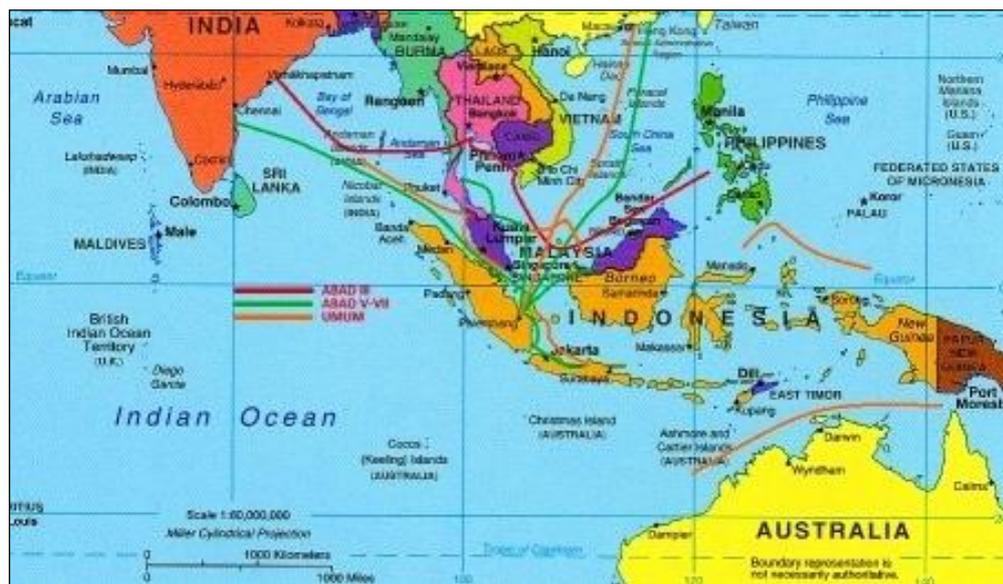
1. Letak (astronomis, geografis, dan geologis), Luas, Batas dan Bentuk Wilayah Indonesia

a. Letak (astronomis, geografis, dan geologis)

Letak astronomis berarti letak berdasarkan garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua belahan utara dan belahan selatan. Letak Indonesia secara astronomis terletak pada 6°LU- 11°LS dan antara 95° BT- 141°BT.

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografisnya ditentukan oleh letak astronomis dan letak geologis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, di antara Benua Asia dan Benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungannya, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania.

Letak geologis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut formasi geologi, keadaan batuan dan jalur-jalur pegunungannya. Formasi geologi Indonesia dibagi menjadi tiga zona geologi; (1) bagian utara merupakan Paparan Sunda (Lempeng Asia); (2) bagian barat dan selatan merupakan Paparan Sahul (lempeng Indo-Australia); (3) bagian timur merupakan Lempeng Dasar Samudera Pasifik.



Gambar 7. Letak Geografis Indonesia

b. Luas, Batas, dan Bentuk Wilayah Indonesia

1) Luas

Menurut Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia = 3,110,000 km². Luas laut teritorial Indonesia : 290,000 km². Luas zona tambahan Indonesia = 270,000 km². Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia = 2,800,000 km². Luas landas kontinen Indonesia 6,400,000 km². Luas NKRI (darat +

perairan) adalah 8,300,000 km². Panjang garis pantai Indonesia adalah 108,000 km

2) Batas Laut

Dalam menentukan perbatasan laut biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut hingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah:

a) Batas Laut Teritorial

Merupakan batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil (19,3 km) ke luar ke arah laut lepas. Garis dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km².



Gambar 8. Batas Laut Indonesia

Sumber: Dinas Hidro-Oceanografi Angkatan Laut 2011

b) Batas Landasan Kontinen

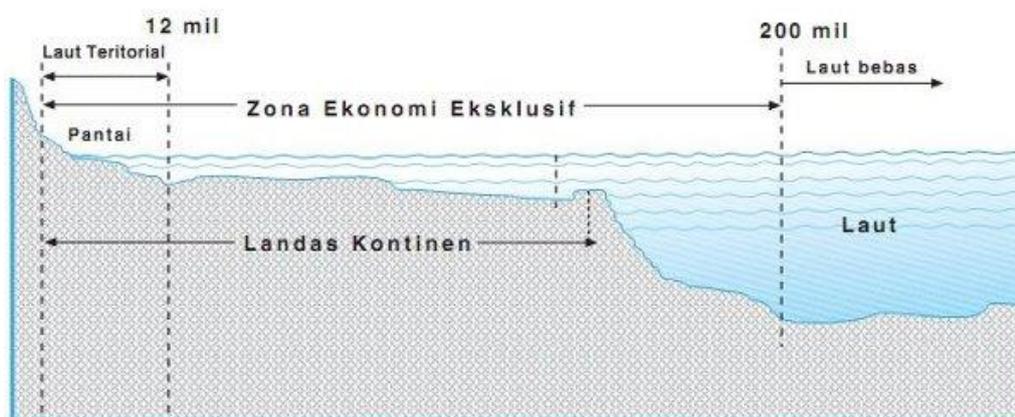
Merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landas kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 m. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 m merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km².

c) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas ZEE Indonesia adalah 2.936.345 km². ZEE diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1983 pasal 5 tentang ZEE. Pada ZEE, Indonesia memiliki hak untuk:

- Melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam
- Berhak melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut
- Mengizinkan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut

Jika dilihat dari bentuknya maka pembagian batas lautan akan terlihat seperti di bawah ini.



Gambar 9. Bentuk Batas Laut Indonesia

3) Batas Darat

Batas daratan adalah batasan negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya, batas ini bisa berupa hutan, gunung, dan bentangan darat lainnya, baik mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Indonesia berbatasan langsung di darat dengan 3 negara. Yaitu Papua New Guinea (berbatas dengan Prov. Papua), Timor Leste (berbatasan dengan Prov. Nusa Tenggara Timur), dan Malaysia (berbatas dengan Prov. Kalimantan Barat dan Timur).

4) Batas Udara

Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memerlukan banyak biaya.

a) Batas udara vertikal Indonesia

Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia.

b) Batas udara horizontal

Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km².

2. Indonesia Sebagai Poros Maritim

a. Pengertian Poros Maritim

Secara geo-politik dan geo-strategis, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudera, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Posisi strategis tersebut menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan, dan sangat logis jika ekonomi kelautan (kemaritiman) dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pada tataran lain, pengakuan internasional terhadap keberadaan wilayah perairan Indonesia meliputi 4 hal yaitu perairan nusantara, laut teritorial, batas Landas Kontinen, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Menyadari betapa luasnya wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia ditambah dengan posisi silangnya yang sangat strategis, hal ini seharusnya dapat memberikan dampak yang positif bagi Indonesia. Namun, dalam konteks ekonomi, Indonesia belum mampu memanfaatkan selat strategis seperti Selat Malaka dan 3 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai

sumber pendapatan negara, melalui pengembangan berbagai aktivitas ekonomi.

Dalam pengembangan negara maritim, Indonesia harus memiliki visi "*outward looking*" didasarkan pada peraturan internasional yang dimungkinkan untuk mendapatkan sumberdaya alam laut secara global maupun mengembangkan kekuatan armada laut nasional untuk dapat menguasai pelayaran internasional dengan menciptakan daya saing sehingga kapal-kapal berbendera Indonesia menguasai pelayaran internasional dan memiliki kekuatan laut (*sea power*) yang unggul.

b. Potensi Maritim Indonesia

Potensi perikanan laut Indonesia yang cukup besar perlu dimanfaatkan secara efisien untuk dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan. Akan tetapi dengan menurunnya jumlah populasi ikan di laut akibat terganggunya ekosistem laut seperti pencemaran, peningkatan keasaman air laut, dan eksploitasi berlebihan serta diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan Indonesia menurun belakangan ini.

Selain kapal-kapal nelayan, perairan Indonesia juga ramai dengan kapal-kapal pengangkut hasil tambang. Kapal-kapal ini mengangkut hasil tambang dari pelabuhan lokasi penambangan menuju pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia bahkan ke luar negeri. Tidak sedikit upaya pengawasannya terhadap kapal-kapal pengangkut ini, meskipun hal ini telah diatur oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI. Ditambah lagi dengan kapal-kapal pengangkut kontainer baik antar pulau maupun antar negara, serta kapal pelayaran domestik.

c. Tantangan Posisi Maritim Indonesia

Pemerintah Indonesia belum mampu melakukan pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang kompetitif, efisien dan maju di segenap wilayah Indonesia. Akibatnya, peningkatan perdagangan dunia melalui aktivitas ekonomi di seluruh kepulauan maupun jalur ALKI belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Padahal wilayah laut Indonesia memiliki peranan penting dalam lalu lintas laut, selain memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata dengan potensi-potensi laut seperti ikan, terumbu karang, dan biota-biota laut lainnya, atau bahkan harta karun bekas kapal yang tenggelam beratus

tahun lalu. Alur laut kepulauan Indonesia menghubungkan 2 perairan bebas Samudra Hindia dan Samudra Pasifik : a) ALKI I: Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, b) ALKI II: Laut Sulawesi, Laut Flores, Selat Lombok, c) Alki III: Samudra Atlantik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai dan laut Sawu.

Banyak potensi-potensi kelautan Indonesia yang belum termanfaatkan secara optimal, bahkan bangsa asing leluasa untuk menguasai dan memanfaatkannya. Padahal di masa lalu, bangsa Indonesia pernah jaya dalam kemaritiman. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki wilayah laut yang cukup luas. Salah satu bentuk keseriusan suatu negara untuk menjaga wilayah perairannya yaitu dengan menata rapi dan kokoh dalam menjaga perairannya. Hingga saat ini Indonesia memiliki 12 instansi (ditambah BAKAMLA menjadi 13), bertugas di wilayah perairan dengan tugas yang sama, serta berbagai macam aspek pendukung seperti kapal dan alat navigasinya yang tidak saling mendukung. TNI AL, tugas utamanya adalah pertahanan, penegakan hukum di perairan pantai dan pelabuhan merupakan wewenang Polisi (Polair) dan Syahbandar sebagai otoritas tertinggi di pelabuhan. Berbagai instansi yang berkepentingan di bidang maritim antara lain, KPLP, Polisi Perairan, Quarantine, Custom, Imigrasi dan sebagainya.

Di dalam undang-undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2009, tertera jelas bahwa otoritas tertinggi di pelabuhan adalah Syahbandar. TNI AL berhak melakukan penegakan hukum di daerah ZEE, sementara 12 mil dari garis pantai merupakan wewenang Polisi Perairan dan KPLP. Pengaturan keselamatan dan keamanan transportasi di laut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran. Ini juga dilakukan sebagai implementasi amanat Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Internasional di Bidang Maritim. Oleh sebab itu, kapal perikanan yang termasuk dalam kriteria kapal niaga harus tunduk kepada hukum yang mengatur tentang kapal niaga, termasuk pula yang menyangkut masalah keselamatan dan keamanan pelayaran yang pembinaannya merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Posisi Indonesia secara geo-politik dan geo-strategis harus didukung dengan kedaulatan penuh terhadap wilayah NKRI secara nyata, sehingga batas-batas wilayah dengan negara tetangga dapat secara nyata dikuasai oleh Indonesia melalui penguasaan yang efektif dan "sea power" yang unggul. Keadaan tersebut juga harus diperkuat kemampuan mempertahankan diri dari segenap ancaman baik dari dalam maupun dari

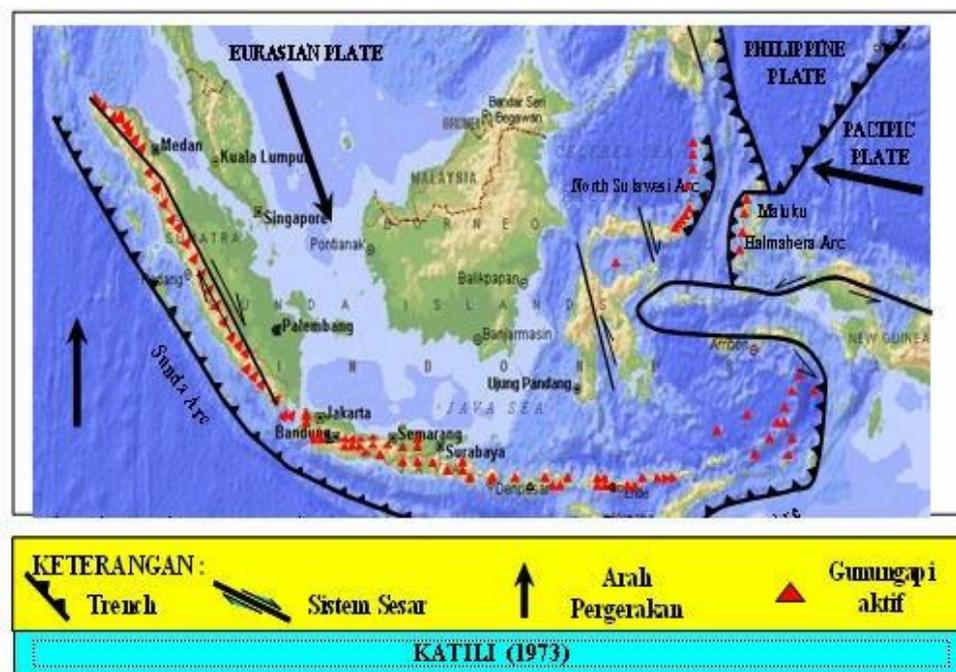
luar melalui kemampuan *maritime security* yang disegani secara global dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia.

3. Potensi Geologis, SDA, dan SDM Indonesia

Indonesia terletak diantara 3 lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Hal tersebut berpengaruh pada:

- Banyaknya pegunungan tinggi dan pegunungan
- Tanah subur akibat banyaknya gunung api
- Keanekaragaman hayati
- Keberagaman sumber daya mineral
- Sumber daya laut yang melimpah
- Rawan bencana seperti gempa, gunung meletus, dan tsunami

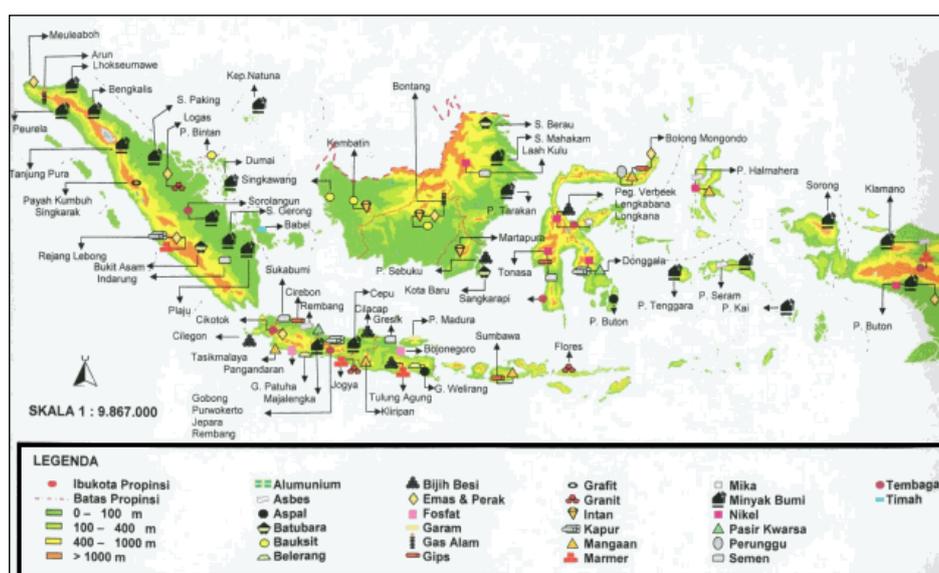
Berikut peta geologis Indonesia yang berpengaruh positif maupun negatif.



Gambar 10. Peta Geologis Indonesia
Sumber: Katili, 1973

Indonesia sebagai negara yang luas memiliki kekayaan alam dan sumber daya alam yang sangat besar. Beberapa daerah di Indonesia terkenal dengan hasil sumber daya alamnya baik itu berasal dari pertanian, perkebunan dan juga pertambangan. Sumber daya alam terbagi menjadi beberapa jenis, berikut adalah macam macam atau jenis-jenis sumber daya alam.

- a. Jenis Sumber Daya Alam Berdasarkan Sumbernya
- Sumber Daya Alam Hayati Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan-tumbuhan dan hewan.
 - Sumber Daya Alam Non-Hayati Sumber daya alam non hayati (abiotik) adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, batuan dan lain-lain.
- b. Jenis Sumber Daya Alam Berdasarkan Sifatnya
- Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui: hutan, laut, tanah, dan lain-lain.
 - Sumber Daya alam yang tidak dapat diperbaharui: gas alam, batubara, minyak bumi, dan lain-lain.



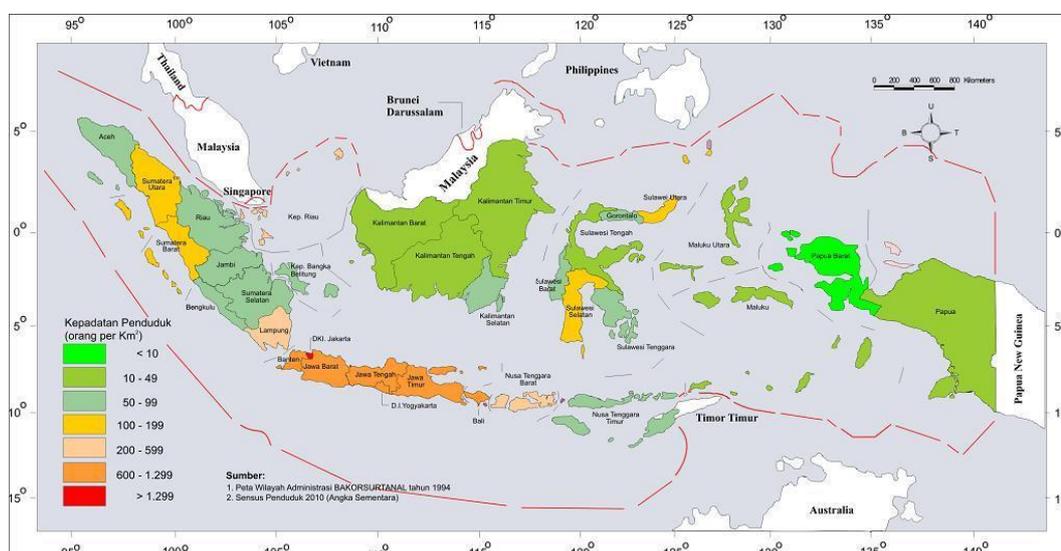
Gambar 11. Peta Sumber Daya Alam Indonesia
Sumber: shantymagdalenablogspot.com

Berdasarkan Data Kependudukan Dunia tahun 2015, Indonesia berada pada urutan ke-empat dengan jumlah penduduk yang mencapai 256 juta jiwa setelah Cina (1.372 juta jiwa), India (1.314 juta jiwa), dan Amerika Serikat (321 juta jiwa). Menurut BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus adalah sebanyak 237.566.363 orang, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% per tahun. Distribusi penduduknya dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2. Prosentase Jumlah Penduduk Berdasarkan Pulau di Indonesia

No	Pulau	Prosentase
1.	Jawa	58%
2.	Sumatra	21%
3.	Sulawesi	7%
4.	Kalimantan	6%
5.	Bali dan Nusa Tenggara	6%
6.	Papua dan Maluku	3%
Jumlah		100%

Berikut peta Penduduk Indonesia berdasarkan kepadatannya.



Gambar 12. Peta Sumber Daya Manusia Indonesia

Sumber: blog.ruangguru.com

4. Karakteristik Bencana di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengklasifikasikan jenis bencana berdasarkan penyebab utamanya yaitu :

- a. **Bencana alam** adalah bencana ini diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam seringkali dianggap hanya karena kejadian alam. Namun, sebagian besar bencana dikarenakan ulah manusia. Jika pemukiman tidak dibangun di wilayah banjir, maka tidak akan menimbulkan bencana banjir dan jika perumahan dibangun pada daerah yang aman terhadap gempa bumi dan tsunami, maka tidak akan menghasilkan bencana dikemudian hari. Kejadian tersebut hanya menarik jika dikaji dari segi keilmuan.
- b. **Bencana nonalam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Pada Gambar 3, bencana epidemi merupakan bencana non alam dengan frekuensi kejadian sebesar 13 %. Selanjutnya, bencana yang terjadi karena kegagalan teknologi dapat berujung pada kejadian kecelakaan di bidang manufaktur, transportasi, ataupun pendistribusian bahan kimia yang berbahaya seperti bahan bakar minyak, bahan kimia, bahan peledak atau bahan nuklir. Contoh bencana katastrofik yang berasal dari bencana non alam yang pernah terjadi adalah kebocoran pipa dari industri pestisida di Bhopal, India Tahun 1984. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dikategorikan sebagai pembunuh terbesar nomor tiga di bawah penyakit jantung koroner dan TBC. Data WHO tahun 2011 menyebutkan, sebanyak 67 persen korban kecelakaan lalu lintas berada pada usia produktif, yakni 22 – 50 tahun. Terdapat sekitar 400.000 korban di bawah usia 25 tahun yang meninggal di jalan raya, dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Data Kepolisian RI menyebutkan, pada tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, dengan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun - Rp 217 triliun per tahun.
- c. **Bencana sosial** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial dipicu dari tiga faktor utama yaitu kemiskinan, kekerasan dan ketidakadilan struktural. Kondisi pemerintah, pasar dan masyarakat sangat mempengaruhi ada tidaknya bencana sosial. Kondisi pemerintah dan pasar yang stabil akan memperkecil terjadinya bencana sosial.

Sedangkan jenis-jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia dapat dikelompokkan seperti berikut ini:

a. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika Litosfer

1) Letusan gunung api

Letusan gunung api merupakan proses keluarnya magma yang berada di perut bumi ke permukaan bumi berupa material padat berupa bom, lavili dan deb vulkanik, material cair berupa lahar dan material gas berupa awan panas

2) Tanah longsor

Tanah longsor merupakan gerakan masa batuan atau tanah menuruni lereng atau tebing.

4) Gempa bumi

Gempa bumi merupakan getaran pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh pergerakan dan/atau interaksi lempeng tektonik serta aktivitas vulkanik

b. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika Hidrosfer

1) Banjir

Fenomena banjir merupakan peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Banjir umumnya terjadi ketika volume air pada sungai melebihi daya tampung sungai tersebut.

2) Tsunami

Fenomena tsunami merupakan gelombang pasang yang terjadi akibat aktivitas tektonik dan letusan gunung api yang terdapat di dasar laut

c. Bencana alam yang disebabkan oleh dinamika Atmosfer

1) Badai tropis

Dalam meteorologi dikenal istilah Badai Tropis yang merupakan pusaran angin tertutup pada suatu wilayah bertekanan udara rendah. Kekuatan angin yang terjadi pada Badai Tropis dapat mencapai kecepatan lebih dari 128 km/jam dengan jangkauan lebih dari 200 Km dan berlangsung selama beberapa hari hingga lebih dari satu minggu.

2) Angin Puting Beliung

Angin puting beliung adalah angin yang berputar dalam waktu yang sangat singkat sekitar 3 sampai 5 menit, sering terjadi di darat dengan radius sekitar 5-10 km. Angin puting beliung dapat membuat atap-atap rumah semi permanen berterbangan dan dapat membuat pohon tumbang. Biasa juga dikenal dengan rebut/puyuh, yaitu angin

kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar seperti spiral hingga menyentuh permukaan bumi dan punah dalam waktu singkat (3-5 menit). Kecepatan angin rata-ratanya berkisar antara 30-40 knots. Angin ini berasal dari awan Cumulonimbus (Cb) yaitu awan yang bergumpal berwarna abu-abu gelap dan menjulang tinggi. Namun, tidak semua awan Cumulonimbus menimbulkan puting beliung. Puting beliung dapat terjadi dimana saja, di darat maupun di laut dan jika terjadi di laut durasinya lebih lama daripada di darat. Angin ini umumnya terjadi pada siang atau sore hari, terkadang pada malam hari dan lebih sering terjadi pada peralihan musim (pancaroba). Luas daerah yang terkena dampaknya sekitar 5-10 km, karena itu bersifat sangat lokal.

5. Mitigasi dan Adaptasi Bencana

a. Mitigasi Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Beberapa tujuan utama mitigasi bencana alam yaitu:

- 1) Mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumber daya alam.
- 2) Menjadi landasan perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman

Untuk melakukan penanggulangan bencana, diperlukan informasi sebagai dasar perencanaan penanganan bencana yang meliputi:

- 1) Lokasi dan kondisi geografis wilayah bencana serta perkiraan jumlah penduduk yang terkena bencana
- 2) Jalur transportasi dan sistem telekomunikasi
- 3) Ketersediaan air bersih, bahan makanan, fasilitas sanitasi, tempat penampungan dan jumlah korban
- 4) Tingkat kerusakan, ketersediaan obat-obatan, peralatan medis serta tenaga kesehatan
- 5) Lokasi pengungsian dan jumlah penduduk yang mengungsi
- 6) Perkiraan jumlah korban yang meninggal dan hilang
- 7) Ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian

Sedangkan siklus manajemen bencana terdiri dari empat fase. Tiap fase tersebut saling melengkapi dan tumpang tindih. Keempat fase tersebut adalah:

1) Mitigasi

Merupakan upaya meminimalkan dampak bencana. Fase ini umumnya terjadi bersamaan dengan fase pemulihan dari bencana sebelumnya. Seluruh kegiatan pada fase mitigasi ditujukan agar dampak dari bencana yang serupa tidak terulang.

2) Kesiapsiagaan

Merupakan perencanaan terhadap cara merespons kejadian bencana. Dalam fase ini perencanaan yang dibuat oleh lembaga penanggulangan bencana tidak hanya berkisar pada bencana yang pernah terjadi pada masa lalu, tetapi juga untuk berbagai jenis bencana lain yang mungkin terjadi.

3) Respon

Merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan oleh terjadinya bencana. Fase ini berlangsung sesaat setelah terjadi bencana dan dimulai dengan mengumumkan kejadian bencana serta mengungsikan masyarakat.

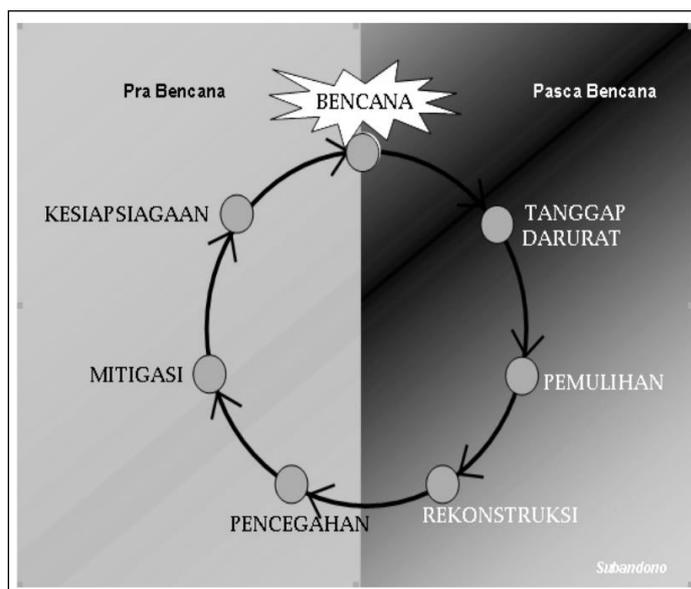
4) Pemulihan

Merupakan upaya pengembalian kondisi masyarakat sehingga menjadi seperti semula. Pada fase ini pekerjaan utama yang dilakukan masyarakat dan petugas adalah menyediakan tempat tinggal sementara bagi korban bencana dan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selama masa pemulihan ini, dilakukan pula evakuasi terhadap langkah-langkah penanganan bencana yang telah dilakukan.

b. Adaptasi Bencana Alam

Adaptasi bencana adalah penyesuaian sistem alam dan manusiaterhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya, yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat.

Menurut Subandono (2007) secara substansi, mitigasi dan adaptasi bencana adalah usaha menciptakan masyarakat yang sadar dan tanggap bencana dengan melalui pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Konsep solusi PRB disesuaikan dengan siklus terjadinya bencana, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 13. Siklus dan Konsep Solusi Bencana

D. Lembar Kegiatan

1. Lakukan kegiatan pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan membuat anda mencapai kompetensi yang diharapkan dengan penuh tanggung jawab dan menyenangkan.
2. Gunakan LK yang sudah disediakan untuk berdiskusi dengan kelompok dan menyelesaikan tugas.
3. Sebelum mengerjakan LK bersama kelompok, bacalah dengan seksama terlebih dahulu kompetensi dan indikator yang harus dicapai.
4. Selanjutnya bacalah uraian materi yang telah tersedia dan silahkan diperkaya dengan membaca referensi lain yang relevan.

LK 4.1 Letak, Luas, Batas, dan Bentuk Indonesia serta Dampaknya

Petunjuk Pengerjaan :

- a) Gambarlah peta Indonesia menggunakan kertas yang sudah disediakan.
- b) Bandingkan gambar anda dengan teman anda.
- c) Perhatikan Atlas Indonesia bersama kelompok.
- d) Gambarlah peta Indonesia berdasarkan Atlas Indonesia tersebut.
- e) Bandingkan gambar peta yang anda buat pertama dan kedua.

Tuliskan apa yang anda ketahui tentang letak, luas, batas, dan bentuk wilayah Indonesia.
Jawaban :
Tuliskan apa yang anda ketahui tentang batas territorial dan Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Jawaban :
Identifikasi dampak ekonomis, sosial budaya, politik dan hankam posisi strategis Indonesia
Jawaban:

LK 4.2 Indonesia Sebagai Poros Maritim
Petunjuk Pengerjaan :
a) Amatilah posisi wilayah Indonesia menggunakan globe dan atlas. b) Cermati wilayah perairan dan daratan yang ada di sekitar Indonesia. c) Jawablah pertanyaan di bawah ini. d) Kerjakanlah secara berkelompok dengan semangat gotong royong dan integritas yang tinggi. e) Berkomunikasilah secara santun dan saling menghargai pendapat dalam kelompok, ehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik. f) Presentasikan hasil diskusi sesuai kesepakatan dalam kelompok Saudara
Berdasarkan pengamatan anda dari globe dan peta (atlas), mengapa Indonesia disebut sebagai poros maritim dunia?

Jawaban :

Tuliskan potensi maritim Indonesia dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat.

Jawaban :

LK 4.3 Potensi Geologis, SDA, dan SDM Indonesia

Petunjuk Pengerjaan :

- a) Amatilah Atlas (Peta) Geologis, SDA, dan SDM Indonesia yang telah tersedia.
- b) Deskripsikan hasil pengamatan anda bersama kelompok.
- c) Kerjakanlah secara berkelompok dengan semangat gotong royong dan integritas yang tinggi
- d) Berkomunikasilah secara santun dan saling menghargai pendapat dalam kelompok.sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik
- e) Presentasikan hasil diskusi sesuai kesepakatan dalam kelompok Saudara

Deskripsikan potensi geologis Indonesia.

Jawaban :

Deskripsikan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.

Jawaban :

Deskripsikan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Jawaban:

LK 4.4 Mitigasi dan Adaptasi Bencana
Petunjuk Pengerjaan :
a) Perhatikan video kebencanaan yang ditayangkan oleh Fasilitator. b) Diskusikan bersama kelompok secara santun dan saling menghargai pendapat tentang karakteristik bencana tersebut. c) Presentasikan hasil diskusi sesuai kesepakatan dalam kelompok Saudara.
Identifikasilah jenis-jenis bencana yang terjadi di Indonesia (dapat selain yang terdapat dalam video yang ditayangkan).
Jawaban :
Simulasikan mitigasi dan adaptasi bencana di sekolah, misal: tanggap bencana geologis, pembuatan papan evakuasi, menanam bakau di pantai, reboisasi, dan sebagainya (menggunakan gambar-gambar jenis bencana)
Jawaban :

E. Refleksi

Refleksi Kegiatan Pembelajaran (KP) bersifat refleksi diri yang dilakukan oleh peserta secara individu, meliputi menjawab beberapa pertanyaan terbuka dan mengisi dua instrumen ketrampilan dan sikap. Jawablah pertanyaan dan isilah pernyataan di bawah ini dengan obyektif, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat Mengerjakan.

1. Pengalaman dan ide baru apa yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini?
2. Bagaimana Saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas?
3. Materi dan hal-hal apa yang belum Saudara pahami dalam kegiatan pembelajaran ini?
4. Bagaimana usaha Saudara dalam mengatasinya?
5. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Keterampilan pada KP 4

Pada Kegiatan Pembelajaran ini, Saudara telah mempelajari tentang Posisi Strategis Indonesia dengan mengerjakan LK 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Setelah mengerjakan LK tersebut, Saudara dapat melakukan penilaian diri untuk mengetahui kemampuan Saudara berada dalam posisi sangat terampil, terampil, cukup terampil ataukah kurang terampil. Penilaian diri tersebut sebagai refleksi Saudara dalam mengikuti Kegiatan Pembelajaran ini.

Berikut ini rubrik refleksi yang dapat Saudara gunakan ketika melakukan refleksi. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi kemampuan Saudara.

Kriteria	Tindak Lanjut	Kondisi
Sangat Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan ke bagian penutup.	
Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK akan tetapi masih memerlukan bantuan orang lain, maka Saudara perlu berlatih kembali secara mandiri untuk mengerjakan LK-LK tersebut.	
Cukup Terampil	Apabila Saudara belum terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu berlatih kembali mengembangkan materi dengan berdiskusi dengan sesama peserta.	
Kurang Terampil	Apabila Saudara tidak terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu bantuan fasilitator/NS agar lebih terampil dan membaca kembali materi yang telah tersedia	

6. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Sikap pada KP 4

Setelah Saudara melakukan refleksi diri pada aspek keterampilan, selanjutnya lakukanlah penilaian diri untuk aspek sikap dengan mengisi instrumen refleksi berikut ini. Sikap yang perlu Saudara refleksi meliputi sikap religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong royong. Berilah tanda centang (✓) pada setiap nomor sesuai dengan kondisi Saudara.

No	Pernyataan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Saya memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa			
2.	Saya selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran			
3.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya			
4.	Saya mendukung peraturan yang telah disepakati bersama			
5.	Saya selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tuntas			
6.	Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu			
7.	Saya selalu berusaha mengembangkan ilmu yang telah diberikan			
8.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus diawasi dan sesuai dengan petunjuk			
9.	Saya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar			
10.	Saya siap bekerjasama dengan rekan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran			
Jumlah skor				

Pedoman Penskoran Hasil Refleksi Aspek Sikap

Bila Saudara menjawab:

- ✓ “Ya”, maka skor = 3
- ✓ “Kadang-kadang”, maka skor = 2
- ✓ “Tidak Pernah”, maka skor = 1

Konversi jumlah skor menjadi nilai:

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor perolehan}}{30} \times 100$$

Nilai	Kriteria
>90 - 100	Amat Baik
>80 - 90	Baik
>70 - 80	Cukup
>60 - 70	Sedang
≤60	Kurang

F. Daftar Pustaka

- Anonim, 2007. *UURI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.*
- _____. 2006. *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.*
- _____. 2007. *Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia.* Jakarta: Direktorat Mitigasi Lakhar BAKORNAS PB.
- Coburn A.W., Spence R. J. S., Pomonis A. 1994. *Earth Quake Mitigation.* United Kingdom: Cambridge Architectural Research Limited, The Oast House, Malting Lane, Cambridge.
- Kardono, Priyadi., Hartono., Suprajaka, (2015), *Paradigma GEOMARITIM: Strategi Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi*, diterbitkan oleh: Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Ikatan Geograf Indonesia (IGI), Cibinong.
- Subandono. 2007. *Program Mitigasi Bencana dalam Zone Perairan Laut.* Jakarta: Departemen Kelautan Republik Indonesia.

Kegiatan Pembelajaran 5

HARMONI SOSIAL

A. Kompetensi

1. Mengidentifikasi prinsip harmoni dalam keberagaman sosial
2. Menganalisis cara meredam kekerasan dalam menjaga harmoni sosial
3. Membangun komitmen antikorupsi dalam rangka harmoni sosial
4. Mendeskripsikan etika sosial sebagai wujud harmoni sosial

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan konsep harmoni sosial
2. Mengidentifikasi prinsip harmoni dalam keberagaman sosial
3. Menerapkan prinsip harmoni dalam keberagaman sosial
4. Memahami konsep kekerasan dan bentuk-bentuknya
5. Menganalisis masalah kekerasan di ranah publik
6. Memberikan solusi terhadap masalah kekerasan
7. Mendeskripsikan karakteristik tindakan korupsi
8. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan korupsi
9. Mendeskripsikan dampak korupsi terhadap kesenjangan sosial
10. Menerapkan pencegahan korupsi di sekolah
11. Mendeskripsikan etika dalam keluarga
12. Mendeskripsikan etika di sekolah
13. Mendeskripsikan etika di masyarakat

C. Materi

1. Harmoni Sosial

a. Konsep Harmoni Sosial

Konsep harmoni menurut berasal dari bahasa Yunani dari kata *harmonia* yang berarti terikat secara serasi. Jika kita menganalogikan dengan musik, harmoni merupakan keserasian nada saat dilantunkan secara bersamaan sehingga merdu saat didengar. Harmoni sosial dapat dimaknai sebagai sebuah keadaan masyarakat yang anggotanya saling berhubungan secara baik dan saling menghargai satu sama lain, sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya.

Harmoni sosial suatu keadaan keseimbangan dalam sebuah kehidupan, Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya ada sikap saling

menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga atau masyarakat. Harmoni sosial tidak akan pernah tercapai ketika tidak tercipta kehidupan yang damai serta saling menghargai dari setiap anggota masyarakat yang tinggal bersama dan memiliki perbedaan.

b. Prinsip-Prinsip Harmoni dalam Keberagaman Sosial

Harmoni dalam perbedaan adalah sebuah harapan dalam setiap kehidupan keberagamaan masyarakat yang harus dipandang secara optimis untuk merealisasikan hal tersebut. Harmoni sosial adalah suatu keniscayaan. Justifikasi sebuah kebenaran atau keyakinan suatu kelompok dapat diredam jika melihat betapa pentingnya kesatuan dalam keharmonisan. Oleh karena itu ada beberapa prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang harus dijaga agar harmoni tetap lestari, prinsip-prinsip tersebut antara lain:

- 1) Mengedepankan semangat egalitarianisme atau kesetaraan
- 2) Saling pengertian antara sesama anggota masyarakat
- 3) Mengutamakan toleransi yang tinggi
- 4) Mengutamakan kerjasama antara sesama anggota masyarakat
- 5) Menjunjung tinggi keterbukaan
- 6) Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan prestise seperti keturunan kesukuan, ras, dan lain-lain

c. Penerapan Prinsip Harmoni

Harmoni sosial di Indonesia ibarat taman raksasa yang penuh warna-warni bunga yang enak dipandang mata. Indonesia bisa menjadi alunan orkestra yang terdiri banyak instrumen musik tetapi enak didengar. Itulah harmoni dalam keberagaman.

Untuk mewujudkan kondisi di atas, menurut Cadman (2017), harmoni sosial harus dilandasi oleh rasa cinta, kasih sayang adalah terhadap diri sendiri dan orang lain (*others*). Kondisi ini harus dihadirkan tanpa henti dengan memperhatikan dan mengimplementasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Aturan yang proporsional dan keseimbangan dalam menjalankannya
- 2) Jalinan hubungan antarbagian masyarakat secara menyeluruh
- 3) Menghormati segala perbedaan dan berbagai ekspresi budaya.
- 4) Berperilaku secara benar, adil dan sesuai aturan.
- 5) Selalu melandasi dengan cinta dan kasih sayang
- 6) Membangun kolaborasi dalam setiap komunitas.

2. Anti Kekerasan

a. Konsep Kekerasan dan Bentuk-Bentuk Kekerasan

Soerjono Soekanto (2002: 98), mengartikan kekerasan (*violence*) sebagai penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Kekerasan juga bisa berupa ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak (Narwoko dan Suyanto, 2000: 70).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa tindak kekerasan merupakan perilaku sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk merusak orang atau kelompok lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak pada kerusakan hingga trauma psikologis bagi korban.

Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan seolah-olah telah melekat dalam diri seseorang guna mencapai tujuan hidupnya. Tidak mengherankan, jika semakin hari kekerasan semakin meningkat dalam berbagai macam dan bentuk. Johan Galtung membagi tipologi kekerasan menjadi tiga, yaitu (Windhu, 1992):

- 1) **Kekerasan Langsung.** Kekerasan langsung biasanya berupa kekerasan fisik, disebut juga sebagai sebuah peristiwa (*event*) dari terjadinya kekerasan. Kekerasan langsung terwujud dalam perilaku, misalnya: pembunuhan, pemukulan, intimidasi, penyiksaan.
- 2) **Kekerasan Struktural** (kekerasan yang melembaga). Kekerasan struktural terwujud dalam konteks, sistem, dan struktur, misalnya: diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan. Kekerasan struktural merupakan kekerasan dalam bingkai kekuasaan, yang berkaitan dengan hal kebijakan, pengurusan administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan.
- 3) **Kekerasan Kultural.** Kekerasan kultural merupakan suatu bentuk kekerasan permanen. Terwujud dalam sikap, perasaan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, misalnya: kebencian, ketakutan, rasisme, ketidaktoleranan, aspek-aspek budaya, ranah simbolik yang ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, serta ilmu pengetahuan. Beberapa ahli menyebut tipe kekerasan seperti ini sebagai kekerasan psikologis. Termasuk bentuk kekerasan psikis adalah kekerasan simbolik. Pierre Bourdieu mendefinisikan kekerasan simbolik sebagai mekanisme komunikasi yang ditandai dengan relasi kekuasaan yang timpang di mana pihak yang satu memandang diri lebih superior entah

dari segi moral, ras, etnis, agama ataupun jenis kelamin dan usia (Martono, 2009). Contoh, julukan “kafir” untuk menyebut agama yang berbeda dengan kelompok yang dianutnya, sebutan “hitam” bagi kelompok kulit hitam, sebutan “bodoh” bagi siswa, atau tayangan televisi tentang gaya hidup hedonis yang ditonton oleh kaum miskin, dan seterusnya.

Ada beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kekerasan, sebagai berikut :

1) Faktor Individual

Faktor internal, atau faktor psikis yang ada dalam diri pelaku.

2) Faktor Kelompok

Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengedepankan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnik. Identitas kelompok inilah yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Benturan antara identitas kelompok yang berbeda sering menjadi penyebab kekerasan.

3) Faktor Dinamika Kelompok

Menurut teori ini, kekerasan timbul karena adanya deprivasi relatif yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat. Artinya, perubahan sosial yang terjadi demikian cepat dalam sebuah masyarakat, tidak mampu ditangkap dengan seimbang oleh sistem sosial dan masyarakatnya. Dalam konteks ini munculnya kekerasan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a) Situasi sosial yang memungkinkan timbulnya kekerasan yang disebabkan oleh struktur sosial tertentu.
- b) Tekanan sosial, yaitu suatu kondisi saat sejumlah besar anggota masyarakat merasa bahwa banyak nilai dan norma yang sudah dilanggar. Tekanan ini tidak cukup menimbulkan kerusuhan atau kekerasan, tetapi juga menjadi pendorong terjadinya kekerasan.
- c) Berkembangnya perasaan kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian itu berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu kekerasan.
- d) Mobilisasi untuk beraksi, yaitu tindakan nyata berupa pengorganisasi diri untuk bertindak. Tahap ini merupakan tahap akhir dari akumulasi yang memungkinkan terjadinya kekerasan.

- e) Kontrol sosial, yaitu tindakan pihak ketiga seperti aparat keamanan untuk mengendalikan, menghambat, dan mengakhiri kekerasan.

b. Kekerasan di Ruang Publik

Ruang publik adalah tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, berbagi masalah baik masalah pribadi maupun kelompok. Ruang publik dapat berupa ruang dalam dunia nyata (*real space*) ataupun dunia maya (*virtual space*).

Ruang publik memiliki peran yang cukup penting dalam proses berdemokrasi. Habermas, menyatakan bahwa ruang publik merupakan ruang demokratis atau ruang warga negara dapat menyatakan opini-opini dan menyalurkan kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka (Hardiman, 2010: 185). Habermas membagi-bagi ruang publik menjadi tiga: 1) pluralitas, meliputi: keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dan semacamnya), 2) publisitas, meliputi: media massa, institusi-institusi kultural, dan sejenisnya; 3) keprivatan, meliputi wilayah perkembangan individu dan moral), 4) legalitas, meliputi: struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar. Jadi, ruang publik bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, kekerasan di ruang publik sering kali ditemui di masyarakat melalui berbagai pemberitaan media massa. Dalam modul ini akan dibahas beberapa masalah kekerasan di ruang publik, yaitu intimidasi (*bullying*), persekusi, ujaran kebencian (*hate speech*), dan berita bohong (*hoax*).

1) Bullying

Bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, atau seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal, dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang di mana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan

National Center Against Bullying (2018) menyebut ada 4 jenis *bullying*:

a) **Bullying Fisik**

Bullying fisik adalah intimidasi yang langsung berkontak pada fisik seseorang, bisa berupa tindakan menekan, menendang, menjepit, mendorong, mengambil, meludah atau menghancurkan barang seseorang dan gerakan kasar lainnya yang disebabkan anggota tubuh. Dampaknya dapat menimbulkan trauma baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b) **Bullying Verbal**

Bullying verbal yaitu intimidasi seseorang melalui ucapan atau tulisan suatu hal yang bermakna tertentu yang menyakiti orang tersebut. Contoh: menggoda, mengomentari hal yang tidak pantas, memberikan panggilan nama, mengancam dan mengejek seseorang. Jenis *bullying* ini kerap sekali tak disadari karena tidak memiliki bukti fisik.

c) **Bullying Sosial**

Bullying sosial merupakan intimidasi terhadap kehidupan bersosial seperti dengan sengaja meninggalkan seseorang, menyebarkan rumor buruk tentang seseorang, dan mempermalukan seseorang di depan umum. *Bullying* sosial termasuk ke dalam kategori *bullying* terselubung. Hal tersebut karena *bullying* ini biasanya dilakukan di belakang korban yang diintimidasi. Tujuannya untuk melukai reputasi sosial seseorang atau membuat orang lain merasa dipermalukan.

d) **Cyber Bullying**

Cyber bullying atau intimidasi siber merupakan segala hal yang berbentuk gangguan yang tujuannya untuk merendahkan martabat atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan teknologi, misalnya mengirim pesan atau membuat komentar yang menyakitkan atau mengancam seseorang, mengungkapkan informasi pribadi yang sifatnya rahasia.

2) Persekusi

Persekusi (*persecution*) adalah perlakuan buruk atau penganiyaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau

pandangan politik. Penyebab terjadinya persekusi adalah sebagai berikut:

- a) ketidakpercayaan dan saling mencurigai antara masyarakat kurang mampu terhadap kaum elit.
- b) kesenjangan sosial karena belum ada nilai tambah ekonomi kepada masyarakat kurang mampu.
- c) globalisasi dan kehidupan maya di masyarakat sehingga mereka merasa bebas mengeluarkan pendapatnya.
- d) anggapan masyarakat saat ini bahkan sebelumnya bahwa penegakan hukum dilakukan secara tidak adil.
- e) anggapan masyarakat bahwa proses hukum penuh dengan intervensi dari pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Kasus persekusi umumnya berupa tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga, yang didasarkan atas upaya segelintir pihak untuk memburu dan menangkap seseorang yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap ulama dan agama. Pola persekusi ini setidaknya memiliki beberapa tahapan yakni: 1) menelusuri identitas orang-orang yang menghina ulama/agama; 2) menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, alamat kantor atau rumah; 3) melakukan aksi geruduk ke kantor atau rumahnya oleh massa.

3) Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, penyandang disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Menurut Soesilo (1995) penghinaan terhadap individu ada 6 macam yaitu:

- a) Menista secara lisan (*smaad*)
- b) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c) Memfitnah (*laster*)
- d) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Di Indonesia, konsep ujaran kebencian digunakan dalam UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

4) Hoaks

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hoaks’ adalah ‘berita bohong.’ Dalam Oxford English dictionary, ‘*hoax*’ didefinisikan sebagai ‘*malicious deception*’ atau ‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Menurut **Silverman**, hoaks adalah sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun ‘dijual sebagai kebenaran dan memiliki agenda politik tertentu (**Astuti, 2017**).

Hoaks bukan sekedar menyesatkan. Informasi dalam *hoaks* tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berikut beberapa jenis hoaks:

- a) *Hoax proper*. Hoaks yang bermaksud untuk menipu orang dan mengambil keuntungan dari berita ini. Termasuk dalam kategori ini adalah hoax tentang pesan berantai, hadiah gratis, *urban legend*, dan kisah-kisah yang menyedihkan.
- b) *Clickbait*. Hoaks yang menampilkan judul heboh dan cenderung provokatif, tetapi berbeda dengan isi berita. Kebiasaan buruk banyak warganet adalah hanya membaca *headline* berita tanpa membaca isinya.
- c) Berita Basi; Berita benar dalam konteks menyesatkan. Kadang-kadang berita benar yang sudah lama diterbitkan bisa beredar lagi di sosial media. Ini membuat kesan bahwa berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan orang yang tidak mengecek kembali tanggalnya
- d) Hoax Pencemaran Nama Baik. Sifat hoaks ini sangat berbahaya. Karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap.

3. Antikorupsi

a. Konsep Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dapat dipidana karena tindak korupsi. Korupsi krusial untuk diberantas karena :

- 1) Korupsi menyangkut uang rakyat atau harta milik negara yang seharusnya dipergunakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan rakyat.
- 2) Korupsi merupakan penyakit bagi sebuah negara sehingga penyelesaiannya tidak berhenti pada pemberian hukuman kepada para koruptor namun juga upaya menanggulangi terjadinya tingkah laku yang korup
- 3) Korupsi dianggap sebagai sebuah kelaziman menimbulkan krisis kepercayaan, kehilangan figur panutan sebuah bangsa.

b. Ciri-Ciri Korupsi

Syed Hussein Alatas (Adwirman, 2014) mengemukakan ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

- 1) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- 2) Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya.
- 3) Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- 4) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
- 5) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
- 6) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.
- 7) Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya.
- 8) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum.

c. Bentuk-Bentuk Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. merumuskan 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

d. Penyebab Korupsi

Menurut Romi (2011) seseorang melakukan korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari niat yang terkait dengan faktor individu, meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, seperti kebiasaan dan kebutuhan (Batennie, 2012). Selain itu, seseorang melakukan korupsi disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. Faktor penyebab korupsi :

1) Faktor-Faktor Internal penyebab korupsi

- a) Sifat tamak/rakus manusia
- b) Moral yang kurang kuat
- c) Gaya hidup yang konsumtif

2) Faktor-faktor Eksternal penyebab korupsi

- a) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.

Sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :

- (1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi dapat ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- (2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
- (3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

(4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.

b) Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

c) Aspek politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi

d) Aspek Organisasi

(1) *Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan*; Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya.

(2) *Tidak adanya kultur organisasi yang benar*. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi.

(3) *Kurang memadainya sistem akuntabilitas*. Ketidakjelasan rumusan visi dan misi yang diemban institusi pemerintahan berkibat sulitnya penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarannya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- (4) *Kelemahan sistem pengendalian manajemen.* Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.
- (5) *Lemahnya pengawasan.* Pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan dapat tidak efektif karena adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

e. Dampak Korupsi terhadap Bidang Sosial Budaya

Dampak korupsi terhadap bidang sosial, di antaranya dapat menyebabkan: 1) kemiskinan masyarakat meningkat; 2) demoralisasi bangsa; dan 3) meningkatnya kriminalitas. Korupsi juga dapat membawa dampak negatif terhadap budaya dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat yang menganggap bahwa korupsi adalah sesuatu yang biasa menganggap lumrah, misalnya pemberitaan tentang pejabat yang ditangkap karena korupsi bahkan dirinya pun merasa korupsi sesekali boleh dilakukan asal dalam skrup kecil. Kondisi seperti ini mengakibatkan korupsi mengakar menjadi norma dan budaya.

f. Pencegahan Korupsi

Pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya di dunia pendidikan melalui penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik di sekolah. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka upaya pencegahan diberikan sedini mungkin dengan menanamkan bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun norma agama melalui pembiasaan peserta didik menjadi seorang yang jujur dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pencegahan korupsi melalui pendidikan dipandang menjadi salah satu solusi karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada seseorang secara tersistem dan terukur.

1) Nilai-nilai Anti Korupsi

a) Kejujuran

Jujur didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang (Sugono, 2008). Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting dimiliki peserta didik, tanpa sifat jujur peserta didik tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Seorang yang jujur berhubungan erat dengan integritas karena apa yang dilakukan itulah yang dikatakan, begitupula sebaliknya.

Kejujuran tidak hanya dilakukan pada saat diawasi, namun juga saat tidak ada pengawasan dari orang lain artinya kejujuran tersebut telah terinternalisasi dengan baik. Pentingnya nilai kejujuran yang tertanam dengan baik menjadi pondasi awal dalam mencegah tindakan korupsi.

b) Kepedulian

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono, 2008). Kepedulian yang dimiliki seseorang menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi dan mampu berempati sehingga dalam bertindak seseorang akan melihat dari dua sisi, baik atau burukkah bagi dirinya maupun bagi orang lain di sekitarnya.

c) Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah.

d) Kedisiplinan

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan (Sugono, 2008). Disiplin merupakan kunci keberhasilan untuk terus mengembangkan potensi diri secara konsisten dan tekun. Seseorang yang disiplin memegang prinsip kebaikan dan kebenaran dalam bekerja sehingga terhindar dari keinginan untuk memperoleh sesuatu secara instan. Upaya penegakan disiplin di sekolah dapat ditempuh misalnya :

- (1) membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya: waktu belajar di rumah, lama peserta didik harus membaca atau mengerjakan tugas.

(2) menerapkan peraturan akademik sebagai alat dan cara menegakkan disiplin, misalnya menerapkan hukuman dan apresiasi secara adil, sesegera mungkin dan transparan.

e) Tanggungjawab

Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya (Sugono, 2008). Berdasarkan penjelasan di atas, ketika terdapat kewajiban, maka terdapat pula tanggungjawab yang harus dilakukan secara sadar. Apabila ditinjau dari keadaan individu terhadap hubungan yang dibuatnya, maka tanggungjawab dapat dibedakan atas 5 (lima) macam, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan terhadap Tuhan.

f) Kerja keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan keteladan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. (Aldiwarman 2014)

g) Kesederhanaan

Kesederhanaan membuat seseorang mensyukukuri atas apa yang telah diperolehnya dan senantiasa mempunyai semangat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik dengan cara yang bertanggung jawab. Orang yang hidup sederhana berusaha menyelaraskan antara kebutuhan atau keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proposional.

h) Keberanian

Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian mempunyai ciri: berani mengaku kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kebatilan, tidak akan menoleransi adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas, berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun

semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. (Aldiwarman 2014).

i) Keadilan

Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya, tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah diupayakan (Aldiwarman 2014).

2) Prinsip Anti Korupsi

Prinsip-prinsip antikorupsi meliputi:

a) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan (*de jure*) maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat (*de facto*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas, 2002). Mekanisme yang dapat digunakan untuk menegakkan prinsip akuntabilitas pemberantasan korupsi : 1) membuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban semua kegiatan tentang apa yang hendak, sedang dan telah dilakukan, 2) evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dalam kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak, dan manfaat

b) Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo, 2007). Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam prosesnya, terdapat lima proses dalam transparansi, yaitu : 1) penganggaran, 2) penyusunan kegiatan, 3) pembahasan, 4) pengawasan, dan 5) evaluasi.

c) Kewajaran

Prinsip kewajaran ditujukan untuk mencegah adanya manipulasi dalam penganggaran dan mark up maupun ketidakwajaran lainnya.

Prinsip kewajaran terdiri atas lima sifat :

- (1) Komprehensif dan disiplin. Mempertimbangkan semua aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas (*off budget*). Hal ini dimaksudkan agar anggaran dapat dimanfaatkan sewajarnya.
- (2) Fleksibilitas .Tersedianya kebijakan tertentu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas (prinsip tak tersangka, perubahan, pergeseran, dan desentralisasi manajemen).
- (3) Terprediksi. Ketetapan dalam perencanaan berdasarkan asas *value for money* dengan tujuan untuk menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Adanya anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari prinsip kewajaran dalam proses pembangunan.
- (4) Kejujuran. Kejujuran adalah tidak adanya bias perkiraan penerimaan atau pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis.
- (5) Informatif. Informatif merupakan ciri dari kejujuran. Sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif adalah dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan.

d) Kebijakan

Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Masyarakat secara umum perlu memahami kebijakan yang berlaku misalnya UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Desentralisasi, UU Anti Monopoli dalam hal turut memberikan kontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara.

e) Kontrol kebijakan

Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan menghapus semua bentuk korupsi. Sedikitnya terdapat tiga model atau bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, yaitu berupa: a) partisipasi, melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya, b) evolusi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak, dan c) reformasi,

yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai.

4. Etika Sosial

a. Konsep Etika Sosial

Etika sosial merupakan etika yang berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang. Dan pembahasan bidang yang paling aktual saat ini adalah etika keluarga, etika sekolah, dan etika masyarakat.

b. Etika dalam Keluarga

Etika keluarga adalah sikap atau perilaku yang baik dalam hubungan keluarga baik antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tua atau sebaliknya. Etika dalam keluarga diklasifikasikan dalam etika suami-istri dan etika anak terhadap orang tua.

1) Etika suami Istri

Etika ini secara umum adalah sebagian berikut:

- a) Bersikap amanah terhadap pasangannya, dan tidak saling mengkhianatinya, ada sifat amanah, saling menasihati, jujur, dan ikhlas dalam semua urusan pribadi keduanya, dan urusan umum keduanya.
- b) Memberikan cinta kasih yang tulus kepada pasangannya sepanjang hidupnya
- c) Percaya terhadap pasangannya, dan tidak boleh meragukan kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya.

2) Etika Anak Terhadap Orang Tua

Seorang anak harus menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua dan taat pada orang tua. Kewajiban seorang anak hanya membalasnya

dengan tingkah dan sikap anak yang baik terhadap orang tua, membahagiakan atau membanggakan orang tua melalui prestasi dan keberhasilan anak. Orang tua bukan berarti hanya kedua orang tua yang melahirkan kita. Tetapi orang tua yang dimaksud di sini adalah orang yang lebih tua dari kita haruslah bersikap baik dengannya. Selain kewajiban anak terhadap orang tua, anak juga mempunyai hak terhadap orang tua, yaitu: mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan kehidupan yang layak.

c. Etika di Lingkungan Sekolah

1) Etika Guru

a) Etika terhadap Peraturan Perundang-undangan

Pada butir sembilan Kode Etik Guru Indonesia disebutkan bahwa “Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan” (PGRI, 1973). Guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan,

b) Etika Terhadap Organisasi Profesi

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesinya sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dalam dasar keenam dari Kode Etik Guru Indonesia dengan gamblang juga dituliskan bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan, dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Dasar ini sangat tegas mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu meningkatkan mutu dan martabat profesi guru itu sendiri.

c) Etika terhadap teman sejawat

Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial” Ini berarti bahwa:

- (1) Guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya
- (2) Guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya.

Dalam hal ini Kode Etik Guru menunjukkan kepada kita betapa pentingnya hubungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota profesi.

d) Etika Terhadap Anak Didik

Dalam Kode Etik Guru Indonesia dituliskan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dalam membimbing anak didiknya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan tiga kalimat padat yang terkenal yaitu *ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, dan Tut wuri handayani*.

e) Etika Terhadap Pimpinan

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Oleh sebab itu, sikap seorang guru terhadap pimpinan harus positif, dalam pengertian harus bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati, baik di sekolah maupun di luar sekolah.

2) Etika Siswa

a) Menghormati Guru

Beberapa contoh berikut bagaimana bersikap yang seharusnya kepada guru:

- (1) Menghormati guru, di mana pun, di sekolah maupun di luar sekolah
- (2) Mengucapkan salam seraya menyapa dengan rasa hormat saat berpapasan.
- (3) Memperhatikan dan mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran
- (4) Mengerjakan semua tugas pelajaran yang guru berikan.
- (5) Tidak mengejek, mengerjai dan tidak membicarakan kejelekan mereka.
- (6) Bertanya dengan sopan ketika menemui pelajaran yang kurang di pahami.
- (7) Menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara atau ketika bercakap-cakap dengan mereka.

b) Menghormati Peraturan Sekolah

Untuk menciptakan suasana yang tenteram dan tertib, maka dibuatlah suatu peraturan. Peraturan yang ada di sekolah khusus untuk pelaksanaan pendidikan di sekolah agar semua program

berjalan dengan baik, dan semua pihak wajib mematuhi. Sikap yang perlu ditunjukkan adalah: (1) Tidak meremehkan peraturan yang ada; (2) Mendukung pelaksanaannya demi ketertiban bersama; (3) Jika ada peraturan yang memberatkan, melalui perwakilan siswa, hal itu sebaiknya, di musyawarahkan dengan pihak sekolah tanpa melakukan hal yang negatif dan merusak.

c) Bersemangat dalam Belajar

Sikap yang harus dimiliki adalah: (1) Meneguhkan niat untuk menghilangkan kebodohan; (2) Tidak bermalasan dalam belajar; (3) Berusaha meningkatkan prestasi; (4) Berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari.

d) Sikap Terhadap Teman

Bekerja sama dengan teman dalam hal kebaikan serta berlomba dalam mencapai prestasi. Harus bisa memilah mana di antara mereka yang bisa diajak maju dan memberi motivasi serta kebaikan dalam mencari ilmu dan menggapai cita-cita.

d. Etika di Masyarakat

Dalam melakukan hubungan sosial di masyarakat diperlukan etika sebagai pedoman hidup dan kebiasaan yang baik untuk dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fakta tersebut menguatkan anggapan bahwa masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang berbudaya dan memiliki etika luhur dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Manfaat etika dalam bermasyarakat adalah:

- 1) Akan lebih dihargai tetangga dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Membawa masyarakat lebih mawas diri dalam bertindak.
- 3) Kehidupan bertetangga akan lebih hangat dan harmonis.
- 4) Terhindarnya konflik yang berarti.
- 5) Tercipta kerukunan dan rasa saling membantu.
- 6) Timbulnya empati kepada sesama.
- 7) Terciptanya rasa gotong royong.
- 8) Timbul keorganisasian yang bermanfaat

Contoh Etika dalam bermasyarakat, yaitu: etika pergaulan, etika dalam berkendara (lalu lintas), dan etika dalam berbagi informasi.

D. Lembar Kegiatan

Lembar Kegiatan 5.1 Anti kekerasan

Petunjuk Kegiatan :

- a) Amatilah Film Jembatan Pensil yang ditayangkan oleh Fasilitator!
- b) Analisislah kasus yang terdapat dalam video tersebut!
- c) Kerjakanlah pertanyaan dengan diskusi berkelompok!
- d) Berkomunikasilah secara santun dan saling menghargai pendapat dalam kelompok, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan baik!
- e) Buatlah proyek untuk kampanye antihokoaks, antibullying, pencegahan terhadap intoleransi, persekusi, dan ujaran kebencian! Kerjakan di kertas plano/manila/karton yang tersedia!
- f) Pajang hasil kerja kelompok dengan cara menempel di tempat yang disediakan!
- g) Presentasikan hasil diskusi dan hasil proyek sesuai kesepakatan dalam kelompok Saudara!
- h) Demonstrasikan kampanye antikekerasan dengan orasi, yel-yel dan alat peraga/gambar/poster dalam bahasa yang santun!

Dari tayangan film/video yang sudah dilihat bersama, identifikasikanlah tindakan kekerasan dalam video tersebut!

Jawaban :

Analisislah dengan menggunakan pola M-P-D-A-S (Masalah-Penyebab-Dampak- Alternatif Solusi- Solusi Segera) dari kasus tindak kekerasan tersebut!

Jawaban :

Masalah:

Penyebab:

Dampak

Alternatif Solusi:

Solusi Segera:

Sketsa:

Lembar Kegiatan 5.2 Anti korupsi

Petunjuk Kegiatan :

- a) Lakukan brainstorming di dalam kelompok tentang tindakan korupsi yang ditemukan di lingkungan sekitar beserta alasan mengapa tindakan tersebut dikatakan korupsi!
- b) Berikan contoh dan tulis di kertas post it, tempelkan di kertas plano! Presentasikan hasil diskusi kelompok!
- c) Simak tayangan video antikorupsi Produksi KPK! Analisis kasus tayangan korupsi dengan format MPDAS! Presentasikan hasil diskusi kelompok!
- d) Buat poster antikorupsi untuk sekolah dengan diilhami dari nilai dan prinsip antikorupsi! Pajang poster hasil kerja kelompok!
- e) Lakukan *Window shopping* (1 orang tinggal untuk menjelaskan alasan pemilihan poster, dan yang lain berkunjung ke kelompok2 yang lain)
- f) Masing-masing peserta (selain yang tinggal) memberikan tanda bintang kepada kelompok yang dianggap baik secara penyajian.
- g) Kelompok dengan perolehan bintang terbanyak akan mendapatkan lencana.
- h) Fasilitator memberikan penguatan!

Identifikasilah kasus tindak korupsi di lingkungan sekitar, berikan alasan mengapa tindak korupsi tersebut dapat terjadi ! Tulis pada tempat yang disediakan!

Jawaban :

Identifikasilah faktor-faktor yang menyebabkan korupsi pada film korupsi yang telah ditayangkan ! Analisislah dengan format M-P-D-A-S!

Masalah:

Penyebab:

Dampak

Alternatif Solusi:

Solusi Segera:

Buatlah poster antikorupsi untuk sekolah dengan diilhami dari nilai dan prinsip antikorupsi! Pajang poster hasil kerja kelompok!

Lembar Kegiatan 5.3 Etika Sosial

Petunjuk Kegiatan :

- Lakukan brainstorming dalam kelompok tentang konsep etika sosial!
- Tuliskan contoh-contoh etika sosial sesuai dengan pembagian kelompok! Tuliskan di kertas post it dan ditempel di kertas plano, dan pajang di tempat yang telah disediakan!
- Buatlah slogan / kata bijak tentang etika dalam pergaulan sosial! Tulis pada kertas yang disediakan!
- Presentasikan hasil diskusi kelompok dan diawali/diakhiri dengan yel-yel kelompok dan menunjukkan hasil karya slogan yang telah dibuat!

Jelaskan konsep etika sosial yang Saudara pahami!

Jawaban:

Identifikasilah contoh etika sosial sesuai pembagian kelompok! (Etika Lalu Lintas, Etika Sekolah, Etika Bermedsos)

Jawaban:

Buatlah slogan/kata bijak tentang etika sosial sesuai yang telah Saudara kerjakan, Tulis pada kertas yang disediakan!

Sketsa:

E. Refleksi

Refleksi Kegiatan Pembelajaran (KP) bersifat refleksi diri yang dilakukan oleh peserta secara individu, meliputi menjawab beberapa pertanyaan terbuka dan mengisi dua instrumen ketrampilan dan sikap. Jawablah pertanyaan dan isilah pernyataan di bawah ini dengan obyektif, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat Mengerjakan.

1. Pengalaman dan ide baru apa yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini?
2. Bagaimana Saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas?
3. Materi dan hal-hal apa yang belum Saudara pahami dalam kegiatan pembelajaran ini?
4. Bagaimana usaha Saudara dalam mengatasinya?
5. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Keterampilan pada KP 5

Pada Kegiatan Pembelajaran ini, Saudara telah mempelajari tentang Harmoni Sosial dengan mengerjakan LK 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 . Setelah mengerjakan LK tersebut, Saudara dapat melakukan penilaian diri untuk mengetahui kemampuan Saudara berada dalam posisi sangat terampil, terampil, cukup terampil ataukah kurang terampil. Penilaian diri tersebut sebagai refleksi Saudara dalam mengikuti Kegiatan Pembelajaran ini.

Berikut ini rubrik refleksi yang dapat Saudara gunakan ketika melakukan refleksi. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi kemampuan Saudara.

Kriteria	Tindak Lanjut	Kondisi
Sangat Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan ke bagian penutup.	
Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK akan tetapi masih memerlukan bantuan orang lain, maka Saudara perlu berlatih kembali secara mandiri untuk mengerjakan LK-LK tersebut.	
Cukup Terampil	Apabila Saudara belum terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu	

	berlatih kembali mengembangkan materi dengan berdiskusi dengan sesama peserta.	
Kurang Terampil	Apabila Saudara tidak terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu bantuan fasilitator/NS agar lebih terampil dan membaca kembali materi yang telah tersedia	

6. Instrumen Refleksi dalam Aspek Sikap

Setelah Saudara melakukan refleksi diri pada aspek keterampilan, selanjutnya lakukanlah penilaian diri untuk aspek sikap dengan mengisi instrumen refleksi berikut ini. Sikap yang perlu Saudara refleksi meliputi sikap religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong royong. Berilah tanda centang (✓) pada setiap nomor sesuai dengan kondisi Saudara.

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
1.	Saya memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa		
2.	Saya selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran		
3.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya		
4.	Saya mendukung peraturan yang telah disepakati bersama		
5.	Saya selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tuntas		
6.	Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu		
7.	Saya selalu berusaha mengembangkan ilmu yang telah diberikan		
8.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus diawasi dan sesuai dengan petunjuk		
9.	Saya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar		
10.	Saya siap bekerjasama dengan rekan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran		
Jumlah skor			

Pedoman Penskoran Hasil Refleksi Aspek Sikap

Bila Saudara menjawab:

- ✓ “Ya”, maka skor = 3
- ✓ “Kadang-kadang”, maka skor = 2
- ✓ “Tidak Pernah”, maka skor = 1

Konversi jumlah skor menjadi nilai:

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor perolehan}}{30} \times 100$$

Nilai	Kriteria
>90 - 100	Amat Baik
>80 - 90	Baik
>70 - 80	Cukup
>60 - 70	Sedang
≤60	Kurang

F. Daftar Pustaka

- Adwirman, S.H. dkk. 2014. *Buku Ajar Pendidikan anti Korupsi*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI. Cetakan I
- Affandi, Nurkholik. 2012. “Harmoni dalam Keragaman: Sebuah Analisis tentang Konstruksi Perdamaian Antar Umat Beragama” dalam *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, Vol: XV, No. 1.
- Astuti, Santi Indra. 2017. “Konstruksi Body of Knowledge Tentang Hoax di Indonesia: Upaya Merumuskan Landasan Strategi Hoax”. dalam *Kolase Komunikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aspikom dan Buku Litera
- Bappenas RI. 2002. *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*. Jakarta: Bappenas.

- Batennie, Faisal. 2012. "Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi". <http://stkip-ktb.ac.id/content/pendidikan-anti-korupsi-untuk-perguruan-tinggi> diakses 2 April 2014.
- Bertens K. 2013. *Etika*. Yogyakarta: Kanisius
- Cadman, David. 2017. "The Principles of Harmony" sebuah esai dalam <https://www.theharmonyproject.org.uk/principles-of-harmony-essays/>
- Chang, William. 2018. *Etika & Etiket Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius
- Hardiman, Fransisco Budi. 2010. *Ruang Publik*. Yogyakarta: Penerbit Kansius. .
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi* (Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: KPK
- Martono, Nanang. 2009. *Kekerasan Simbolik di Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti, Ali dkk. 2017. *Melawan Hoax di Media Sosial dan Media Massa*. Yogyakarta: Media Publishing
- Munar, August. 2018. *Membangun internalisasi Kecerdasan Anti Korupsi pada Usia Sekolah*. Yogyakarta : Deepublish
- Narwoko, Dwi J. dan Suyanto, Bagong. 2002. *Sosiologi Teks Terapan dan Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- National Center Against Bullying. 2018. *Types of Bullying*. dalam <https://www.amf.org.au/bullying-advice/bullying-for-parents/types-of-bullying/> diakses 12 Desember 2018.
- Pradiptyo, Rimawan. 2016. *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta :Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidin. 2007. *Reformasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika-CIDA.
- Priatna, Tedi. 2012. *Etika Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.

- Rosikah, Listianingsih. 2018. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktek)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sejiwa. 2008. *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Windhu, I. Marsana. 1992. *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius

Kegiatan Pembelajaran 6

BELA NEGARA

A. Kompetensi

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Memahami konsep bela negara sebagai wujud cinta tanah air
2. Menganalisis ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menjelaskan pengertian bela negara sesuai regulasi
2. Menganalisis tujuan bela negara
3. Menganalisis fungsi bela negara
4. Membedakan unsur-unsur bela negara
5. Mengevaluasi manfaat bela negara
6. Memberi contoh bentuk-bentuk bela negara
7. Menganalisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap ketahanan nasional
8. Menampilkan unjuk budaya sebagai wujud bela negara

C. Materi

1. Hakikat Bela Negara

a. Latar Belakang

Lebih dari tujuh dekade yang lalu atas nama bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi titik kulminasi dari akumulasi semangat perjuangan bangsa Indonesia melawan monopoli VOC, penindasan pemerintah kolonial Belanda, dan kekejaman fasis Jepang. Ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia telah mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa untuk mewujudkan impian kemerdekaan itu. Proklamasi kemerdekaan sekaligus juga menjadi titik nol bagi bangsa Indonesia untuk mulai mengisi kemerdekaan dalam bingkai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tak seperti negara-negara Barat, negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Warisan kolonial (*colonial legacy*) menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa. Selama puluhan tahun, bangsa tetap tidak lebih dari sekedar komunitas yang dibayangkan (*imagined community*); dan “kebangsaan” tetap merupakan proyek besar yang entah kapan akan berakhir. Sebab itu, dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi sekaligus tugas ganda bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*), selain menghadapi ancaman militer luar terhadap wilayahnya (Anggoro, 2003:3).

Sejatinya butuh waktu yang tidak singkat dan upaya yang tidak mudah bagi sebuah bangsa seperti Indonesia yang telah dijajah selama ratusan tahun untuk bangkit dan tumbuh menjadi bangsa yang bermartabat di mata internasional. Pemerintah dan rakyat Indonesia bahu-membahu bekerja keras melalui berbagai kegiatan pembangunan untuk memastikan bahwa negara Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain. Setelah sebagian mimpi itu tercapai, bukan berarti bangsa Indonesia telah selesai berjuang. Munculnya ancaman lokal, regional, dan global dalam beragam bentuk seyogyanya membangkitkan kesadaran bangsa ini untuk terus membangun kewaspadaan. Ancaman-ancaman tersebut harus ditangkal dengan ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjadi kata kunci jika bangsa Indonesia ingin tetap bertahan hingga ratusan tahun ke depan.

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bangsa Indonesia memiliki prinsip-prinsip bela negara sebagai berikut:

- 1) Kemerdekaan merupakan hak bagi semua/segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- 2) Pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 3) Hak dan kewajiban setiap warga negara adalah ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

4) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Upaya meningkatkan ketahanan nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan militer, tetapi juga melibatkan semua komponen bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus mencintai negara Indonesia. Setiap rakyat Indonesia harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pengorbanan harta, tenaga, dan nyawa para pejuang kemerdekaan menjadi contoh baik tentang bagaimana kecintaan pada tanah air dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa itu seharusnya diterapkan. Sikap dan perilaku inilah yang akan ditumbuhkembangkan dalam mata diklat Bela Negara.

b. Pengertian Bela Negara Sesuai regulasi

Bela negara adalah konsep yang ditentukan oleh undang-undang tentang patriotisme seorang individu, kelompok, atau komponen lain dari suatu negara. Tujuannya adalah untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara tersebut (<https://www.wantannas.go.id>).

Secara fisik, bela negara berarti mempertahankan negara dari serangan fisik atau agresi pihak luar yang mengancam keberlangsungan negara tersebut. Misalnya, jika Indonesia diserang negara lain, konsep bela negara mengatakan bahwa warga negara Indonesia harus mengangkat senjata melawan penyerang atau musuh demi melindungi keberlangsungan negara Indonesia. Secara nonfisik, konsep bela negara adalah upaya memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, kerja sosial, peningkatan moral, maupun upaya lainnya. Upaya bela negara ini dapat dilakukan sesuai profesi tiap warga negara.

Hal senada diungkapkan Widodo dkk (2015: 228) yang memaknai bela negara sebagai sikap dan perilaku negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara merupakan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara yang bukan saja dibangun di atas keyakinan akan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan, dan keyakinan untuk kenal menyerah. Keamanan negara dan bela negara disandarkan pada kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan.

Hakikat pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional (Setiono, 2017:8). Terkait hakikat tersebut, ada tiga pertanyaan mendasar tentang bela negara yang perlu dijawab guna lebih memahami makna bela negara itu sendiri. Pertama, “Apa yang harus dibela dari negara?”. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4 menyebutkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pasal tersebut menunjukkan bahwa yang harus dibela dari negara adalah kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kedua, “Mengapa negara harus dibela?”. Setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing yang terkadang berbenturan dengan lain. Kondisi tersebut membuat negara perlu *survive* mengingat semakin kuatnya persaingan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa sebuah negara akan tetap selamanya berdiri. Agar tetap berdiri, negara harus dibela dan dilindungi dari berbagai macam bentuk ancaman. Ketiga, “Siapa yang harus membela negara?”. Tugas membela negara tidak bisa hanya digantungkan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Sebagaimana sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), bela negara harus melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk di dalamnya seluruh warga negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, hingga partai politik (suprastruktur dan infrastruktur politik).

Bela negara merupakan hak dan kewajiban tiap warga negara. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR (2012) dijelaskan bahwa pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk memperteguhkan konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni bahwa upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada tanggapan bela negara hanya berkaitan dengan militer atau militerisme. Tidak benar pula bahwa kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak di pundak Tentara Nasional Indonesia. Hal ini berarti setiap warga negara berhak ikut serta dalam menentukan

kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara juga wajib ikut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing.

Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Pasal tersebut juga menggariskan bahwa syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang (Widodo, 2015: 228-229). Hak dan kewajiban bela negara juga diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

Namun, upaya bela negara sesungguhnya bukan sekedar hak dan kewajiban warga negara. Bela negara merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa (Agus, 2015:251).

Peraturan perundang-undangan lainnya yang pernah ada yang mengatur bela negara adalah sebagai berikut:

- 1) Tap MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI
- 2) TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI
- 3) TAP MPR Nomor VI Tahun 1973 tentang Konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 6) Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 1988
- 8) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat

c. Tujuan Bela Negara

Upaya bela negara (www.wantannas.go.id) bertujuan untuk:

- 1) Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara
- 2) Melestarikan budaya

- 3) Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
- 4) Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara
- 5) Menjaga identitas dan integritas bangsa/negara

d. Fungsi Bela Negara

Selain memiliki tujuan, bela negara juga memiliki fungsi (www.wantannas.go.id), yaitu:

- 1) Mempertahankan negara dari berbagai ancaman
- 2) Menjaga keutuhan wilayah negara
- 3) Merupakan kewajiban setiap warga negara
- 4) Merupakan panggilan sejarah

e. Unsur-Unsur Bela Negara

Menurut Widodo dkk (15:229) unsur-unsur dasar bela negara adalah sebagai berikut:

- 1) Cinta tanah air
- 2) Kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Yakin Pancasila sebagai ideologi negara
- 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara
- 5) Memiliki kemampuan awal bela negara

f. Manfaat Bela Negara

Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara (www.wantannas.go.id):

- 1) Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain
- 2) Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antarsesama rekan seperjuangan
- 3) Membentuk mental dan fisik yang tangguh
- 4) Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri
- 5) Melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri atau kelompok
- 6) Membentuk keimanan dan ketakwaan pada agama yang dianut oleh individu
- 7) Berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama
- 8) Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan
- 9) Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin
- 10) Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli pada sesama

g. Bentuk/Wujud Bela Negara

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dengan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Kesadaran bela negara itu pada hakikatnya adalah kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus hingga yang paling keras; mulai dari hubungan baik sesama warga negara hingga bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Di dalam kesadaran bela negara tercakup sikap untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bentuk/wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yurisdiksi nasional, nilai-nilai Pancasila, dan UUD 1945 (Widodo dkk, 2015: 228). Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui:

- 1) pendidikan kewarganegaraan
- 2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- 3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib
- 4) pengabdian sesuai dengan profesi

Selain itu, kesadaran bela negara juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan negara. Berikut ini adalah contoh upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan:

- 1) Di lingkungan keluarga
 - a) Menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga
 - b) Membentuk keluarga sadar hukum
- 2) Di lingkungan masyarakat
 - a) Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama
 - b) Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat
- 3) Di lingkungan sekolah
 - a) Meningkatkan imtak dan iptek
 - b) Menaati tata tertib sekolah
- 4) Di lingkungan negara
 - a) Mematuhi peraturan hukum yang berlaku
 - b) Membayar pajak tepat pada waktunya

h. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan terhadap Ketahanan Nasional

Luasnya wilayah yurisdiksi nasional belum diimbangi dengan kekuatan pertahanan negara yang memadai. Akibatnya, muncul potensi terjadinya berbagai ancaman dan gangguan keamanan, baik di darat, laut maupun wilayah udara nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengintegrasian komponen pertahanan negara, baik yang ada pada pertahanan militer maupun pertahanan nonmiliter dari pusat sampai ke daerah (Lampiran Permenhan Nomor 16 Tahun 2012 halaman 6). Berikut ini dipaparkan pengertian dan contoh ancaman- tantangan, hambatan, dan gangguan.

1) Ancaman

Ancaman adalah semua usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Bentuk-bentuk ancaman tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, dalam bentuk yang lain ancaman dikelompokkan menjadi ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri atau dari dalam negeri. Jenis-jenis ancaman militer terhadap pertahanan dan keamanan negara itu diuraikan sebagai berikut:

a) Ancaman dari luar negeri

- Agresi
- Pelanggaran wilayah oleh negara lain
- Spionase (mata-mata)
- Sabotase
- Aksi teror dari jaringan internasional

b) Ancaman dari dalam negeri

- Pemberontakan bersenjata
- Konflik horizontal
- Aksi teror
- Sabotase
- Aksi kekerasan yang berbau SARA
- Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)

- Pengrusakan lingkungan

Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, informasi dan teknologi, serta keselamatan umum. Contohnya antara lain perang urat syaraf (*brain war*), perang proksi (*proxy war*), konflik ideologi, perbedaan keunggulan antarnegara, persaingan ekonomi, persaingan iptek, dan sebagainya.

Bentuk-bentuk ancaman nonmiliter dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu (1) ancaman yang berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya penyebaran penyakit sebagai bagian dari perang biologis; dan (2) ancaman yang tidak berkaitan langsung dengan pertahanan negara, misalnya penyebaran penyakit secara alamiah, baik epidemik maupun pandemik. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 dapat digolongkan ke dalam ancaman nonmiliter (Abidin dkk, 2014: 42-43).

Pada tingkat strategi untuk dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman, masalah yang dihadapi adalah bagaimana merumuskan ancaman tersebut secara lebih realistis. Untuk beberapa tahun ke depan, keamanan terhadap ancaman internal masih akan mendominasi pemikiran strategis di Indonesia. Pluralisme sosial, ketimpangan ekonomi, dan disparitas regional akan menjadikan upaya bina-bangsa dan bina-negara menjadi soal serius. Indonesia adalah suatu entitas politik (negara) yang dibangun di atas fondasi pluralitas. Persatuan Indonesia seperti diikrarkan dalam Sumpah Pemuda 1928 selama ini lebih direkat oleh *common history* antikolonialisme. Negara Proklamasi 17 Agustus mempunyai tanggungjawab untuk bina-bangsa (Anggoro, 2003:7).

2) Tantangan

Tantangan adalah semua hal atau usaha yang dapat menggugah kemampuan. Contoh tantangan itu menurut Prayetno (2015: 584) antara lain adalah:

- a) perdagangan dan penyelundupan obat terlarang
- b) pencucian uang

- c) penyelundupan senjata
- d) penyelundupan manusia
- e) bajak laut
- f) kejahatan ekonomi internasional
- g) kejahatan melalui internet

Contoh tantangan menurut Jusuf (2008: 394) antara lain:

- a) Wilayah perbatasan relatif jauh dari pantauan pemerintah pusat
- b) Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai
- c) Kecenderungan masyarakat setempat kepada negara tetangga
- d) Penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan tertentu
- e) Maraknya penyelundupan
- f) Pemalsuan dokumen
- g) Pemanfaatan jalan setapak
- h) Terjalannya hubungan keluarga di antara masyarakat perbatasan
- i) Tenaga kerja
- j) Banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan
- k) Kesenjangan tingkat ekonomi

3) Hambatan

Hambatan adalah semua usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Contoh hambatan antara lain sebagai berikut:

- a) Sikap apatis terhadap perubahan/kemajuan
- b) Sikap kurang percaya diri
- c) Mudah merasa puas dengan pencapaian kinerja
- d) Sikap individualistik/tidak mau bekerjasama dengan orang lain
- e) Sikap kurang disiplin
- f) Sikap tidak mau bekerja keras

4) Gangguan

Gangguan adalah semua hal atau usaha yang berasal dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah). Contoh gangguan antara lain sebagai berikut:

- a) Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
- b) Pelanggaran wilayah laut oleh kapal-kapal asing
- c) Intervensi asing terhadap masalah dalam negeri
- d) Kasus-kasus TKI di luar negeri
- e) Hubungan dengan negara tetangga yang kurang harmonis

i. Unjuk Budaya Sebagai Wujud Bela Negara

Menampilkan pertunjukan seni budaya sebagai upaya pelestarian budaya nasional dalam menjaga identitas bangsa dan negara.

D. Lembar Kegiatan

LK. 6.1 Pengamatan diri

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai keyakinan ideologi negara. Salah satu wujud rasa cinta tanah air adalah mencintai produk dalam negeri. Namun demikian, saat ini produk-produk luar negeri membanjiri kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal tersebut pada aktivitas lembar kerja ini Anda diminta untuk mengidentifikasi barang-barang yang Anda gunakan saat ini. Setelah itu Anda diminta untuk melakukan refleksi berdasarkan hasil identifikasi tersebut.

Nama Peserta:

No.	Jenis Barang	Asal Produk	Alasan Pemilihan Produk

Refleksi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Komitmen:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

LK. 6.2 Ancaman dan solusi yang harus diselesaikan

Masing-masing kelompok menganalisis satu jenis ancaman dengan menggunakan format yang tersedia!

Kelompok:

Anggota : 1.

2.

3.

No	Jenis Ancaman	Contoh Ancaman	Upaya Pencegahan (sebelum terjadi)	Alternatif Penanganan (ketika/setelah terjadi)	Ket
1					

Masing-masing kelompok membuat kesimpulan hasil analisis permasalahan dan solusi bela negara dengan menggunakan bentuk (pilih salah satu) dari:

1. Pantun
2. Puisi
3. Kata-kata Mutiara (closing statement dengan menggunakan diksi/gaya bahasa yang indah)
4. Lagu

LK. 6.3. Unjuk Budaya

Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara. Bela negara tidak hanya bisa dimaknai sebagai kegiatan fisik semata yang bersifat militeristik sebagai bentuk pertahanan menghadapi ancaman dan serangan dari luar yang membahayakan eksistensi negara. Namun, bela negara dapat diwujudkan dalam bentuk yang lain, seperti pendidikan, sosial, dan budaya.

Untuk lebih menjiwai makna budaya sebagai wujud bela negara secara aplikatif buatlah sebuah konsep unjuk budaya secara berkelompok. Tampilkanlah konsep unjuk budaya tersebut untuk masing-masing kelompok secara bergiliran di depan kelas.

Masing-masing kelompok menampilkan unjuk budaya dalam durasi waktu @ 25-30 menit.

Nama Kelompok:

Judul	Deskripsi	Makna

E. Refleksi

Refleksi Kegiatan Pembelajaran (KP) bersifat refleksi diri yang dilakukan oleh peserta secara individu, meliputi menjawab beberapa pertanyaan terbuka dan mengisi dua instrumen ketrampilan dan sikap. Jawablah pertanyaan dan isilah pernyataan di bawah ini dengan obyektif, jujur, dan bertanggung jawab. Selamat Mengerjakan.

1. Pengalaman dan ide baru apa yang Saudara dapatkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini?
2. Bagaimana Saudara menerapkan pengalaman dan ide baru yang didapatkan ke dalam pembelajaran di kelas?
3. Materi dan hal-hal apa yang belum Saudara pahami dalam kegiatan pembelajaran ini?
4. Bagaimana usaha Saudara dalam mengatasinya?

Pada Kegiatan Pembelajaran ini, Saudara telah mempelajari tentang Bela Negara dengan mengerjakan LK 6.1, 6.2, dan 6.3. Setelah mengerjakan LK tersebut, Saudara dapat melakukan penilaian diri untuk mengetahui kemampuan Saudara berada dalam posisi sangat terampil, terampil, cukup terampil atautkah kurang terampil. Penilaian diri tersebut sebagai refleksi Saudara dalam mengikuti Kegiatan Pembelajaran ini.

Berikut ini rubrik refleksi yang dapat Saudara gunakan ketika melakukan refleksi. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kondisi kemampuan Saudara.

Kriteria	Tindak Lanjut	Kondisi
Sangat Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK dengan baik, maka Saudara bisa melanjutkan ke bagian penutup.	
Terampil	Apabila Saudara terampil dalam mengerjakan semua LK akan tetapi masih memerlukan bantuan orang lain, maka Saudara perlu berlatih kembali secara mandiri untuk mengerjakan LK-LK tersebut.	
Cukup Terampil	Apabila Saudara belum terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu berlatih kembali mengembangkan materi dengan berdiskusi dengan sesama peserta.	

Kurang Terampil	Apabila Saudara tidak terampil dalam mengerjakan semua LK maka Saudara perlu bantuan fasilitator/NS agar lebih terampil dan membaca kembali materi yang telah tersedia	
------------------------	--	--

5. Mengisi Instrumen Refleksi dalam Aspek Sikap pada KP 6

Setelah Saudara melakukan refleksi diri pada aspek keterampilan, selanjutnya lakukanlah penilaian diri untuk aspek sikap dengan mengisi instrumen refleksi berikut ini. Sikap yang perlu Saudara refleksi meliputi sikap religius, nasionalisme, integritas, mandiri dan gotong royong. Berilah tanda centang (✓) pada setiap nomor sesuai dengan kondisi Saudara.

No	Pernyataan	Ya	Kadang-Kadang	Tidak Pernah
1.	Saya memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan berdoa			
2.	Saya selalu hadir tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran			
3.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya			
4.	Saya mendukung peraturan yang telah disepakati bersama			
5.	Saya selalu siap mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tuntas			
6.	Saya selalu mengerjakan tugas tepat waktu			
7.	Saya selalu berusaha mengembangkan ilmu yang telah diberikan			
8.	Saya mengerjakan tugas yang diberikan tanpa harus diawasi dan sesuai dengan petunjuk			
9.	Saya menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan benar			
10.	Saya siap bekerjasama dengan rekan dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran			
Jumlah skor				

Pedoman Penskoran Hasil Refleksi Aspek Sikap

Bila Saudara menjawab:

- ✓ “Ya”, maka skor = 3
- ✓ “Kadang-kadang”, maka skor = 2
- ✓ “Tidak Pernah”, maka skor = 1

Konversi jumlah skor menjadi nilai:

$$\text{NILAI} = \frac{\text{Skor perolehan}}{30} \times 100$$

Nilai	Kriteria
>90 - 100	Amat Baik
>80 - 90	Baik
>70 - 80	Cukup
>60 - 70	Sedang
≤60	Kurang

F. Daftar Pustaka

- Abidin, Zaenal dkk. 2014. *Buku Ajar Pendidikan Bela Negara*. Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.
- Agung, IGBW. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Bela Negara*. UPT Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa. Bali: Universitas Udayana.
- Agus, A. Aco. 2015. *Urgensi Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia*. Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM, Volume 1 Edisi 2 Tahun 2015, halaman 247-257.
- Anggoro, Kusnanto. 2003. *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003.

- Jusuf, A. Gani. 2008. *Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Pengembangan Kualitas Materi Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jurnal Socioteknologi Edisi 13 Tahun 7 April 2008.
- LAN. 2017. *Kesiapsiagaan Bela Negara, Modul Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor: 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris Berbaris.
- Prayetno. 2015. *Kerja sama Komunitas ASEAN 2015 dalam Menghadapi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan)*. Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Terbuka, UTCC, 26 Agustus 2015, halaman 577-586.
- Setiono, Kup Yanto. 2017. *Bela Negara dalam Perspektif Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara*. Majalah WIRA Edisi Khusus. Puskom Publik Kemhan. Halaman 6-14.
- Subagyo, Agus. 2014. *Bela Negara: Peluang dan Tantangan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/611/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Pengesahan Peraturan Baris Berbaris Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PBB-ABRI).
- Widodo, Wahyu dkk. 2015. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

SUPLEMEN PERATURAN BARIS-BERBARIS

1. Peraturan Baris-Berbaris

Dasar Peraturan Baris-Berbaris (PBB) yang digunakan pada modul ini adalah Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Baris-Berbaris yang menggantikan Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: SKEP/611/N 85 Tanggal 8 Oktober 1985.

a. Pengertian Baris-Berbaris

Baris-berbaris adalah sebuah wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup sehingga terbentuk watak tertentu. Baris-berbaris mencakup aba-aba dan gerakan-gerakan yang harus dilakukan sesuai pedoman atau peraturan tertentu. Latihan baris-berbaris dapat menyiapkan kesempataan jasmani peserta. Latihan baris-berbaris juga dapat membina watak disiplin, kerjasama, kesetiakawanan, dan sikap-sikap positif lainnya. Bagi pendidik, sikap disiplin dan kerjasama sangat penting untuk menunjang layanan prima di bidang pendidikan. Jadi, latihan baris-berbaris secara tidak langsung dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas pendidik di satuan pendidikan.

b. Manfaat Baris-Berbaris

Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan, disiplin, sehingga dengan demikian peserta diklat senantiasa dapat mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan individu dan secara tidak langsung juga menanamkan rasa tanggung jawab.

Menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok tersebut dengan sempurna. Pengertian rasa persatuan adalah adanya rasa senasib sepenanggungan serta terbangunnya ikatan batin yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas; Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas diatas kepentingan individu yang hakekatnya tidak lain daripada keikhlasan

menyisihkan pilihan hati sendiri. Rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak

yang mengandung resiko terhadap dirinya tetapi menguntungkan tugas atau sebaliknya tidak mudah melakukan tindakan yang akan dapat merugikan kelompok.

c. Perbedaan PBB Lama dan Baru

Tabel 3. Perbedaan PBB Lama dan Baru

NO	SKEP/611/X 1985 (LAMA)	PERPANG TNI NO 46/2014 (BARU)
1	Sikap sempurna duduk di kursi dan bersila (tidak ada)	Sikap sempurna duduk di kursi dan bersila (ada)
2	Sikap sempurna Wan TNI duduk di kursi dan bersila (tidak ada)	Sikap sempurna Wan TNI duduk di kursi dan bersila (ada)
3	Sikap istirahat duduk di kursi dan bersila (tidak ada)	Sikap istirahat duduk di kursi dan bersila (ada)
4	Periksa kerapian biasa	Periksa kerapian dan periksa kerapian parade
5	Lencang depan mengepal	Lencang depan menggenggam
6	Perubahan arah hadap serong kanan/kiri dengan mengangkat kaki kanan/kiri kurang dari 20 cm	Perubahan arah hadap serong kanan/kiri dengan mengangkat kaki kanan/kiri kurang selebar bahu sejajar kurang lebih 20 cm
7	Langkah biasa 70 cm/96 menit Langkah tegap 70 cm/96 menit Langkah tegap posisi telapak kaki rata-rata air sejajar dengan tanah	Langkah biasa 70 cm/103 menit Langkah tegap 70 cm/103 menit Langkah tegap posisi telapak kaki tegak
8	Cara menghadap / keluar barisan (tidak ada)	Cara menghadap / keluar barisan (ada)
9	Punggung senjata, jinjing senjata dan kalungkan senjata (tidak ada)	Punggung senjata, jinjing senjata dan kalungkan senjata (ada)
10	Gelar perlengkapan (tidak ada)	Gelar perlengkapan (ada)
11	Membawa benda / Map dan tongkat komando (tidak ada)	Membawa benda / Map dan tongkat komando (ada)

12	Aba-aba "BUBAR JALAN" (ada)	Aba-aba "BUBAR JALAN" (tidak ada)
13	Tangan kiri / kanan senjata (tidak ada)	Tangan kiri / kanan senjata (ada)

d. Aba-aba

Aba-aba adalah perintah yang diberikan oleh seorang komandan/pemimpin/pejabat yang ditunjuk kepada pasukan/sekelompok orang untuk dilaksanakan pada waktunya secara serentak atau berturut-turut dengan tepat dan tertib. Aba-aba terdiri dari 3 macam, yaitu:

- a. Aba-aba petunjuk adalah dipergunakan hanya jika perlu, untuk menegaskan maksud dari pada aba-aba peringatan/pelaksanaan. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan/pelaksanaan. Contoh: "UNTUK PERHATIAN", "KEPADA KOMANDAN KOMPI" atau "KOMPI A".
- b. Aba-aba peringatan adalah inti perintah yang harus jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh: "LENCANG KANAN", "DUDUK SIAP" atau "ISTIRAHAT DI TEMPAT".
- c. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk/peringatan dengan cara serentak atau berturut-turut. Contoh: "GERAK", "JALAN" atau "MULAI".

e. Gerakan di Tempat

- a. **Sikap sempurna** adalah sikap siap posisi berdiri dan duduk di kursi maupun duduk bersila.

Ketentuan umum dalam sikap sempurna sebagai berikut:

- a) Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat.
- b) Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas:
 - Pada posisi berdiri "SIAP = GERAK".
 - Pada posisi duduk "DUDUK SIAP = GERAK".

- b. **Sikap istirahat** adalah sikap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rilek bagi Peserta tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap- tiap bentuk posisi sikap istirahat.

Ketentuan umum dalam istirahat sebagai berikut:

- a) Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna.
- b) Aba-aba dalam sikap istirahat adalah:
 - Istirahat biasa "ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK".
 - Istirahat perhatian "UNTUK PERHATIAN, ISTIRAHAT

DITEMPAT = GERAK”.

- Istirahat Parade “PARADE, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK”.

c. Periksa kerapian adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan dua cara biasa dan parade dilakukan untuk memperbaiki dan merapihkan pakaian dan perlengkapan yang melekat pada tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda. Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

Ketentuan umum dalam periksa kerapian sebagai berikut:

- a) Diawali dari posisi istirahat.
- b) Khusus dilaksanakan pada pasukan yang dalam posisi berdiri
- c) Aba-aba dalam periksa kerapian:
 - Periksa kerapian biasa “PERIKSA KERAPIHAN = MULAI = SELESAI “.
 - Periksa kerapian parade “PARADE PERIKSA KERAPIHAN = MULAI = SELESAI “.

d. Berhitung

Berhitung dapat dilakukan dalam format barisan bersaf atau berbanjar dengan urutan sebagai berikut:

- a) Dari sikap sempurna berdiri
- b) Aba-aba: “HITUNG = MULAI”.
- c) Pelaksanaan

e. Lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri, dan lencang depan

Ketentuan umum sebagai berikut:

- a) Pasukan dalam posisi sikap sempurna.
- b) Aba-aba sebagai berikut:
 - Untuk lencang kanan/kiri “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “.
 - Untuk setengah lengan lencang kanan/kiri “SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK “.
 - Untuk lencang depan “LENCANG DEPAN = GERAK”.
 - Dilaksanakan dalam formasi bersaf dan berbanjar.

f. Perubahan arah gerakan di tempat.

Ketentuan umum pelaksanaan perubahan arah gerakan ditempat tanpa senjata diatur sebagai berikut:

- a) Semua gerakan diawali dari posisi sikap sempurna.

b) Gerakan perubahan arah meliputi:

- Hadap kanan, aba-aba "HADAP KANAN = GERAK".
- Hadap kiri, aba-aba "HADAP KIRI = GERAK".
- Serong kanan, aba-aba "HADAP SERONG KANAN = GERAK".
- Serong kiri, aba-aba "HADAP SERONG KIRI = GERAK".
- Balik kanan, aba-aba "BALIK KANAN = GERAK".

g. Membuka/menutup barisan:

Ketentuan Buka barisan.

- a) Diawali dari posisi sikap sempurna dengan formasi berbanjar.
- b) Aba-aba adalah "BUKA BARISAN = JALAN".
- c) Pada aba-aba pelaksanaan banjar kanan dan kiri melangkah satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan banjar tengah tetap ditempat.

Ketentuan tutup barisan.

- a) Diawali dari posisi sikap sempurna dengan formasi berbanjar.
- b) Aba-aba adalah "TUTUP BARISAN = JALAN".
- c) Pada aba-aba pelaksanaan banjar kanan dan kiri melangkah satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.

h. Gerakan jalan ditempat.

Ketentuan umum jalan ditempat:

- a) Diawali dari posisi berdiri sikap sempurna.
- b) Aba-aba jalan ditempat adalah "JALAN DI TEMPAT = GERAK".

f. Gerakan Berjalan

Panjang, tempo, dan macam langkah:

- 1) Langkah biasa 65 cm/103 tiap menit.
- 2) Langkah tegap/defile 65 cm/103 tiap menit.
- 3) Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
- 4) Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
- 5) Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
- 6) Langkah berlari 80 cm/165 tiap menit.

Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

- 1) Langkah biasa** adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah tumit lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya.
Aba-aba: “MAJU = JALAN”.
- 2) Langkah tegap** adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan diberi hormat terhadap pasukan, Pos jaga kesatrian, penghormatan terhadap Pati serta digunakan untuk kegiatan- kegiatan tertentu.
Aba-aba: “LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN”.
- 3) Langkah defile** adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba “LANGKAH DEFILE MAJU = JALAN”. Digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan Irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.
- 4) Langkah ke samping** adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kiri/ke kanan untuk menghindarkan aba-aba “Berhenti. Jumlah langkah maksimal 4 langkah yang diucapkan pada aba-aba peringatan, dimulai melangkah dengan kaki kiri.
Aba-aba: “(jumlah langkah) LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN”.
- 5) Langkah ke belakang** adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kebelakang untuk menghindarkan aba-aba “Berhenti”. Jumlah langkah maksimal 4 langkah yang diucapkan pada aba-aba peringatan, dimulai melangkah dengan kaki kiri.
Aba-aba: “(jumlah langkah) LANGKAH KE KEBELAKANG = JALAN”.
- 6) Langkah ke depan** adalah memindahkan pasukan/sebagian dari pada pasukan sebanyak-banyaknya 4 langkah ke depan. Cara melangkah adalah seperti langkah tegap tetapi dengan tempo yang lebih lambat serta langkah yang lebih pendek serta tidak melenggang.
Aba-aba: “(jumlah langkah) LANGKAH KE DEPAN = JALAN”.
- 7) Langkah lari** adalah langkah melayang yang dimulai dengan menghentakkan kaki kiri 1 langkah, telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan dengan

panjang langkah 80 cm dan tempo langkah 165 tiap menit.

- a) dari sikap sempurna, aba-aba: "LARI MAJU = JALAN".
- b) dari langkah biasa, aba-aba: "LARI = JALAN".
- c) dari langkah berlari ke langkah biasa, aba-aba: "LANGKAH BIASA = JALAN".

8) Langkah merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh jalan jauh/lapangan yang tidak rata. Peserta tetap dilarang meninggalkan barisan. Peserta berjalan bebas tanpa terikat dengan ketentuan baik panjang, macam, dan tempo langkah.

Dari langkah biasa, aba-aba: "LANGKAH MERDEKA = JALAN".

9) Ganti langkah

- a) Dari langkah biasa atau langkah tegap.
- b) Aba-aba: "GANTI LANGKAH= JALAN".

10) Berkumpul

Apabila lebih dari 9 orang selalu berkumpul dalam bersaf 3 atau berbanjar 3, kalau kurang dari 9 orang menjadi bersaf/berbanjar satu. Meluruskan ke depan hanya digunakan dalam berbentuk berbanjar. Penunjukan penjurur tidak berdasarkan kepangkatan.

- a) Berkumpul formasi bersaf, aba-aba: "BERSAF KUMPUL = MULAI "SELESAI".
- b) Berkumpul formasi berbanjar, aba-aba: "BERBANJAR KUMPUL = MULAI".

11) Perubahan arah berjalan ke berhenti

- a) Berhenti, aba-aba: "HENTI = GERAK".
- b) Hadap kanan/kiri berhenti.
- c) Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRIHENTI=GERAK".
- d) Hadap serong kanan/kiri berhenti.
- e) Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRIHENTI= GERAK".
- f) Balik kanan henti,
- g) Aba-aba: "BALIK KANAN HENTI = GERAK".

12) Gerakan perubahan arah dari berhenti ke berjalan

- a) Hadap kanan/kiri maju jalan.
Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN".
- b) Hadap serong kanan/kiri.
Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU =JALAN".

- c) Balik kanan maju jalan.
Aba-aba: "BALIK KANAN MAJU = JALAN".
- d) Belok kanan/kiri maju jalan.
Aba-aba: "BELOK KANAN/KIRI MAJU =JALAN".
- e) Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri maju jalan, aba-aba:
"TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU =
JALAN".

13) Gerakan perubahan arah dari berjalan ke berjalan, atau dari berlari ke berlari.

- a) Hadap kanan/kiri maju jalan.
Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRI MAJU=JALAN".
- b) Hadap serong kanan/kiri maju jalan
Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN".
- c) Balik kanan maju jalan,
Aba-aba: "BALIK KANAN MAJU = JALAN".
- d) Belok kanan/kiri maju jalan
Aba-aba: "BELOK KANAN/KIRI = JALAN".
- e) Dua kali belok kanan/kiri maju jalan
Aba-aba: "DUA KALI BELOK KANAN/KIRI = JALAN".
- f) Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri.
Aba-aba: "TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI =
JALAN".

14) Gerakan haluan kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk bersaf, guna merubah arah tanpa merubah bentuk

- a) Dari berhenti ke berhenti.
Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI = JALAN".
- b) Dari berhenti ke berjalan.
Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI MAJU=JALAN".
- c) Dari berjalan ke berhenti.
Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI = JALAN".

d) Dari berjalan ke berjalan.

Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRIMAJU = JALAN".

15) Gerakan melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar guna merubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap.

a) Dari berhenti ke berhenti.

Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI=JALAN".

b) Dari berhenti ke berjalan.

Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI MAJU = JALAN".

c) Dari berjalan ke berhenti.

Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI = JALAN".

d) Dari berjalan ke berjalan.

Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI MAJU = JALAN".

2. Gerakan di Tempat

a. Sikap sempurna adalah sikap siap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sika tidak ada gerakan bagi Peserta tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap-tiap bentuk posisi sikap sempurna.

Ketentuan umum dalam sikap sempurna sebagai berikut:

1) Sikap sempurna diawali dari sikap istirahat.

2) Aba-aba dalam sikap sempurna terdiri atas:

a) Pada posisi berdiri "SIAP = GERAK".

b) Pada posisi duduk "DUDUK SIAP = GERAK".

Pelaksanaan sikap sempurna posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Sikap berdiri badan tegak.

2) Kedua tumit rapat dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°.

3) Lutut lurus dan paha dirapatkan, tumpuan berat badan dibagi atas kedua kaki.

4) Perut ditarik dan dada dibusungkan.

5) Pundak ditarik sedikit kebelakang dan tidak dinaikkan.

6) Kedua tangan lurus dan rapat disamping badan, pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggenggam tidak terpaksa dirapatkan pada paha.

- 7) Punggung ibu jari menghadap kedepan merapat pada jahitan celana.
- 8) Leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang.
- 9) Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.

Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk di kursi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sikap duduk dengan badan tegak, punggung tidak bersandar pada sandaran kursi.
- 2) Kedua tumit dirapatkan dengan kedua telapak kaki membentuk sudut 45°.
- 3) Berat badan bertumpu pada pinggul.
- 4) Lutut dan paha dibuka selebar bahu.
- 5) Khusus peserta wanita saat menggunakan rok lutut dan paha dirapatkan.
- 6) Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya.
- 7) Kedua tangan menggenggam lurus kedepan diletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap keatas.
- 8) Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya.
- 9) Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.

Pelaksanaan sikap sempurna posisi duduk bersila diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Sikap duduk bersila dengan badan tegak.
- 2) Kaki kiri berada di bawah kaki kanan.
- 3) Berat badan bertumpu pada pinggul.
- 4) Perut ditarik dan dada dibusungkan sewajarnya.
- 5) Kedua tangan menggenggam lurus kedepandiletakkan di atas lutut dengan punggung tangan menghadap keatas.
- 6) Leher lurus, dagu ditarik ke belakang sewajarnya.
- 7) Mulut ditutup, pandangan mata lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.
- 8) Peserta Wanita yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat dibawah pinggul posisi lutut di depan rapat.

b. Sikap istirahat adalah sikap posisi berdiri dan duduk dalam pelaksanaannya sikap rilek bagi Peserta tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada tiap- tiap bentuk posisi sikap istirahat.

Ketentuan umum dalam istirahat sebagai berikut:

- 1) Sikap istirahat diawali dari sikap sempurna.
- 2) Aba-aba dalam sikap istirahat adalah:
 - a) Istirahat biasa “ISTIRAHAT DI TEMPAT = GERAK”.
 - b) Istirahat perhatian “UNTUK PERHATIAN, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK”.
 - c) Istirahat Parade “PARADE, ISTIRAHAT DITEMPAT = GERAK”.
- 3) Khusus gerakan istirahat perhatian dan parade, pandangan mata ditujukan kepada yang memberi perhatian maksimal 45°.

Pelaksanaan sikap istirahat posisi berdiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kaki kiri dipindahkan kesamping kiri, dengan jarak selebar bahu.
- 2) Kedua belah tangan dibawa kebelakang, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk tepat dipergelangan tangan kanan.
- 3) Punggung tangan kiri diletakkan dipinggang/kopelrim.
- 4) Tangan kanan menggenggam.
- 5) Pandangan mata tetap lurus ke depan.
- 6) Khusus istirahat parade posisi kedua kepalan tangan diletakkan di atas pinggang/kopelrim bagian belakang.

Pelaksanaan sikap istirahat posisi duduk di kursi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kedua kaki dibuka selebar bahu.
- 2) Peserta wanita yang menggunakan celana panjang kedua tumit dan lutut tetap dibuka selebar bahu. Peserta wanita yang menggunakan rok, tumit dan lutut tetap rapat.
- 3) Badan dikendorkan.
- 4) Lengan dibengkokkan/ditekuk, jari-jari tangan dibuka, punggung tangan menghadap keatas, tangan kiri diletakkan di atas paha kiri dan tangan kanan di atas paha kanan.
- 5) Pandangan mata lurus ke depan.

Pelaksanaan sikap istirahat posisi duduk bersila diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Badan dikendorkan.
- 2) Kedua lengan dibengkokkan didepan badan, dan kedua lengan bersandar diatas paha.

- 3) Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan ibu jari dan jari telunjuk, punggung kedua tangan menghadap ke atas.
 - 4) Kedua kaki tetap bersila rapat.
 - 5) Kaki kiri berada di bawah kaki kanan di atas.
 - 6) Tumpuan berat badan bertumpu pada pinggul.
 - 7) Pandangan lurus kedepan.
 - 8) Peserta Wanita yang menggunakan celana panjang mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - 9) Peserta Wanita yang menggunakan rok, kedua kaki dilipat dibawah pinggul posisi lutut di depan rapat.
- c. Periksa kerapian** adalah suatu kegiatan dengan posisi berdiri yang dilaksanakan dengan dua cara biasa dan parade dilakukan untuk memperbaiki dan merapihkan pakaian dan perlengkapan yang melekat pada tubuh dengan ketentuan yang telah diatur pada kedua cara yang berbeda. Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama- sama.

Ketentuan umum dalam periksa kerapian sebagai berikut:

- 1) Diawali dari posisi istirahat.
- 2) Khusus dilaksanakan pada pasukan yang dalam posisi berdiri
- 3) Aba-aba dalam periksa kerapian:
 - a) Periksa kerapian biasa “PERIKSA KERAPIHAN = MULAI = SELESAI “.
 - b) Periksa kerapian parade “PARADE PERIKSA KERAPIHAN =MULAI = SELESAI “.

Tata cara periksa kerapian biasa dan parade dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Saat aba-aba “MULAI” melaksanakan sikap sempurna.
- 2) Badan dibungkukkan 90 derajat, kaki lurus.
- 3) Kedua tangan tergantung lurus kebawah, kelima jari dibuka.
- 4) Selanjutnya merapihkan bagian bawah secara berurutan.
- 5) Dimulai dari kaki kiri dan kaki kanan (bagian tali sepatu).
- 6) Dilanjutkan merapihkan saku celana bagian lutut sebelah kiri dan kanan (bila menggunakan PDL).
- 7) Berikutnya menarik ujung baju bagian bawah depan.
- 8) Menarik ujung baju bagian bawah belakang.
- 9) Merapihkan lidah/tutup saku dada bagian kiri dan kanan.
- 10) Merapihkan kerah baju bagian kiri dan kanan.

- 11) Membetulkan tutup kepala (topi/baret).
- 12) Selanjutnya tangan kembali ke sikap sempurna.
- 13) Setelah ada aba-aba pelaksanaan "SELESAI" kembali ke sikap istirahat.

d. Berhitung

Tata cara berhitung dalam bentuk formasi bersaf dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Dari sikap sempurna berdiri
- 2) Aba-aba: "HITUNG = MULAI".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Setelah ada aba-aba peringatan: "HITUNG", barisan yang berada di saf paling depan memalingkan kepala secara serentak ke arah kanan 45°, kecuali Peserta yang bertindak sebagai penjuror kanan pandangan lurus kedepan.
 - b) Aba-aba pelaksanaan: "MULAI" hitungan pertama (satu) diawali dari penjuror kanan dengan kepala tidak dipalingkan.
 - c) Untuk urutan kedua dan seterusnya bersamaan dengan menyebut hitungan dua dan seterusnya kepala dipalingkan ke arah semula (lurus ke depan).
 - d) Untuk Peserta paling kiri belakang melaporkan dari tempat jumlah kekurangan "KURANG ..." atau "LENGKAP".

Tata cara berhitung dalam bentuk formasi berbanjar dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Dari sikap sempurna berdiri.
- 2) Aba-aba: "HITUNG = MULAI"
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Peserta paling depan banjar kanan mengawali hitungan pertama dan berturut-turut ke belakang menyebutkan nomornya masing-masing dengan kepala tetap tegak.
 - b) Peserta paling kiri belakang melaporkan dari tempat jumlah
 - c) kekurangan "KURANG..." atau "LENGKAP".

e. Lencang kanan/kiri, setengah lengan lencang kanan/kiri, dan lencang depan

Ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Pasukan dalam posisi sikap sempurna.

2) Aba-aba sebagai berikut:

- a) Untuk lencang kanan/kiri “LENCANG KANAN/KIRI = GERAK”.
- b) Untuk setengah lengan lencang kanan/kiri “SETENGAH LENGAN LENCANG KANAN/KIRI = GERAK”.
- c) Untuk lencang depan “LENCANG DEPAN = GERAK”.

3) Dilaksanakan dalam formasi bersaf dan berbanjar.

Tata cara lencang kanan dan atau lencang kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi bersaf.
- 2) Pada aba-aba pelaksanaan saf paling depan mengangkat lurus lengan kanan/kiri mengambil jarak satu lengan sampai tangan menyentuh bahu orang yang berada disebelahnya. Jari-jari tangan menggenggam dan kepala dipalingkan ke kanan/kiri dengan tidak terpaksa.
- 3) Penjuru saf tengah dan belakang, melaksanakan lencang depan 1 lengan ditambah 2 kepal, setelah lurus menurunkan tangan secara bersamaan kemudian ikut memalingkan muka ke samping kanan/kiri dengan tidak mengangkat tangan.
- 4) Masing-masing saf meluruskan diri hingga dapat melihat dada orang-orang yang berada disebelah kanan/kiri sampai kepada penjuru kanan/kirinya.
- 5) Penjuru kanan/kiri tidak berubah tempat.
- 6) Setelah lurus aba-aba “TEGAK = GERAK”.
- 7) Kepala dipalingkan kembali ke depan bersamaan tangan kanan kembali ke sikap sempurna.

Tata cara setengah lengan lencang kanan dan atau setengah lengan lencang kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Secara umum pelaksanaannya sama seperti lencang kanan/kiri.
- 2) Tangan kanan/kiri diletakkan dipinggang (bertolak pinggang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri disebelah kanan/kirinya
- 3) pergelangan tangan lurus, ibu jari disebelah belakang dan empat jari lainnya rapat disebelah depan.
- 4) Pada aba-aba “TEGAK = GERAK” semua serentak menurunkan lengan
- 5) memalingkan muka kembali ke depan dan berdiri dalam sikap sempurna.

Tata cara lencang depan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan pada saat pasukan dalam formasi berbanjar.
- 2) Penjuru tetap sikap sempurna sedangkan banjar kanan nomor dua dan

seterusnya meluruskan ke depan dengan mengangkat tangan jari-jari tangan menggenggam, punggung tangan menghadap ke atas jarak 1 lengan ditambah 2 kepal orang yang di depannya.

- 3) Banjar dua dan tiga saf terdepan mengambil antara satu lengan/ setengah lengan disamping kanan, setelah lurus menurunkan tangan, serta menegakkan kepala kembali dengan serentak.
- 4) Pada aba-aba "TEGAK = GERAK" banjar kanan kecuali penjuru secara
- 5) serentak menurunkan lengan dan berdiri dalam sikap sempurna.

f. Perubahan arah

Ketentuan umum pelaksanaan perubahan arah gerakan ditempat tanpa senjata diatur sebagai berikut:

- 1) Semua gerakan diawali dari posisi sikap sempurna.
- 2) Gerakan perubahan arah meliputi:
 - a) Hadap kanan.
 - b) Hadap kiri.
 - c) Serong kanan.
 - d) Serong kiri.
 - e) Balik kanan.

Urutan kegiatan hadap kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aba-aba "HADAP KANAN = GERAK".
- 2) Saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan dengan lekukan kaki kiri berada di ujung kaki kanan, berat badan berpindah ke kaki kanan pandangan mata tetap lurus kedepan.
- 3) Tumit kaki kanan dan badan diputar ke kanan 90° dengan poros tumit kaki kanan.
- 4) Kaki kiri dirapatkan kembali ke kaki kanan seperti dalam keadaan sikap sempurna.

Urutan kegiatan hadap kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aba-aba "HADAP KIRI = GERAK".
- 2) Saat aba-aba pelaksanaan kaki kanandiajukan melintang di depan kaki kiri dengan lekukan kaki kanan berada di ujung kaki kiri, berat badan berpindah ke kaki kiripandangan mata tetap lurus kedepan.
- 3) Tumit kaki kiridan badan diputar ke kiri 90° dengan poros tumit kaki kiri.
- 4) Kaki kanan dirapatkan kembali ke kaki kiri seperti dalam keadaan sikap sempurna.

Urutan kegiatan hadap serong kanan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aba-aba "HADAP SERONG KANAN = GERAK".
- 2) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri digeser sejajar dengan kaki kanan, berjarak ± 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus kedepan.
- 3) Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 45° dengan poros tumit kaki kanan.
- 4) Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan dengan tidak diangkat.

Urutan kegiatan hadap serong kiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aba-aba "HADAP SERONG KIRI = GERAK"
- 2) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan digeser sejajar dengan kaki kiri, berjarak ± 20 cm atau selebar bahu, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus kedepan.
- 3) Kaki kiri dan badan diputar ke kiri 45° dengan poros tumit kaki kiri.
- 4) Tumit kaki kanan dirapatkan ke tumit kaki kiridengan tidak diangkat.

Urutan kegiatan balik kanan diatur sebagai berikut:

- 1) Aba-aba "BALIK KANAN = GERAK".
- 2) Kaki kiri diajukan melintang di depan kaki kanan, lekukan kaki kiri di ujung kaki kanan membentuk huruf "T" dengan jarak satu kepalan tangan, tumpuan berat badan berada di kaki kiri, posisi badan dan pandangan mata tetap lurus kedepan.
- 3) Kaki kanan dan badan diputar ke kanan 180° dengan poros tumit kaki kanan.
- 4) Tumit kaki kiri dirapatkan ke tumit kaki kanan tidak diangkat (kembali seperti dalam keadaan sikap sempurna).

g. Membuka/menutup barisan:

Ketentuan Buka barisan.

- 1) Diawali dari posisi sikap sempurna dengan formasi berbanjar.
- 2) Aba-aba adalah "BUKA BARISAN = JALAN".
- 3) Pada aba-aba pelaksanaan banjar kanan dan kiri melangkah satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan banjar tengah tetap ditempat.

Ketentuan tutup barisan.

- 1) Diawali dari posisi sikap sempurna dengan formasi berbanjar.
- 2) Aba-aba adalah "TUTUP BARISAN = JALAN".
- 3) Pada aba-aba pelaksanaan banjar kanan dan kiri melangkah satu langkah ke samping kanan dan kiri, sedangkan banjar tengah tetap di tempat.

h. Gerakan jalan ditempat.

Ketentuan umum jalan ditempat diawali dari posisi berdiri sikap sempurna. Aba-aba jalan ditempat adalah "JALAN DI TEMPAT = GERAK".

Urutan pelaksanaan jalan ditempat:

- 1) Saat aba-aba pelaksanaan kaki kiri dan kanan diangkat secara bergantian dimulai dengan kaki kiri.
 - 2) Posisi lutut dan badan membentuk sudut 90° (horizontal).
 - 3) Ujung kaki menuju kebawah.
 - 4) Tempo langkah sama dengan langkah biasa.
 - 5) Badan tegak pandangan mata lurus ke depan.
 - 6) Lengan lurus dirapatkan pada badan dengan tidak dilenggangkan.
- Aba-aba "HENTI = GERAK".

- 1) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah lalu ditambah satu langkah.
- 2) Selanjutnya kaki kanan/kiri dirapatkan pada kaki kanan/kiri menurut irama langkah biasa dan mengambil sikap sempurna.

3. Gerakan Berjalan

Panjang, tempo, dan macam langkah:

- a. Langkah biasa 65 cm/103 tiap menit.
- b. Langkah tegap/defile 65 cm/103 tiap menit.
- c. Langkah perlahan 40 cm/30 tiap menit.
- d. Langkah ke samping 40 cm/70 tiap menit.
- e. Langkah ke belakang 40 cm/70 tiap menit.
- f. Langkah ke depan 60 cm/70 tiap menit.
- g. Langkah waktu lari 80 cm/165 tiap menit.

Untuk gerakan kelompok/pasukan dilaksanakan secara serentak bersama-sama.

a. Gerakan maju jalan

- 1) Diawali dari sikap sempurna.
- 2) Aba-aba: "MAJU = JALAN".
- 3) Pelaksanaan:

- a) Kaki kiri dilangkahkan ke depan dengan lutut lurus telapak kaki diangkat sejajar dengan tanah setinggi ± 20 cm.
- b) Tangan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, jari tangan kanan menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke atas.
- c) Tangan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° , jari tangan kiri menggenggam dengan punggung ibu jari menghadap ke bawah.
- d) Kaki kiri dihentakkan, selanjutnya kaki kanan dilangkahkan ke depan setelah kaki kiri tepat pada posisinya, untuk ayunan tangan setelah langkah pertama ke depan 45° ke belakang 30° .
- e) Demikian seterusnya secara bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan.

b. Langkah biasa adalah langkah bergerak maju dengan panjang langkah dan tempo tertentu dengan cara meletakkan kaki di atas tanah tumit lebih dahulu, disusul dengan seluruh tapak kaki kemudian ujung kaki meninggalkan tanah pada waktu membuat langkah berikutnya.

- 1) Dari sikap sempurna.
- 2) Aba-aba: "MAJU = JALAN".
- 3) Pelaksanaan.

- a) Langkah pertama kaki kiri dihentakkan, kaki lurus, telapak kaki diangkat ± 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .
- b) Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dilangkahkan ke depan, telapak kaki diangkat ± 20 cm, bersamaan itu tangan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 45° , punggung ibu jari menghadap ke atas, tangan kanan dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

c. Langkah tegap adalah langkah yang dipersiapkan untuk memberikan penghormatan dan diberi hormat terhadap pasukan, Pos jaga kesatrian, penghormatan terhadap Pati serta digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

- 1) Dari sikap sempurna.
- 2) Aba-aba: "LANGKAH TEGAP MAJU = JALAN".

3) Pelaksanaan.

- a) Langkah pertama kaki kiri dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki rata dan sejajar dengan tanah, diangkat ± 20 cm, bersamaan itu lengan kanan dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .
- b) Langkah selanjutnya dilakukan secara bergantian, kaki kanan dihentakkan, lutut lurus, telapak kaki menghadap ke depan diangkat ± 20 cm, bersamaan itu lengan kiri dilenggangkan lurus ke depan membentuk sudut 90° sejajar dengan bahu, punggung ibu jari menghadap ke atas, lengan kiri dilenggangkan ke belakang dengan sudut 30° .

d. Langkah defile adalah langkah tegap yang menggunakan aba-aba "LANGKAH DEFILE MAJU = JALAN". Digunakan pada acara tambahan dari suatu upacara yang kegiatannya dilaksanakan oleh pasukan dalam susunan tertentu, dipimpin seorang komandan yang bergerak maju melewati depan Irup dan menyampaikan penghormatan kepada mereka yang berhak menerima.

e. Langkah ke samping adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke kiri/ke kanan, menghindarkan aba-aba "Berhenti", maka jumlah langkah-langkah maksimal 4 langkah, sekaligus telah diucapkan pada aba-aba peringatan dimulai melangkah dengan kaki kiri.

1) Dari sikap sempurna.

2) Aba-aba : "(jumlah langkah)... LANGKAH KE KANAN/KIRI = JALAN".

3) Pelaksanaan. Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan kesamping kanan/kiri. Selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada kaki kanan/kiri, sikap akan tetap seperti pada sikap sempurna.

f. Langkah ke belakang adalah langkah untuk memindahkan pasukan/sebagian ke belakang, menghindarkan aba-aba "Berhenti", maka jumlah langkah-langkah maksimal 4 langkah, sekaligus telah diucapkan pada aba-aba peringatan, dimulai melangkah dengan kaki kiri.

1) Dari sikap sempurna.

2) Aba-aba: "..... LANGKAH KE KEBELAKANG = JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri melangkah kebelakang sepanjang 40 cm dan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan.

- b) Melangkah sesuai jumlah langkah yang diperintahkan.
- c) Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

g. Langkah ke depan adalah memindahkan pasukan/sebagian dari pada pasukan sebanyak-banyaknya 4 langkah ke depan dan cara melangkah adalah seperti langkah tegap tetapi dengan tempo yang lebih lambat serta langkah yang lebih pendek, tidak melenggang.

- 1) Dari sikap sempurna.
- 2) Aba-aba: ".....LANGKAH KEDEPAN = JALAN."
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Pada aba-aba pelaksanaan dimulai kaki kiri melangkah ke depan bergantian dengan kaki kanan melangkah sesuai jumlah langkah yang diperintahkan.
 - b) Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna.

h. Langkah lari adalah langkah melayang yang dimulai dengan menghentakkan kaki kiri 1 langkah, telapak kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan dengan panjang langkah 80 CM dan tempo langkah 165 tiap menit.

Gerakan langkah berlari dari sikap sempurna:

- 1) Aba-aba: "LARI MAJU = JALAN".
- 2) Pelaksanaan:
 - a) Pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan di letakkan dipinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap keluar.
 - b) Kedua siku sedikit kebelakang, badan agak dicondongkan kedepan.
 - c) Pada aba-aba pelaksanaan, dimulai menghentakkan kaki kiri dan selanjutnya lari dengan cara kaki diangkat secara bergantian dan sedikit melayang, selanjutnya kaki diletakkan dengan ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara tidak kaku.

Gerakan langkah berlari dari langkah biasa:

- 1) Aba-aba: "LARI = JALAN".
- 2) Pelaksanaan:
 - a) Pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan diletakkan di pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap keluar.

- b) Kedua siku sedikit ke belakang, badan sedikit dicondongkan kedepan.
- c) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ke tanah, kemudian ditambah 1 langkah, selanjutnya berlari.

Gerakan langkah berlari ke langkah biasa.

1) Aba-aba: "LANGKAH BIASA = JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh ke tanah ditambah tiga langkah.
- b) Kaki kiri dihentakkan, bersamaan dengan itu kedua lengan dilenggangkan.
- c) Berjalan dengan langkah biasa.

Gerakan langkah berlari ke berhenti.

1) Aba-aba: "HENTI = GERAK".

2) Pelaksanaan:

- a) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di tanah ditambah tiga langkah.
- b) Selanjutnya kaki dirapatkan kemudian kedua kepala tangan diturunkan untuk mengambil sikap sempurna.

i. Langkah merdeka

1) Dari langkah biasa.

2) Aba-aba: "LANGKAH MERDEKA = JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Peserta berjalan bebas tanpa terikat dengan ketentuan baik panjang, macam, dan tempo langkah.
- b) Atas pertimbangan komandan segera dapat diijinkan untuk berbuat sesuatu dan dalam keadaan lain terlarang (antara lain: berbicara, buka topi, dan menghapus keringat).
- c) Langkah merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh jalan jauh/lapangan yang tidak rata. Peserta tetap dilarang meninggalkan barisan.
- d) Kembali ke langkah biasa. Untuk melaksanakan gerakan ini lebih
- e) dahulu harus diberikan petunjuk "SAMAKAN LANGKAH".
- f) Setelah langkah barisan sama, komandan dapat memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaan.
- g) Aba-aba "LANGKAH BIASA = JALAN".

j. Ganti langkah

- 1) Dari langkah biasa atau langkah tegap.
- 2) Aba-aba: "GANTI LANGKAH= JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian ditambah satu langkah.
 - b) Sesudah itu ujung kaki kanan/kiri yang sedang dibelakang dirapatkan pada tumit kaki sebelahnya bersamaan dengan itu lenggang tangan dihentikan tanpa dirapatkan pada badan.
 - c) Selanjutnya disesuaikan dengan langkah baru yang disamakan langkah pertama tetap sepanjang satu langkah.

k. Berhimpun

- 1) Dari istirahat bebas.
- 2) Aba-aba: "BERHIMPUN = MULAI ". "SELESAI".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Pada waktu aba-aba peringatan seluruh Peserta mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh kepada yang memberi aba-aba.
 - b) Pada aba-aba pelaksanaan seluruh Peserta mengambil sikap untuk lari, selanjutnya lari menuju di depan komandan dengan jarak 3 langkah.
 - c) Pada waktu seluruh Peserta sampai ditempat, mengambil sikap istirahat.
 - d) Setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh Peserta mengambil sikap sempurna, balik kanan selanjutnya menuju tempat masing-masing.
 - e) Pada saat datang ditempat komandan serta kembali tidak menyampaikan penghormatan.

l. Berkumpul

Apabila lebih dari 9 orang selalu berkumpul dalam bersaf 3 atau berbanjar 3, kalau kurang dari 9 orang menjadi bersaf/berbanjar satu. Meluruskan ke depan hanya digunakan dalam berbentuk berbanjar. Penunjukan penjurur tidak berdasarkan kepangkatan.

Berkumpul formasi bersaf:

- 1) Dari istirahat bebas.
- 2) Aba-aba: "BERSAF KUMPUL = MULAI ". "SELESAI".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjurur. Contohnya: "PESERTA JEFRI SEBAGAI PENJURUR".

- b) Peserta Jefri menghadap penuh ke arah pemanggil, mengambil sikap sempurna dan mengulangi katakata pemanggil. "SIAP PESERTA JEFRI SEBAGAI PENJURU".
- c) Mengambil sikap berlari menuju pemanggil dan berhenti \pm 6 langkah di depannya menghadap penuh.
- d) Komandan/Pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan "PELETON I - BERSAF KUMPUL", secara serentak seluruh Peserta mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh.
- e) Setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh Peserta mengambil sikap berlari kemudian berlari menuju kepenjuru.
- f) Selanjutnya masing-masing Peserta menempatkan diri di belakang dan samping kiri penjuru, membentuk formasi bersaf.
- g) Penjuru mengucapkan "LURUSKAN", Peserta yang dibelakang penjuru melaksanakan lencang depan kemudian tangan diturunkan sedangkan yang dikiri penjuru secara serentak memalingkan kepala kekanan untuk meluruskan dengan melencangkan lengan kanan untuk saf depan dan memalingkan kepala seluruhnya kecuali penjuru paling kanan. Penjuru kanan mengucapkan "LURUS" maka saf depan menurunkan lengan dan secara serentak kepala kembali menghadap kedepan dalam keadaan sikap sempurna.
- h) Setelah ada aba-aba "SELESAI", seluruh pasukan mengambil sikap istirahat.

Berkumpul formasi berbanjar

- 1) Dari istirahat bebas.
- 2) Aba-aba: "BERBANJAR KUMPUL = MULAI".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Komandan/pemimpin memanggil satu orang sebagai penjuru. Contohnya: "PESERTA DADANG SEBAGAI PENJURU".
 - b) Peserta Dadang menghadap penuh ke arah pemanggil, mengambil sikap sempurna dan mengulangi kata-kata pemanggil. "SIAP PESERTA DADANG SEBAGAI PENJURU".
 - c) Mengambil sikap berlari kemudian berlari menuju pemanggil dan berhenti \pm 6 langkah di depannya menghadap penuh.
 - d) Komandan/Pimpinan memberi aba-aba petunjuk dan peringatan "PELETON I BERBANJAR KUMPUL", secara serentak seluruh Peserta mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh
 - e) Setelah aba-aba pelaksanaan "MULAI" seluruh Peserta mengambil sikap berlari kemudian berlari menuju kepenjuru.

- f) Selanjutnya masing-masing Peserta menempatkan diri di samping kiri dan belakang penjur, membentuk formasi berbanjar.
- g) Penjur mengucapkan “LURUSKAN”, Peserta yang lainnya secara serentak untuk yang dikiri penjur melaksanakan lencang kanan dan memalingkan kepala kekanan kemudian menurunkan tangan menghadap kedepan sedangkan yang dibelakang penjur melaksanakan lencang depan untuk meluruskan.
- h) Setelah orang yang paling belakang/banjar kanan paling belakang melihat barisannya sudah lurus, maka ia memberikan isyarat dengan mengucapkan “LURUS”, secara serentak Peserta yang dibelakang penjur menurunkan lengan kanan dan kembali kesikap sempurna.
- i) Setelah ada aba-aba “SELESAI” seluruh pasukan mengambil sikap istirahat. c. Apabila lebih dari 9 orang selalu berkumpul dalam bersyaf 3 atau berbanjar 3, kalau kurang dari 9 orang menjadi bersaf/berbanjar satu. Meluruskan ke depan hanya digunakan dalam berbentuk berbanjar. Penunjukan penjur tidak berdasarkan golongan kepangkatan.

m. Gerakan perubahan arah dari berjalan ke berhenti

Dari langkah biasa.

- 1) Dari sedang berjalan.
- 2) Aba-aba: “HENTI = GERAK”.
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Pada aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di tanah ditambah satu langkah.
 - b) Selanjutnya berhenti dan sikap sempurna.

Posisi sedang jalan ditempat.

- 1) Aba-aba: “ HENTI = GERAK”.
- 2) Pelaksanaan: Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah ditambah satu gerakan kemudian kaki kanan/kiri dirapatkan selanjutnya mengambil sikap sempurna.

Hadap kanan/kiri berhenti.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: “HADAP KANAN/KIRIHENTI=GERAK”.
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk hadap kanan henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah satu langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah dua langkah.

- b) Untuk hadap kiri henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah dua langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
- c) Gerakan selanjutnya seperti gerakan hadap kanan/kiri dan sikap sempurna.

Hadap serong kanan/kiri berhenti.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRIHENTI= GERAK".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk hadap serong kanan henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah satu langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - b) Untuk hadap serong kiri henti, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, ditambah dua langkah. Selanjutnya apabila dengan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - c) Gerakan selanjutnya seperti gerakan hadap kanan/kiri dan sikap sempurna.

Balik kanan henti.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "BALIK KANAN HENTI = GERAK".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk balik kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah satu langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - b) Gerakan selanjutnya seperti gerakan balik kanan dan sikap sempurna.

n. Gerakan perubahan arah dari berhenti ke berjalan

Hadap kanan/kiri

- 1) Dari sikap sempurna.
- 2) Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Membuat gerakan hadap kanan/kiri.
 - b) Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

Hadap serong kanan/kiri.

- 1) Dari Sikap sempurna.
- 2) Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU =JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Membuat gerakan hadap serong kiri/ kanan.
- b) Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

Balik kanan.

1) Dari Sikap sempurna.

2) Aba-aba: "BALIK KANAN MAJU = JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Membuat gerakan balik kanan.
- b) Pada hitungan ketiga, kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

Belok kanan/kiri.

1) Dari Sikap sempurna.

2) Aba-aba: "BELOK KANAN/KIRI MAJU =JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Penjuru depan merubah arah 90° ke kanan/kiri dan mulai berjalan ke arah tertentu.
- b) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri.

1) Dari Sikap sempurna.

2) Aba-aba: "TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI MAJU = JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Penjuru tiap-tiap banjar melangkah satu langkah ke depan kemudian melaksanakan dua kali belok kanan arah 180° .
- b) Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

o. Gerakan perubahan arah dari berjalan ke berjalan

Hadap kanan/kiri.

1) Dari berjalan.

2) Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRI MAJU=JALAN".

3) Pelaksanaan:

- a) Untuk hadap kanan abapelaksanaan jatuh pada waktu kaki kiriditambah satu langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri jatuh ditambah satu langkah.
- b) Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

Hadap serong kanan/kiri.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU = JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk hadap serong kanan/kiri, Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri jatuh ditanah ditambah satu langkah, sedangkan hadap serong kiri jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - b) Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

Balik kanan.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "BALIK KANAN MAJU = JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri jatuh ditanah ditambah satu langkah, sedangkan pada kaki kanan ditambah dua langkah.
 - b) Pada hitungan ke empat kaki kiri tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.

Belok kanan/kiri.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "BELOK KANAN/KIRI=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk belok kanan aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu penjurur kaki kiri jatuh ditanah ditambah satu langkah, sedangkan belok kiri jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.
 - b) Penjurur depan merubah arah 90° ke kanan/kiri atau hadap kanan/kiri.
 - c) Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.
 - d) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjurur belok.

Dua kali belok kanan/kiri.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk dua kali belok kanan, aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri penjurur jatuh ditanah ditambah satu langkah, sedangkan belok kiri jatuh pada kaki kanan ditambah satu langkah.

- b) Penjuru depan merubah arah 90° ke kanan/kiri.
- c) Pada hitungan ke empat kaki kiri/kanan tidak dirapatkan langsung dilangkahkan seperti gerakan maju jalan setelah dua langkah berjalan kemudian melakukan gerakan belok kanan/kiri jalan lagi.
- d) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok.

Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri.

- 1) Dari berjalan.
- 2) Aba-aba: "TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk tiap-tiap banjar dua kali belok kanan, apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri, maka pelaksanaan dengan hitungan empat langkah, sedangkan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan jatuh pada kaki kanan dengan hitungan lima langkah.
 - b) Penjuru depan tiap-tiap banjar merubah arah 180° ke kanan/kiri atau langsung dua kali belok kanan/kiri.
 - c) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, guna membelokkan pasukan diruang/lapangan yang sempit.

p. Perubahan arah pada waktu berlari

Hadap kanan/kiri Lari.

- 1) Dari berlari.
- 2) Aba-aba: "HADAP KANAN/KIRI MAJU = JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk hadap kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.
 - b) Untuk hadap kiri aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah empat langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah tiga langkah.
 - c) Pelaksanaan hadap kanan/kiri lari kaki tidak dirapatkan langsung dilangkahkan dan berlari.

Hadap serong kanan/kiri Lari.

- 1) Dari berlari.
- 2) Aba-aba: "HADAP SERONG KANAN/KIRI MAJU=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk hadap serong kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kakikiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.

- b) Untuk hadap serong kiri aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah empat langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah tiga langkah.
- c) Pelaksanaan hadap serong kanan/kiri lari kaki tidak dirapatkan langsung dilangkahkan dan berlari.

Balik kanan lari.

- 1) Dari berlari.
- 2) Aba-aba: "BALIK KANAN MAJU=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.
 - b) Membuat gerakan balik kanan.
 - c) Peserta yang paling belakang menjadi penjuror depan dan penjuror depan menjadi di belakang.

Belok kanan/kiri lari.

- 1) Dari berlari.
- 2) Aba-aba: "BELOK KANAN/KIRI=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk belok kanan aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah empat langkah.
 - b) Penjuror depan mengubah arah 90° ke kanan/kiri atau hadap kanan/kiri.
 - c) Kegiatan selanjutnya belok kiri/kanan dan berlari.
 - d) Peserta-Peserta lainnya belok setibanya di tempat penjuror belok.

Dua kali belok kanan/kiri lari.

- 1) Dari berlari.
- 2) Aba-aba: "DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN"
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk dua kali belok kanan, Aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah empat langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah tiga langkah.
 - b) Untuk dua kali belok kiri, Aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.
 - c) Penjuror depan merubah arah 180° ke kanan/kiri atau hadap kanan/kiri.

- d) Kegiatan selanjutnya melaksanakan dua kali belok kanan/kiridan berlari.
- e) Peserta-Peserta lainnya melaksanakan dua kali belok kanan/kiri setibanya di tempat penjuror belok.

Tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri lari.

- 1) Dari berlari.
- 2) Aba-aba: "TIAP-TIAP BANJAR DUA KALI BELOK KANAN/KIRI=JALAN".
- 3) Pelaksanaan:
 - a) Untuk dua kali belok kanan,aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah. Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah tiga langkah.
 - b) Untuk dua kali belok kiri,aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri ditambah tiga langkah.Selanjutnya apabila aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan ditambah empat langkah.
 - c) Penjuror depan tiap-tiap banjar merubah arah 180^o ke kanan/kiri atau langsung dua kali belok kanan/kiri.
 - d) Kegiatan selanjutnya melaksanakan gerakan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri dan berlari.
 - e) Peserta-Peserta lainnya melaksanakan tiap-tiap banjar dua kali belok kanan/kiri setibanya di tempat penjuror membelokkan pasukan.

q. Gerakan haluan kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk bersaf, guna merubah arah tanpa merubah bentuk

Dari berhenti ke berhenti.

- 1) Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI=JALAN".
- 2) Pelaksanaan:
 - a) Pada aba-aba pelaksanaan, penjuror kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan lahan hingga merubah arah sampai 90^o.
 - b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90^o, kemudian berjalan ditempat.
 - c) Setelah penjuror kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
 - d) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: "HENTI=GERAK". Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.

Dari berhenti ke berjalan.

1) Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI MAJU=JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Pada aba-aba pelaksanaan, penjuror kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90° .
- b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
- c) Setelah penjuror kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka
- d) teriak "LURUS".
- e) Kemudian Komandan memberi aba-aba: "MAJU = JALAN". Pasukan maju jalan dengan gerakan langkah biasa (pasukan tidak berhenti dulu).

Dari berjalan ke berhenti.

1) Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI=JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Aba-aba pelaksanaan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian ditambah 1 langkah penjuror kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90° .
- b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.
- c) Setelah penjuror kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka
- d) teriak "LURUS".
- e) Kemudian Komandan memberi aba-aba: "HENTI =GERAK"
- f) Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.

Dari berjalan ke berjalan.

1) Aba-aba: "HALUAN KANAN/KIRI MAJU=JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Aba-aba pelaksanaan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian ditambah 1 langkah, penjuror kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90° .
- b) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90° , kemudian berjalan ditempat.

- c) Setelah penjuror kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
 - d) Kemudian Komandan memberi aba-aba: "MAJU = JALAN". Pasukan maju jalan dengan gerakan langkah biasa.
- r. Gerakan melintang kanan/kiri hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar guna merubah bentuk pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap.**

Dari berhenti ke berhenti.

1) Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI=JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Melintang Kanan, pada aba-aba pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri.
- b) Melintang Kiri, pada aba-aba pelaksanaan hadap kirikemudian melaksanakan haluan kanan.
- c) Pasukan melaksanakan haluan kanan/kiri yaitu penjuror kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.
- d) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat.
- e) Setelah penjuror kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
- f) Kemudian Ketua Kelas memberi aba-aba: "HENTI=GERAK". Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditamah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.

Dari berhenti ke berjalan.

1) Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI MAJU=JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Melintang Kanan, pada aba-aba pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri..
- b) Melintang Kiri, pada aba-aba pelaksanaan hadap kiri kemudian melaksanakan haluan kanan.
- c) Pasukan melaksanakan haluan kiri/kanan yaitu penjuror kiri/kanan berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.
- d) Masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat.

- e) Setelah penjuru kiri/kanandepan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
- f) Kemudian Komandan memberi aba-aba: "MAJU = JALAN". Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan maju jalan dengan gerakan langkah biasa. (pasukan tidak berhenti dulu).

Dari berjalan ke berhenti.

1) Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI=JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Melintang kanan jalan, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah 2/1 langkah, pelaksanaan hadap kiri kemudian melaksanakan haluan kanan.
- b) Melintang Kiri, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah 1/2 langkah, pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri.
- c) Pasukan melaksanakan haluan kanan/kiri yaitu penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.
- d) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat.
- e) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak "LURUS".
- f) Kemudian Komandan memberi aba-aba: "HENTI = GERAK". Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.

Dari berjalan ke berjalan.

1) Aba-aba: "MELINTANG KANAN/KIRI MAJU =JALAN".

2) Pelaksanaan:

- a) Melintang kanan jalan, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kanan/kiri ditambah 2/1 langkah, pelaksanaan hadap kanan kemudian melaksanakan haluan kiri.
- b) Melintang Kiri, aba-aba pelaksanaan jatuh pada kaki kiri/kanan ditambah 2/1 langkah, pelaksanaan hadap kiri. kemudian melaksanakan haluan kanan.
- c) Pasukan melaksanakan haluan kanan/kiri yaitu penjuru kanan/kiri berjalan ditempat dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah sampai 90°.

- d) Bersamaan dengan itu masing-masing saf mulai maju jalan dengan rapih (dengan tidak melenggang) sambil meluruskan safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat.
- e) Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus maka teriak “LURUS”.
- f) Kemudian Komandan memberi aba-aba: “MAJU = JALAN”. Pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah ditambah 1 langkah kemudian seluruh pasukan berhenti dan sikap sempurna.

s. Memberikan perintah kepada seseorang yang berada dalam barisan keadaan sikap sempurna.

Apabila Komandan/Pelatih memberikan perintah kepada seseorang yang berada dalam barisan keadaan sikap sempurna, terlebih dahulu ia memanggil orang itu keluar barisan untuk diberikan perintah. Orang yang menerima perintah ini harus mengulangi perintah tersebut sebelum melaksanakannya dan melaksanakan perintah itu dengan bersemangat.

Cara menghadap bila pasukan bersaf:

- 1) Untuk saf depan, tidak perlu balik kanan langsung menuju ke arah yang memanggil.
- 2) Untuk saf tengah dan belakang, balik kanan kemudian melalui belakang saf paling belakang selanjutnya memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.
- 3) Bagi orang yang berada diujung kanan maupun kiri tanpa balik kanan langsung menuju arah yang memanggil (termasuk saf 2 dan 3).

Cara menghadap bila pasukan berbanjar:

- 1) Untuk saf depan tidak perlu balik kanan, langsung menuju ke arah yang memanggil.
- 2) Untuk banjar tengah, setelah balik kanan keluar barisan melalui belakang safnya sendiri terus memilih jalan yang terdekat. Sedang bagi banjar kanan/kiri tanpa balik kanan terus memilih jalan yang terdekat menuju ke arah yang memanggil.

Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila Peserta dipanggil sedang dalam barisan dengan menyebut nama/pangkat/golongan sebagai berikut:

- 1) Komandan/Pelatih memanggil “Peserta Badu tampil ke depan”, setelah selesai dipanggil Peserta tersebut mengucapkan kata-kata “Siap tampil ke depan” kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih yang memanggil.

- 2) Kemudian mengucapkan kata-kata: "Lapor siap menghadap". Selanjutnya menunggu perintah.
- 3) Setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut. Contoh: "Berikan aba-aba ditempat", Mengulangi: "Berikan aba-aba di tempat".Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan Komandan/Pelatih (memberikan aba-aba ditempat).
- 4) Setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: "Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai".
- 5) Setelah mendapat perintah "Kembali ke tempat", Peserta mengulangi perintah kemudian menghormat, selanjutnya kembali ke tempat.

Cara menyampaikan laporan dan penghormatan apabila Peserta dipanggil sedang dalam barisan dengan tidak menyebut nama /pangkat/golongan sebagai berikut:

- 1) Komandan/Pelatih memanggil "Banjar tengah nomor 3 tampil ke depan", setelah selesai dipanggil Peserta tersebut mengucapkan kata-kata "Siap Peserta Badu tampil ke depan" kemudian keluar dari barisan sesuai dengan tata cara keluar barisan dan menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih yang memanggil.
- 2) Kemudian mengucapkan kata-kata: Lapor "Siap menghadap". Selanjutnya menunggu perintah.
- 3) Setelah mendapat perintah/petunjuk mengulangi perintah tersebut. Contoh: "Berikan aba-aba ditempat", Mengulangi: "Berikan aba-aba ditempat".Selanjutnya melaksanakan perintah yang diberikan Komandan/Pelatih (memberikan aba-aba ditempat).
- 4) Setelah selesai melaksanakan perintah/petunjuk kemudian menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih yang memanggil dan mengucapkan kata-kata: "Memberikan aba-aba di tempat telah dilaksanakan, laporan selesai".
- 5) Setelah mendapat perintah "Kembali ke tempat", Peserta mengulangi perintah "Kembali ke tempat",kemudian menghormat, selanjutnya kembali ke tempat.
- 6) Jika pada waktu dalam barisan salah seorang meninggalkan barisannya, maka terlebih dahulu harus mengambil sikap sempurna dan minta ijin kepada Komandan dengan cara mengangkat tangan kirinya ke atas (tangan dibuka jari-jari dirapatkan).
Contoh: Peserta yang akan meninggalkan barisan mengangkat tangan. Komandan bertanya: Ada apa ?. Peserta menjawab: Ijin ke belakang.

Komandan memutuskan: Baik, lima menit kembali (beri batas waktu sesuai keperluan). Peserta yang akan meninggalkan barisan mengulangi Lima menit kembali.

- 7) Setelah mendapat ijin, ia keluar dari barisannya, selanjutnya menuju tempat sesuai keperluannya.
- 8) Bila keperluannya telah selesai, maka Peserta tersebut menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih, selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor, kebelakang selesai laporan selesai”. Setelah ada perintah dari Komandan “Masuk Barisan”, maka Peserta tersebut mengulangi perintah kemudian menghormat, balik kanan dan kembali ke barisannya pada kedudukan semula.

Cara bergabung masuk barisan perorangan/pasukan kepada pasukan yang lebih besar:

- 1) Perorangan. Peserta menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor, ijin masuk barisan”. Setelah ada perintah dari Komandan “Masuk Barisan”, maka Peserta tersebut mengulangi perintah kemudian balik kanan dan masuk barisan.
- 2) Pasukan. Pimpinan pasukan yang akan bergabung menyiapkan pasukannya di suatu tempat kemudian menghadap kurang lebih 6 langkah di depan Komandan/Pelatih, melaksanakan penghormatan selanjutnya laporan sebagai berikut: “Lapor,.....orang ijin bergabung”. Setelah ada perintah dari Komandan “Laksanakan/kerjakan....”, maka pimpinan pasukan tersebut mengulangi perintah, balik kanan dan membawa pasukan untuk bergabung.



PPPPTK Pkn DAN IPS

Jl. Raya Arhanud, Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Kode Pos: 65324

SUREL: pppptk.pknips@kemdikbud.go.id LAMAN: p4tkpknips.kemdikbud.go.id/